

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PER KECAMATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013



Kerjasama

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

DAN



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

TAHUN ANGGARAN 2014



INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PER KECAMATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013

Kerjasama

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DAN
BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2014**

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PER KECAMATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013

Katalog : 4102002
Ukuran Buku : 21cm x 29,7 cm
Jumlah Halaman : 110 halaman

Kerjasama:



**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta**
Kompleks Kepatihan Danurejan Yogyakarta 55213
Telp/Fax : 0274 586712, 562811 / 0274 586712
Email : bappeda@bappeda.jogjaprov.go.id

dan



**Badan Pusat Statistik
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**
Jalan Lingkar Selatan Tamantirto Kasihan Bantul Yogyakarta
Telp/Fax : 0274 4342234 / 0274 4342230
[Email : bps3400@bps.go.id](mailto:bps3400@bps.go.id)

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

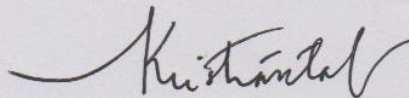
KATA PENGANTAR

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang mengukur capaian pembangunan manusia berbasis pada sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dihitung berdasarkan informasi yang dapat menggambarkan tiga komponen yakni angka harapan hidup yang merepresentasikan bidang kesehatan; angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mengukur capaian pembangunan di bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata pengeluaran per kapita sebagai pendekatan yang mewakili capaian pembangunan untuk layak hidup.

Dari hasil penyusunan Indeks Pembangunan Manusia tahun 2013 ini dapat disimpulkan bahwa secara umum pembangunan manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013 relatif lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, hal ini ditunjukkan dengan peningkatan angka indeks yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Pada publikasi kali ini, untuk pertama kalinya penyajian IPM sampai level kecamatan. Hasilnya diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan konstruktif dan bahan evaluasi serta perencanaan pembangunan pada masa yang akan datang.

Penyusunan publikasi ini merupakan hasil kerjasama antara Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah ikut ambil bagian dalam rangkaian kegiatan penyusunan IPM per kecamatan ini.

Yogyakarta, September 2014
Badan Pusat Statistik
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala,



I. I. Bambang Kristianto, MA, M.Sc
NIP. 19561223 197803 1 001

KATA SAMBUTAN


Sebagai bagian yang terintegrasi dengan pembangunan nasional, pembangunan daerah perlu terus dipantau gerak perkembangannya serta menelaah implikasi yang terkandung di dalamnya. Pemenuhan ketersediaan data statistik mengenai pembangunan manusia tentunya memiliki dimensi yang sangat luas, lengkap, dan terpercaya, yang dapat menggambarkan kondisi daerah dengan berbagai variasi tentu sangat diperlukan. Pemerintah daerah dapat terus mengetahui keadaannya dalam seluruh upaya melaksanakan visi dan misinya melalui program yang dijalankan.

Kami menyambut baik penyusunan **Indeks Pembangunan Manusia per Kecamatan se-Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013**. Indeks tersebut merupakan refleksi dari keberhasilan pembangunan manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi perencanaan dan evaluasi pembangunan serta dalam pengambilan keputusan. Hal ini penting artinya sebagai alat ukur atas hasil pembangunan terutama yang berdampak langsung pada pembangunan manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagai bahan pengambilan kebijakan pada masa yang akan datang.

Semoga semua yang baik ini dapat terus dibina, dikembangkan, serta ditingkatkan di masa mendatang. Mudah-mudahan dapat bermanfaat baik bagi pemerintah, terutama bagi masyarakat luas.

Yogyakarta, September 2014
BAPPEDA
Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala,



Drs. TAVIP AGUS RAYANTO M.Si
NIP. 19641107 199103 1 004 

DAFTAR ISI

Halaman Judul	Hal i
Katalog	ii
Kata Pengantar	iii
Kata Sambutan	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	ix
 Bab I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	5
1.3 Sistematika Penulisan.....	6
 Bab II Metodologi	
2.1 Pengertian.....	7
2.2 Indeks Pembangunan Manusia.....	10
2.3 Penyusunan Indeks.....	13
2.4 Reduksi <i>Shortfall</i>	18
2.5 Ruang Lingkup.....	18
2.6 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	20
 Bab III Gambaran Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	
3.1 Keadaan Geografis.....	21
3.2 Kependudukan	25
3.3 Ketenagakerjaan.....	26
3.4 Kondisi Perekonomian.....	32
3.5 Kondisi Kesehatan	39
3.6 Pendidikan	47
3.7 Kemiskinan	55
 Bab IV Indeks Pembangunan Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta	
4.1 Perkembangan IPM Daerah Istimewa Yogyakarta.....	63
4.2 Perkembangan Komponen IPM.....	68
4.3 Capaian IPM Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Wilayah lain	75
4.4 Variasi IPM antar Kabupaten/Kota	76

	Hal
Bab V Capaian Indeks Pembangunan Manusia Tingkat Kecamatan	
5.1 Indeks Pembangunan Manusia Tingkat Kecamatan	80
5.2 Indikator Kesehatan.....	88
5.3 Indikator Pendidikan.....	90
5.3 Indikator Ekonomi.....	97
Bab VI Penutup	
6.1 Kesimpulan.....	100
6.2 Tindak Lanjut	103

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1	Nilai Maksimum dan Minimum dari Setiap Nilai IPM 17
Tabel 2.2	Diagram Perhitungan IPM 24
Tabel 2.3	Luas Penggunaan Lahan Pertanian dan Bukan Pertanian di DIY 2011 – 2013 24
Tabel 3.2	Gambaran Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Kabupaten/kota Tahun 2013 25
Tabel 3.3	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Kegiatan Dan Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta 27
Tabel 3.4	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta 28
Tabel 3.5	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta 31
Tabel 3.6	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku di D.I. Yogyakarta, 2012-2013 34
Tabel 3.7	Nilai PDRB per Kapita Menurut Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta Atas Dasar Harga Berlaku, 2012-2013 38
Tabel 3.8	Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran Pertama di D.I. Yogyakarta, 2010-2013 40
Tabel 3.9	Jumlah Sarana Kesehatan di D.I. Yogyakarta Menurut Kabupaten/Kota, 2013 43
Tabel 3.10	Jumlah Puskesmas dan Rasionya terhadap Penduduk di D.I. Yogyakarta Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013 45
Tabel 3.11	Jumlah Tenaga Kesehatan di D.I. Yogyakarta Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013 46
Tabel 3.12	Rasio Guru, Murid, dan Ruang Kelas Menurut Jenjang Pendidikan dan Kabupaten/Kota, Tahun Ajaran 2013/2014 51
Tabel 3.13	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2013 53
Tabel 3.14	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2013 55
Tabel 3.15	Garis Kemiskinan Menurut Tipe Daerah, Maret 2013-Maret 2014 56
Tabel 3.16	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Tipe Daerah Maret 2013-Maret 2014 58
Tabel 3.17	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di DIY Menurut Daerah Maret 2013-Maret 2014 61
Tabel 4.1	Posisi IPM Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Wilayah Lain Tahun 2013 dan Reduksi <i>Shortfall</i> 2012-2013 76
Tabel 4.2	Reduksi <i>Shortfall</i> IPM Kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2008-2013 78

	Hal
Tabel 5.1	IPM Kecamatan dengan Urutan 10 Terbesar dan Terkecil di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010-2013 82
Tabel 5.2	Reduksi <i>Shortfall</i> IPM Kecamatan dengan Urutan 10 Terbesar dan Terkecil di Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2010-2013 85
Tabel 5.3	Angka Harapan Hidup dengan Urutan 10 Terbesar dan Terkecil di Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2010-2013 89
Tabel 5.4	Angka Melek Huruf dengan Urutan 10 Terbesar dan Terkecil di Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2010-2013 92
Tabel 5.5	Rata-rata Lama Sekolah dengan Urutan 10 Terbesar dan Terkecil di Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2010-2013 94
Tabel 5.6	Indeks Pendidikan dengan Urutan 10 Terbesar dan Terkecil di Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2010-2013 96
Tabel 5.7	<i>Purchasing Power Parity</i> (PPP) dengan Urutan 10 Terbesar dan Terkecil di Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2010-2013 98

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 3.1 Peta Administrasi Daerah Istimewa Yogyakarta	22
Gambar 3.2 Nilai PDRB menurut Kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta Atas Dasar Harga Berlaku, 2009-2013 (triliun rupiah)	33
Gambar 3.3 Laju Pertumbuhan PDRB Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta Tahun 2013	36
Gambar 3.4 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta, 2012-2013.....	41
Gambar 3.5 Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta, Tahun Ajaran 2013/2014.	48
Gambar 3.6 Jumlah Guru Menurut Jenjang Pendidikan dan Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta, Tahun Ajaran 2013/2014.	50
Gambar 3.7 Jumlah Penduduk Miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta Maret 2009-Maret 2014 (dalam Ribu Orang)	57
Gambar 3.8 Persentase Penduduk Miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta Maret 2009-Maret 2014	59
Gambar 4.1 Perkembangan IPM Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004–2013	64
Gambar 4.2 Perkembangan Reduksi <i>Shortfall</i> IPM Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 – 2013	66
Gambar 4.3 Perkembangan Angka Harapan Hidup Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2004 –2013.....	69
Gambar 4.4 Perkembangan Angka Melek Huruf Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004– 2013	71
Gambar 4.5 Perkembangan Angka Rata – Rata Lama Sekolah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004–2013.....	73
Gambar 4.6 Perkembangan Daya Beli Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004 – 2013.....	74
Gambar 4.7 Perkembangan IPM Menurut Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta 2008-2013	78
Gambar 5.1 Variasi IPM Menurut Kecamatan Se Daerah Istimewa Yogyakarta 2010-2013	81
Gambar 5.2 Kwadran IPM dan Reduksi <i>Shortfall</i> Antar Kecamatan.....	87

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kecamatan dan Indikator Penyusun di Daerah Istimewa Yogyakarta	114
Lampiran II.	Reduksi shortfall IPM Menurut Kecamatan Di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010-2013	119
Lampiran III.	Kwadran IPM dan Estimasi Persentase Penduduk Miskin PPLS 2011 Menurut Kecamatan di DIY	122
Lampiran IV.	Peta Tematik IPM dan Tingkat Kemiskinan Menurut Kecamatan di DIY	123
Lampiran V.	Peta Tematik IPM dan Unsur-Unsur Penyusun IPM Kecamatan Di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010-2013	124

1.1. Latar Belakang

Millenium Development Goals (disingkat MDGs) merupakan paradigma pembangunan global yang disepakati secara internasional oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Millenium PBB bulan September 2000. Majelis Umum PBB kemudian melegalkannya ke dalam Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 55/2 tanggal 18 September 2000 Tentang Deklarasi Milenium Perserikatan Bangsa-Bangsa (A/RES/55/2. *United Nations Millennium Declaration*). Deklarasi ini menghimpun komitmen para pemimpin dunia, untuk menangani isu perdamaian, keamanan, pembangunan, hak asasi, dan kebebasan fundamental dalam suatu paket. MDGs menempatkan pembangunan manusia sebagai fokus utama pembangunan serta memiliki tenggang waktu dan kemajuan yang terukur.

Kalimat yang tercantum pada *Human Development Report* (HDR) yang dipublikasikan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) tahun 1990 juga secara jelas memberikan pesan bahwa pembangunan seharusnya berpusat pada manusia, dengan menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan dan bukan sebagai alat bagi pembangunan. Sebagaimana dinyatakan di dalam HDR 1990, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki manusia. Di antara berbagai pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk ber-ilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak.

Konsep pembangunan manusia mempunyai cakupan yang lebih luas dari teori konvensional pembangunan ekonomi. Dalam perspektif pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi bukanlah tujuan akhir. Pertumbuhan ekonomi adalah alat untuk mencapai tujuan akhir, yaitu memperluas pilihan-pilihan bagi manusia. Agar konsep pembangunan manusia dapat mudah diterjemahkan ke dalam pembuatan kebijakan, pembangunan manusia harus dapat diukur dan dipantau dengan mudah. Selama bertahun-tahun, *Human Development Report* telah mengembangkan dan menyempurnakan pengukuran statistik dari pembangunan manusia. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai kesulitan dalam penyederhanaan konsep holistik pembangunan manusia menjadi satu angka. Oleh karenanya, penting untuk disadari bahwa konsep pembangunan manusia lebih mendalam dan lebih kaya dari ukurannya. Sangatlah tidak mungkin untuk menghasilkan ukuran yang komprehensif karena banyak dimensi penting dari pembangunan manusia yang tidak terukur. Indeks Pembangunan Manusia menyajikan ukuran kemajuan pembangunan yang lebih memadai dan lebih menyeluruh dari pada ukuran tunggal pertumbuhan PDRB per kapita.

"Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini tampaknya merupakan suatu kenyataan sederhana. Tetapi hal ini sering kali terlupakan oleh berbagai kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan harta dan uang."

Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia tersebut menurut UNDP perlu diperhatikan beberapa hal pokok, yakni produktivitas, pemerataan, kesinambungan, pemberdayaan. Secara ringkas empat hal pokok tersebut mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut :

a. Produktivitas

Penduduk harus dimampukan untuk meningkatkan produktivitas dan berpartisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan dan nafkah. Pembangunan ekonomi, dengan demikian merupakan himpunan bagian dari model pembangunan manusia.

b. Pemerataan

Penduduk harus memiliki kesempatan/peluang yang sama untuk mendapatkan akses terhadap semua sumberdaya ekonomi dan social. Semua hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus dihapus, sehingga mereka dapat mengambil manfaat dari kesempatan yang ada dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup.

c. Kestinambungan

Akses terhadap sumberdaya ekonomi dan sosial harus dipastikan tidak hanya untuk generasi- generasi yang akan datang. Semua sumberdaya fisik, manusia, dan lingkungan selalu diperbaharui.

d. Pemberdayaan

Penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan (bentuk/arrah) kehidupan mereka, serta untuk berpartisipasi dan mengambil manfaat dari proses pembangunan.

Terkait dengan perencanaan pembangunan, ketersediaan data mengenai kondisi sumber daya manusia sangat dibutuhkan. Selain dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan yang telah dilaksanakan, data tersebut juga akan

bermanfaat dalam memberikan informasi sebagai bahan masukan bagi perencanaan pembangunan di masa yang akan datang. Perencanaan pembangunan yang baik perlu didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, perencanaan yang sistematis dan komprehensif hanya dapat diwujudkan apabila setiap tahapan perencanaan dilengkapi dengan data yang akurat. Untuk itu dibutuhkan ketersediaan data mengenai pembangunan manusia yang representatif dalam menggambarkan kondisi sosial ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya terkait dengan masalah pembangunan manusia pada cakupan wilayah yang lebih kecil, misalnya tingkat kecamatan. Oleh karena itu penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tingkat kecamatan dipandang perlu sebagai sumber informasi penyusunan perencanaan yang terkait dengan pembangunan manusia. Dengan adanya penyusunan IPM tiap kecamatan dapat diperoleh data lebih detil untuk mengakses disparitas tiap kecamatan sehingga pemerintah maupun masyarakat luas dapat melakukan monitoring dan evaluasi atas pembangunan yang telah dilakukan, sekaligus dapat mengidentifikasi kebutuhan daerah untuk perencanaan dan pemerataan pembangunan di masa yang akan datang.

Angka Indeks Pembangunan Manusia selama ini oleh pemerintah digunakan sebagai alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) suatu daerah di samping indikator-indikator lainnya seperti luas wilayah, jumlah penduduk, indeks kemahalan konstruksi, dan PDRB. Pada kenyataannya data IPM dari Badan Pusat Statistik (BPS) hanya tersedia sampai tingkat Kabupaten/kota, yang dihasilkan dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Sementara untuk estimasi sampai tingkat kecamatan tidak dapat disediakan dikarenakan keterbatasan jumlah sampel. Hal ini akan dapat

dipenuhi apabila ada dukungan dari pemerintah daerah sehingga sangat tergantung dari kebijakan daerah itu sendiri. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2014 menyediakan dukungan untuk penyusunan IPM dengan cakupan sampai tingkat kecamatan. Pembangunan manusia sampai pada tingkat kecamatan juga perlu dilakukan evaluasi mengingat pembangunan manusia pada tingkat kecamatan sangat bervariasi.

1.2. Maksud dan Tujuan

Secara umum maksud penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tingkat kecamatan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilengkapi dengan indikator-indikator penyusun IPM antara lain:

- a. Menyediakan informasi yang lengkap dan menyeluruh mengenai pembangunan manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilengkapi dengan indikator-indikator relevan.
- b. Sebagai dasar perencanaan pada tingkat makro, terutama terkait dengan masalah pendidikan dan kesehatan masyarakat.
- c. Sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai kebijakan terutama terkait dengan kebijakan alokasi bagi pelayanan publik untuk bidang pendidikan dan kesehatan.

Tujuan penyusunan Indeks Pembangunan Manusia pada tingkat kecamatan di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah mendapatkan informasi nilai IPM dan indikator penyusunnya pada tingkat kecamatan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2013.

1.3. Sistematika Penulisan

Bab 1 merupakan bab Pendahuluan yang memuat latar belakang serta maksud dan tujuan disusunnya tulisan ini.

Bab 2 merupakan bab Metodologi memuat konsep-konsep yang dianggap penting dan metode penyusunannya. Diharapkan pembaca dapat memahami apa yang dimaksud dengan Indeks Pembangunan Manusia dan komponen-komponen yang mendukung penyusunan Indeks Pembangunan Manusia.

Bab 3 merupakan Gambaran Umum Keadaan Wilayah dan Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta, diharapkan pembaca dapat memiliki gambaran obyektif tentang situasi dan kondisi wilayah dan penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bab 4 Indeks Pembangunan Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, berisi ulasan perkembangan dan unsur penyusun IPM Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bab 5 berisi Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia antar kecamatan di Daerah Istimewa Yogyakarta, berisi ulasan IPM antar kecamatan. Selain itu juga digambarkan indikator penyusun IPM dari aspek kesehatan, pendidikan, dan daya beli.

Bab 6 Penutup.

2.1. Pengertian

Pembangunan manusia lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi, akan tetapi tidak anti pertumbuhan. Dalam perspektif pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi bukanlah tujuan akhir. Pertumbuhan ekonomi adalah alat untuk mencapai tujuan akhir, yaitu memperluas pilihan-pilihan bagi manusia. Perhatian tidak hanya pada besar pertumbuhan tetapi juga penciptaan dan memperkuat kaitan struktur dan kualitas dari pertumbuhan, untuk menjamin bahwa pertumbuhan diarahkan untuk mendukung perbaikan kesejahteraan manusia antara generasi sekarang dengan yang selanjutnya.

Produk Domestik Bruto (PDB/GDP) pada tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat wilayah (provinsi/kabupaten/kota) selama ini lebih dikenal sebagai tolok ukur pembangunan. Konsep pengukuran dengan PDB dan PDRB mempunyai keterbatasan yaitu terbatas dari sisi ekonomi dan kurang memperhatikan aspek pemerataan (Daliyo, *et al.*, 1994). Pertumbuhan ekonomi bisa tinggi dalam masyarakat tetapi bisa saja sebagian besar penduduknya belum berkecukupan. Sebagian kecil masyarakat mempunyai lebih banyak akses untuk menikmati pertumbuhan ekonomi daripada sebagian besar masyarakat lainnya.

Pendekatan pembangunan manusia menggabungkan aspek produksi dan distribusi komoditas, serta peningkatan dan pemanfaatan kemampuan manusia. Pembangunan manusia melihat secara bersamaan semua isu dalam masyarakat yaitu

pertumbuhan ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, kebebasan politik atau nilai-nilai kultural dari sudut pandang manusia. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan sektor sosial tetapi merupakan pendekatan yang komprehensif dari semua sektor.

Pembangunan manusia memiliki empat elemen, yaitu produktifitas, pemerataan, keberlanjutan, dan pemberdayaan. Dengan peningkatan kemampuan, kreatifitas dan produktifitas akan meningkat sehingga mereka akan menjadi agen pertumbuhan yang efektif. Pertumbuhan ekonomi harus dikombinasikan dengan pemerataan hasil-hasilnya. Pemerataan kesempatan harus tersedia baik untuk generasi saat ini maupun generasi penerus. Pada saat yang sama pembangunan dapat dilihat juga sebagai pembangunan (*formation*) kemampuan manusia melalui perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan, dan ketrampilan; sekaligus sebagai pemanfaatan (*utilization*) kemampuan/ketrampilan mereka tersebut.

Konsep pembangunan manusia jauh lebih luas pengertiannya dibandingkan konsep pembangunan ekonomi yang menekankan pada pertumbuhan (*economic growth*), kebutuhan dasar (*basic needs*), kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), atau pengembangan sumber daya manusia (*human resource development*). Oleh karena konsep pembangunan manusia UNDP mengandung empat unsur yaitu produktivitas (*productivity*), pemerataan (*equity*), kesinambungan (*sustainability*), dan pemberdayaan (*empowerment*).

Pembangunan manusia dapat juga dilihat dari sisi pelaku atau sasaran yang ingin dicapai. Dalam kaitan ini UNDP melihat pembangunan manusia sebagai semacam model pembangunan tentang penduduk, untuk penduduk, dan oleh penduduk, yaitu:

- a. tentang penduduk: berupa investasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial lainnya;
- b. untuk penduduk: berupa penciptaan peluang kerja melalui perluasan (pertumbuhan) ekonomi dalam negeri;
- c. oleh penduduk; berupa upaya pemberdayaan (*empowerment*) penduduk dalam menentukan harkat manusia dengan cara berpartisipasi dalam proses politik dan pembangunan.

Selain pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia sangatlah penting dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan. Hal ini karena pendidikan dan kesehatan yang baik memungkinkan penduduk miskin untuk meningkatkan nilai asetnya mengingat aset terpenting mereka adalah tenaga mereka (Lanjouw, Pradhan, Saadah, Sayed, dan Sparrow, 2001). Sehubungan dengan itulah maka investasi pada pendidikan dan kesehatan sangat penting artinya bagi pengurangan kemiskinan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan empat komponen yakni angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan; angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mengukur capaian pembangunan di bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

2.2. Indeks Pembangunan Manusia

Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui tiga dimensi dasar. Tiga dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian yang sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup pada waktu lahir. Sedangkan untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (*Purchasing Power Parity*).

2.2.1. Angka Harapan Hidup

Lamanya hidup diukur dengan indikator angka harapan hidup pada saat lahir (*life expectancy at birth* atau e^0). Dengan kata lain angka harapan hidup adalah rata-rata perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Perhitungan angka harapan hidup dilakukan secara tidak langsung (*indirect estimation*) berdasarkan dua data dasar yaitu rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak yang masih hidup menurut kelompok umur wanita pernah kawin dari hasil Sensus Penduduk 2010. Dengan menggunakan paket program *Mortpack Lite* berdasarkan input data rata-rata anak lahir hidup dan anak masih hidup per wanita pada kelompok umur tertentu, dengan asumsi tabel kematian model *West* yang dianggap sesuai dengan histori kependudukan dan kondisi Indonesia termasuk dalam hal ini di Daerah Istimewa Yogyakarta. Besaran nilai minimum dan maksimum angka harapan hidup yang disepakati oleh semua pihak di berbagai belahan dunia dan juga di Indonesia (agar

dapat dibandingkan satu dengan yang lain) adalah 25 tahun dan tertinggi 85 tahun sesuai standar UNDP.

Walaupun demikian tidak serta merta hasil estimasi tersebut digunakan. Untuk mendukung perolehan hasil yang lebih bisa dipertanggungjawabkan maka digabung dengan beberapa informasi lain yang berkaitan langsung dengan tingkat kesehatan. Indikator yang digunakan sebagai pembobot yaitu angka kesakitan penduduk, angka kunjungan ke puskesmas, dan jumlah sarana fasilitas kesehatan per 10 ribu penduduk. Oleh karena itu hasil *proxy* yang diperoleh sebenarnya lebih sesuai disebut indeks *longevity*. Data tersebut telah dikumpulkan oleh BPS dengan sensus atau survei BPS lain atau survei/pendataan yang dilakukan khusus untuk penyusunan IPM kecamatan ini.

2.2.2. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan diukur dari dua indikator, yaitu: angka melek huruf (Lit) dan rata-rata lama sekolah (MYS). Angka melek huruf adalah persentase dari penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis dalam huruf latin. Rata-rata lama sekolah, yaitu rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas di seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani atau sedang dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki. Selanjutnya dua indikator tersebut diberi bobot masing-masing yakni rata-rata lama sekolah diberi bobot sepertiga dan angka melek huruf diberi bobot duapertiga.

Untuk menghitung indeks pendidikan, dua batasan dipakai sesuai kesepakatan UNDP yakni batas maksimum angka melek huruf adalah 100 sedangkan minimum 0

(nol). Angka melek huruf 100 menggambarkan kondisi seratus persen atau semua penduduk mampu membaca dan menulis dan nilai nol mencerminkan kondisi sebaliknya yakni tidak ada satu pun penduduk mampu membaca dan menulis. Sedangkan batas maksimum untuk rata-rata lama sekolah adalah 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun. Batas maksimum tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata lulusan di wilayah tersebut adalah 15 tahun atau setara lulusan SLTA sedangkan batas minimal 0 tahun mengindikasikan tidak ada satu pun yang sekolah di wilayah tersebut sehingga tidak ada satu pun yang lulus atau menempuh jenjang pendidikan.

2.2.3. Standar Hidup Layak

Dengan dimasukkannya variabel PPP sebagai ukuran kemampuan daya beli, IPM secara konseptual jelas lebih 'lengkap' dalam merefleksikan taraf pembangunan manusia daripada IMH atau PQLI. Oleh karena IMH yang tinggi hanya merefleksikan kondisi suatu masyarakat yang memiliki peluang hidup panjang (dan sehat) serta tingkat pendidikan (dan ketrampilan) yang memadai. Menurut UNDP kondisi tersebut belum memberikan gambaran yang ideal karena belum memasukkan aspek peluang kerja/berusaha yang memadai sehingga memperoleh sejumlah uang yang memiliki daya beli (*purchasing power*).

Untuk mengukur standar hidup secara ekonomi, dalam perhitungan IPM ini digunakan data konsumsi per kapita riil yang telah disesuaikan untuk mengukur kemampuan daya beli penduduk. Hal ini dikarenakan lebih mudah untuk mendapatkan data pengeluaran daripada data pendapatan. Selain itu juga digunakan informasi harga beberapa komoditi pilihan penyusun daya beli pada salah satu pasar di tiap kecamatan.

2.3. Penyusunan Indeks

Penyusunan tiga komponen penyusun IPM secara rinci dapat dilihat pada bahasan berikut:

a. Indeks angka harapan hidup

Setelah mendapatkan angka harapan hidup waktu lahir selanjutnya dihitung indeks angka harapan hidup yaitu dengan membandingkan angka yang diperoleh dengan angka yang sudah distandarkan (dalam hal ini BPS dan UNDP telah menetapkan nilai minimum dan maksimumnya). Rumus umum untuk mendapatkan indeks angka harapan hidup :

$$\text{Indeks AHH} = \frac{\text{AHH} - \text{AHHmin}}{\text{AHHmaks} - \text{AHHmin}}$$

b. Indeks pendidikan

Angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah diharapkan dapat mencerminkan tingkat pengetahuan dan ketrampilan penduduk. Yang dimaksud dengan angka melek huruf (AMH) adalah persentase penduduk 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis, dapat dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$\text{AMH} = \frac{\text{Jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis}}{\text{Jumlah penduduk 15 tahun ke atas}} \times 100$$

Indeks AMH didapatkan dengan rumus :

$$\text{Indeks AMH} = \frac{\text{AMH} - \text{AMHmin}}{\text{AMHmaks} - \text{AMHmin}}$$

Angka rata-rata lama sekolah didapatkan dengan mengolah sekaligus dua variabel yaitu tingkat/kelas yang pernah/sedang diduduki dan jenjang pendidikan yang

ditamatkan. Perhitungan rata-rata lama sekolah dilakukan secara bertahap. Tahap pertama menghitung lama sekolah masing-masing individu dengan menggunakan pola hubungan antar variabel. Tahap selanjutnya menghitung rata-rata lama sekolah dengan rumus sebagai berikut:

$$RLS = \frac{\sum f_i \times j_i}{\sum f_i}$$

dengan :

RLS = rata-rata lama sekolah

f_i = frekuensi penduduk 15 tahun ke atas pada jenjang pendidikan ke-i

j_i = lama sekolah untuk masing-masing jenjang pendidikan yang diamatkan atau yang pernah diduduki

i = jenjang pendidikan

Indeks RLS diperoleh dengan rumus :

$$\text{Indeks RLS} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\max} - RLS_{\min}}$$

Untuk memperoleh indeks pendidikan, indeks angka melek huruf dan indeks angka rata-rata lama sekolah digabungkan menjadi satu dengan perbandingan 2:1 menjadi

$$\text{Indeks pendidikan} = 2/3 (\text{indeks AMH}) + 1/3 (\text{indeks RLS})$$

c. Indeks Daya Beli (PPP).

Untuk keperluan perhitungan konsumsi per kapita riil atau tingkat daya beli penduduk digunakan 6 tahapan berikut :

1. Menghitung pengeluaran konsumsi per kapita (A).
2. Mendapatkan pola konsumsi Susenas untuk mendapatkan pola IHK yang sesuai (B).
3. Melakukan deflasi nilai A dengan IHK yang sesuai (C).

4. Menghitung standar daya beli penduduk. Data dasar yang digunakan berupa harga dan kuantum dari suatu paket komoditi yang terdiri dari 27 komoditi yang diperoleh dari Susenas. Ke-27 komoditi tersebut berupa beras, tepung terigu, singkong, ikan tuna/cakalang, ikan teri, daging sapi, daging ayam, telur, susu kental manis, bayam, kacang panjang, kacang tanah, tempe, jeruk, pepaya, kelapa, gula, kopi, garam, merica, mie instan, rokok kretek, listrik, air minum, bensin, minyak tanah, sewa rumah.

Perhitungan PPP/unit dilakukan dengan rumus:

$$\text{PPP/unit} = \frac{\sum E_{ij}}{\sum (p_{9j}, q_{ij})}$$

Keterangan:

E_{ij} = total pengeluaran untuk komoditi ke j untuk kabupaten/kota ke i

p_{9j} = harga komoditi di Jakarta Selatan

q_{ij} = kuantum komoditi (unit) yang dikonsumsi kabupaten/kota ke i.

Jakarta Selatan dijadikan patokan/standar, supaya IPM khususnya PPP kabupaten/kota dapat diperbandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Indonesia.

5. Membagi nilai C dengan PPP/unit (D)
6. Menyesuaikan nilai D dengan formula Atkinson sebagai upaya untuk memperkirakan nilai marginal dari D (E). Rumus Atkinson yang digunakan untuk penyesuaian rata-rata konsumsi riil secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} D_i &= D_i, & \text{jika } D_i \leq Z \\ &= Z + 2 (D_i - Z)^{(1/2)}, & \text{jika } Z < D_i \leq 2 Z \\ &= Z + 2 (D_i - Z)^{(1/2)} + 3 (D_i - 2Z)^{(1/3)}, & \text{jika } Z < D_i \leq 3 Z \\ &= Z + 2 (D_i - Z)^{(1/2)} + 3 (D_i - 2Z)^{(1/3)} + 4 (D_i - 3Z)^{(1/4)}, & \text{jika } Z < D_i \leq 4 Z \end{aligned}$$

Keterangan :

D_i = konsumsi perkapita riil yang telah disesuaikan dengan PPP/unit (hasil D)

Z = tingkat pendapatan tertentu yang digunakan sebagai batas kecukupan
(biasanya menggunakan garis kemiskinan)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit dari beberapa indeks komponennya. Komponen IPM yaitu : 1) angka harapan hidup pada waktu lahir (e^0), 2) angka melek huruf (Lit) dan rata-rata lama sekolah (RLS/MYS) yang digabung menjadi indeks pendidikan, dan 3) kemampuan daya beli (*purchasing power parity*/PPP) yang telah disesuaikan.

Untuk memperoleh angka IPM dilakukan dua tahapan berikut:

- a. Melakukan perhitungan indeks masing-masing komponen pembentuk IPM, yaitu indeks angka harapan hidup waktu lahir, indeks pendidikan, dan indeks daya beli. Perhitungan akan menghasilkan angka dengan kisaran $0 < \text{indeks } X_i < 1$. Untuk mempermudah membaca indeks tersebut, maka persamaan itu dikalikan seratus, sehingga didapatkan $0 < \text{indeks } X_i' < 100$.
- b. Melakukan perhitungan nilai IPM dengan cara merata-ratakan nilai masing-masing indeks komponen penyusun IPM. Rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$IPM = 1/3 \times (\text{indeks } X_1 + \text{indeks } X_2 + \text{indeks } X_3)$$

Keterangan :

Indeks X_1 = indeks angka harapan hidup waktu lahir

Indeks X_2 = indeks pendidikan

Indeks X_2 diperoleh dari perhitungan :

$$(2/3 \times (\text{indeks melek huruf})) + (1/3 \times (\text{indeks rata-rata lama sekolah}))$$

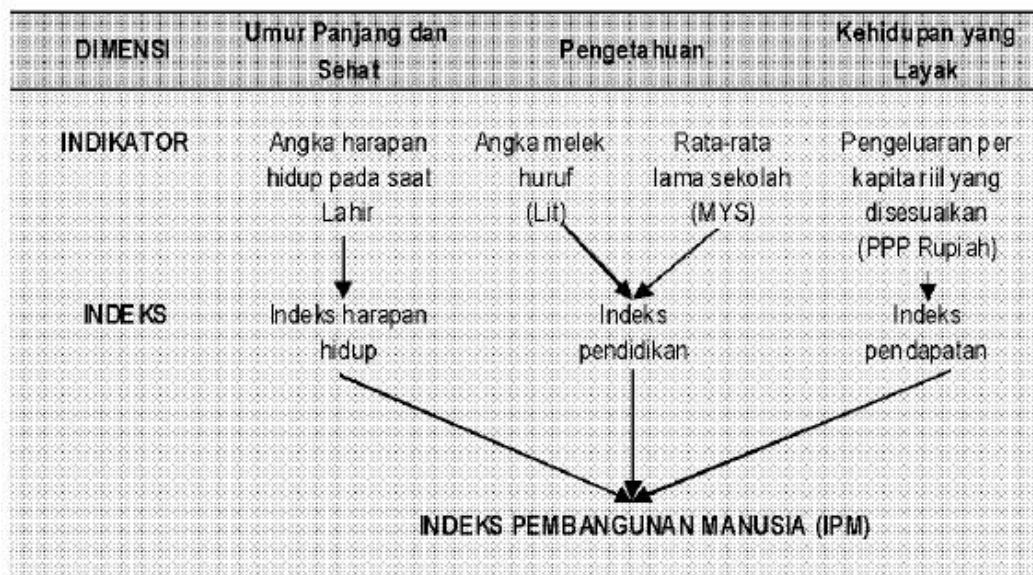
Indeks X_3 = indeks konsumsi perkapita yang disesuaikan.

Tabel 2.1. Nilai Maksimum dan Minimum dari Setiap Nilai IPM

Komponen IPM	Maksimum	Minimum	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Angka Harapan Hidup	85	25	Standar UNDP
2. Angka Melek Huruf	100	0	Standar UNDP
3. Rata-Rata Lama Sekolah	15	0	
4. Daya Beli	732,720 ^{a)}	300,000 (1996)	UNDP menggunakan PDB Riel disesuaikan
		360,000 ^{b)} (1999, 2002)	

Untuk menghitung indeks komponen IPM digunakan batas maksimum dan minimum seperti pada tabel 2.1. Secara diagram penyusunan IPM dapat digambarkan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Diagram Penghitungan IPM



No	Nilai IPM	Kategori
1	<50	Rendah
2	≤50 - <66	Menengah Bawah
3	≤66 - <80	Menengah Atas
4	≥ 80	Atas

Standar kategori IPM juga dapat dilihat pada tabel 2.2. Nilai IPM 80 atau lebih masuk pada kategori atas, sedangkan nilai IPM antara 50 sampai dengan 80 masuk pada kategori menengah. Sementara nilai IPM di bawah 50 masuk kategori rendah.

2.4. Reduksi *Shortfall*

Perbedaan perubahan kecepatan IPM dalam suatu periode untuk suatu wilayah dapat dilihat dari angka reduksi *shortfall*. Angka tersebut mengukur rasio pencapaian kesenjangan antara jarak yang 'sudah ditempuh' dengan yang 'harus ditempuh' untuk mencapai kondisi yang ideal (IPM=100). Semakin tinggi angka reduksi *shortfall*, semakin cepat kenaikan IPM. Cara perhitungan reduksi *shortfall* dinyatakan dengan rumus.

Secara formula reduksi *shortfall* (rs) per tahun dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$rs = \frac{IPM_t - IPM_o}{IPM_{ref} - IPM_o}$$

dimana

IPM_t : IPM tahun t

IPM_o : IPM tahun dasar

IPM_{ref} : IPM acuan atau ideal yang dalam hal ini sama dengan 100.

2.5. Ruang Lingkup

Dengan harapan agar semua karakteristik populasi dapat terwakili maka pada kegiatan ini dilakukan survei tambahan pendukung untuk penyusunan IPM ini. Diambil sebanyak 468 blok sensus atau sekitar 4 persen blok sensus dari jumlah blok sensus yang terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian diproporsikan pada semua kecamatan (78 kecamatan) yang ada. Di samping itu juga dikumpulkan informasi

kunjungan ke Puskesmas dan informasi harga di masing-masing kecamatan sebagai data pendukung penyusunan IPM di tingkat kecamatan. Dengan demikian lokasi penelitian untuk mendapatkan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ini dilakukan terhadap seluruh kecamatan yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sumber data lain yang digunakan berasal dari hasil Sensus Penduduk 2010, Podes 2011, dan gabungan data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) 2010-2013.

Kerangka sampel untuk pengumpulan data rumah tangga yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 jenis, yaitu: kerangka sampel untuk pemilihan blok sensus, dan kerangka sampel untuk pemilihan rumah tangga dalam blok sensus terpilih. Rancangan sampel pada penelitian ini adalah rancangan sampel bertahap dua.

- **Tahap pertama**, dari *master sampling frame* blok sensus, dipilih sebanyak blok sensus secara sistematis proporsional sesuai jumlahnya pada tiap kecamatan. Pendaftaran rumah tangga atau **listing** hasil Sensus Penduduk 2010 perlu dilakukan updating pada setiap blok sensus terpilih.
- **Tahap dua**, memilih rumah tangga sebanyak alokasi yang telah ditentukan pada setiap blok sensus. Jumlah rumah tangga yang terpilih pada penelitian ini sebanyak 6.552 rumah tangga.

Untuk sampel obyek fasilitas kesehatan dan harga pasar dilakukan dengan cara terlebih dahulu mendaftar nama dan alamat dari puskesmas/puskesmas pembantu dan pasar tradisional pada masing-masing kecamatan. Langkah berikutnya mengunjungi puskesmas/puskesmas pembantu dan pasar tradisional terpilih untuk mendapatkan informasi pengunjung dan harga beberapa komoditi yang telah ditentukan.

2.6. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data dari rumah tangga, puskesmas/puskesmas pembantu, dan pasar terpilih dilakukan dengan wawancara langsung antara pencacah dengan responden. Pertanyaan-pertanyaan individu dalam kuesioner diusahakan bersumber dari individu yang bersangkutan, sedangkan keterangan tentang rumah tangga dapat dilakukan melalui wawancara dengan kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga lain yang mengetahui karakteristik yang ditanyakan.

Setelah data dikumpulkan melalui wawancara dan dilakukan pemeriksaan secara manual terhadap kelengkapan, konsistensi isian, kualitas dan mutu data, kemudian dilakukan pengolahan atau entri data dengan menggunakan fasilitas komputer. Program pengolahan entri data yang digunakan adalah program aplikasi yang dibuat dengan *software Microsoft Visual Basic 6.0*. Data-data yang telah dientri, kemudian dilakukan validasi data (*raw-validation*). Hal ini berguna untuk mengurangi kesalahan entri, kesalahan data (*data error*), konsistensi isian dan cakupan data, sehingga data-data yang dihasilkan sangat kredibel, serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menghitung angka harapan hidup, menggunakan program/aplikasi *software Mortpak Lite 4.0*. Sementara untuk menggabung dengan indikator kesehatan lain yaitu angka kesakitan, rasio fasilitas kesehatan, dan angka kunjungan ke Puskesmas digunakan dengan bantuan Microsoft Excell 2010. Untuk angka-angka yang akan digunakan dalam penghitungan Angka Melek Huruf (Lit), Rata-rata Lama Sekolah, Paritas Daya Beli dan data pendukung lainnya menggunakan program/aplikasi *software SPSS versi 19*.

3.1. Keadaan Geografis

Daerah Istimewa (D.I.) Yogyakarta merupakan salah satu dari 34 provinsi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara geografis, Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di tengah Pulau Jawa bagian selatan. Bentuk wilayahnya menyerupai bangun segitiga dengan puncak Gunung Merapi di bagian utara dengan ketinggian sekitar 2.911 meter di atas permukaan air laut, sedangkan pada bagian kaki, dua buah dataran membentang ke arah selatan membentuk dataran pantai yang memanjang di tepian Samudra Indonesia.

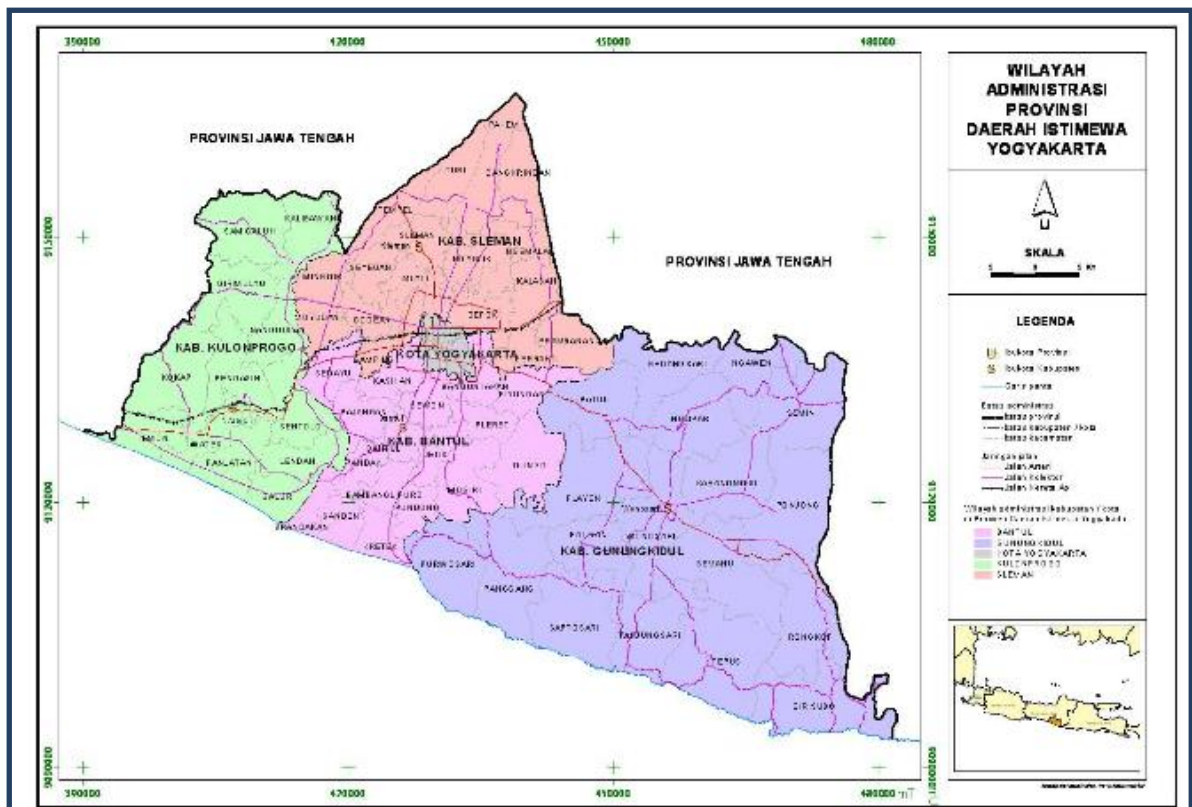
Secara astronomis Daerah Istimewa Yogyakarta terletak antara $7^{\circ}.33'$ - $8^{\circ}.12'$ Lintang Selatan dan $100^{\circ}.00'$ – $110^{\circ}.50'$ Bujur Timur. Adapun batas-batas wilayahnya sebagai berikut :

- Sebelah Barat Laut berbatasan dengan Kabupaten Magelang
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Purworejo
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia
- Sebelah Tenggara berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri
- Sebelah Timur Laut berbatasan dengan Kabupaten Klaten.

Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat memiliki luas $3.185,80 \text{ km}^2$ atau 0,17 persen dari luas Indonesia ($1.860.359,67 \text{ km}^2$). Merupakan provinsi terkecil setelah DKI Jakarta, yang meliputi:

- Kabupaten Kulonprogo, dengan luas 586,27 km² (18,40 persen), terdiri dari 12 kecamatan dan 88 desa/kelurahan.
- Kabupaten Bantul, dengan luas 506,85 km² (15,91 persen), terdiri dari 17 kecamatan dan 75 desa.
- Kabupaten Gunungkidul dengan luas 1.485,36 km² (46,63 persen), terdiri dari 18 kecamatan dan 144 desa.
- Kabupaten Sleman, dengan luas 574,82 km² (18,04 persen), terdiri dari 17 kecamatan dan 86 desa.
- Kota Yogyakarta, dengan luas 32,50 km² (1,02 persen), terdiri dari 14 kecamatan dan 45 kelurahan.

Gambar 3.1 Peta Administrasi Daerah istimewa Yogyakarta, 2013.



Berdasarkan informasi dari Badan Pertanahan Nasional, dari 3.185,80 km² luas wilayah D.I. Yogyakarta, 33,05 persen merupakan jenis tanah Lithosol, 27,09 persen Regosol, 12,38 persen Lathosol, 10,97 persen Grumusol, 10,84 persen Mediteran, 3,19 persen Alluvial, dan 2,48 persen tanah jenis Rensina. Sebagian besar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta terletak pada ketinggian antara 100 – 499 meter dari permukaan laut (tercatat sebesar 65,65 persen). Pada wilayah lainnya dengan ketinggian kurang dari 100 meter sebesar 28,84 persen, pada ketinggian antara 500 – 999 meter sebesar 5,04 persen, dan pada ketinggian di atas 1000 meter sebesar 0,47 persen.

Daerah Istimewa Yogyakarta beriklim tropis yang dipengaruhi oleh musim kemarau dan musim hujan. Menurut catatan Stasiun Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Geofisika Kelas I Yogyakarta, suhu udara rata-rata di Yogyakarta tahun 2013 menunjukkan suhu minimum 18,4⁰ C dan suhu maksimum 34,2⁰ C. Curah hujan berkisar antara 2 mm – 493 mm dengan hari hujan per bulan antara 0 kali – 29 kali. Sedangkan kelembaban udara tercatat antara 44,0 persen – 98,0 persen. Tekanan udara antara 1.009,9 mb - 1.019,4 mb, dengan arah angin ke arah barat yang terbanyak dan kecepatan angin antara 2,0 m/s sampai dengan 9,0 m/s.

Bila ditinjau dari penggunaan lahan di D.I. Yogyakarta pada tahun 2013, menunjukkan bahwa 239.621 ha (75,07%) digunakan untuk lahan pertanian dan sisanya 79.420 ha (24,93%) digunakan sebagai lahan bukan pertanian. Lahan pertanian dibedakan menjadi lahan sawah dan lahan bukan sawah, sedangkan yang

termasuk lahan bukan pertanian adalah lahan yang digunakan untuk jalan, pemukiman, perkantoran dan sebagainya.

Tabel 3.1. Luas Penggunaan Lahan Pertanian dan Bukan Pertanian di D.I. Yogyakarta, 2011– 2013 (hektar)

Penggunaan Lahan	2011	2012	2013	
	%		Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Lahan Pertanian	76,22	75,35	239.160	75,07
A.1. Lahan Sawah	17,73	17,69	56.539	17,74
1. Berpengairan	14,85	14,76	47.133	14,79
2. Tadah Hujan	2,88	2,93	9.406	2,95
3. Lainnya	-	-	-	-
A.2. Bukan Sawah	58,48	57,66	182.621	57,32
1. Tegal/Kebun/	29,77	29,69	97.320	30,55
2. Ladang/Huma	-	-	-	-
3. Perkebunan/	-	-	-	-
4. Ditanami pohon/Hutan Rakyat	-	-	-	-
5. Padang penggembalaan/ padang rumput	-	-	-	-
6. Lahan Sementara Tidak Diusahakan	0,32	0,25	946	0,30
7. Lainnya (Tambak, Kolam, Empang, hutan negara dll)	29,77	27,72	84.355	26,48
B. Lahan Bukan Pertanian (jalan, pemukiman, perkantoran, dll)	23,78	24,65	79.420	24,93
Jumlah	100,00	100,00	318.580	100,00

Sumber: Daftar SP-Lahan, Dinas Pertanian Kab./Kota, D.I. Yogyakarta

Penggunaan lahan pertanian selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 terus mengalami penurunan, dari 76,22 persen pada tahun 2011 turun menjadi 75,07 pada tahun 2013. Di sisi lain penggunaan lahan bukan pertanian memperlihatkan tren yang meningkat setiap tahun. Pada tabel 3.1., penggunaan lahan bukan pertanian tercatat 23,78 persen pada tahun 2011 meningkat menjadi 24,93 persen pada tahun 2013. Tingginya permintaan perumahan di daerah perkotaan dan meningkatnya

industrialisasi dan perdagangan di D.I. Yogyakarta menjadi salah satu penyebab terus meningkatnya alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan bukan pertanian.

3.2. Kependudukan

Jumlah penduduk yang tinggal di D.I. Yogyakarta pada tahun 2013 sebesar 3.594.854 jiwa, dengan tingkat kepadatan dan laju pertumbuhan penduduk pada masing-masing kabupaten/kota seperti yang disajikan dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Gambaran Penduduk D.I. Yogyakarta menurut Kabupaten/kota
D.I. Yogyakarta Tahun 2013

No	Kabupaten/kota	Luas Daerah	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kulon Progo	586,27	401.450	685	1,04
2	Bantul	506,85	955.015	1.884	1,53
3	Gunung Kidul	1.485,36	693.524	467	0,86
4	Sleman	574,82	1.147.037	1.995	1,58
5	Yogyakarta	32,50	397.828	12.241	0,76
D.I. Yogyakarta		3.185,80	3.594.854	1.128	1,27

Sumber: BPS Provinsi DIY

Tabel 3.2. memperlihatkan bahwa Kota Yogyakarta sebagai ibukota D.I. Yogyakarta memiliki kepadatan penduduk per kilo meter persegi lebih tinggi dibanding empat kabupaten lainnya yaitu mencapai 12.241 jiwa/km². Hal tersebut menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta merupakan pusat aktivitas perekonomian di D.I. Yogyakarta dan mempunyai daya tarik yang cukup tinggi bagi penduduk di wilayah sekitar untuk bekerja maupun tinggal di Kota Yogyakarta. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi terdapat di Kabupaten Sleman yang tercatat

sebesar 1,58 persen diikuti oleh Kabupaten Bantul dengan laju pertumbuhan penduduk sekitar 1,53 persen.

Sementara itu Kabupaten Gunungkidul dengan luas wilayah 1.485,36 km² memiliki kepadatan penduduk per kilo meter persegi terendah yaitu 467 jiwa/km² dengan laju pertumbuhan penduduk hanya 0,86 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Gunungkidul dengan topografi wilayah yang sebagian besar wilayahnya berupa pegunungan belum memiliki daya tarik bagi penduduk yang berada di wilayah sekitar untuk melakukan aktivitas ekonominya di kabupaten tersebut.

3.3. Ketenagakerjaan

3.3.1. Penduduk yang Bekerja dan Menganggur

Penduduk usia kerja di D.I.Yogyakarta pada Agustus 2013 tercatat sebanyak 2.813.088 jiwa. Dari jumlah tersebut sebanyak 1.949.243 jiwa (69,29 persen) merupakan penduduk yang termasuk angkatan kerja, sedangkan 863.845 jiwa (30,71 persen) bukan angkatan kerja. Tercatat 96,76 persen dari angkatan kerja adalah bekerja.

Jika ditinjau menurut kabupaten/kota, kondisi ketenagakerjaan cukup bervariasi. Komposisi penduduk yang bekerja dan menganggur terjadi perbedaan cukup nyata. Hal ini terjadi akibat ketersediaan lapangan pekerjaan yang tidak seimbang dengan jumlah penduduk yang mencari pekerjaan atau yang telah memasuki usia kerja dan mengakibatkan munculnya tingkat pengangguran. Permasalahan pengangguran selama ini seharusnya terus menjadi perhatian

pemerintah terutama tenaga kerja yang baru memasuki pasar kerja, mereka siap bekerja tetapi tidak tertampung oleh bursa tenaga kerja. Jika pemerintah lebih berorientasi pada lapangan usaha yang relatif padat modal dan menuntut pekerja dengan kualitas tinggi maka dikhawatirkan banyak pencari kerja tidak dapat memenuhi spesifikasi keahlian yang diminta. Untuk berkompetisi dengan daerah lainnya dibutuhkan kemampuan dan ketrampilan yang lebih baik. Peran pemerintah dituntut untuk memfasilitasi kebutuhan ini agar mengurangi tingkat pengangguran di D.I. Yogyakarta. Salah satu indikator yang sering digunakan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT pada Agustus 2013 D.I. Yogyakarta sebesar 3,24 persen. Tabel 3.3. menunjukkan bahwa pada Agustus 2013, tingkat pengangguran terbuka tertinggi adalah di Kota Yogyakarta yaitu 6,45 persen dan terendah di Kabupaten Gunungkidul yang tercatat sebesar 1,69 persen.

Tabel 3.3. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan dan Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta, Agustus 2013

Kegiatan	Kabupaten/Kota					
	Kulon progo	Bantul	Gunung kidul	Sleman	Yogya karta	DIY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Angkatan Kerja	75,61	66,78	77,87	65,67	64,38	69,29
1. Bekerja	73,46	64,54	76,56	63,51	60,23	67,05
2. Pengangguran	2,15	2,24	1,32	2,16	4,16	2,25
Bukan Angkatan Kerja	24,39	33,22	22,13	34,33	35,62	30,71
1. Sekolah	4,18	4,57	1,94	11,47	12,92	7,17
2. Mengurus Rumah Tangga	15,31	19,63	14,60	16,83	17,46	17,03
3. Lainnya	4,90	9,02	5,58	6,03	5,24	6,50
Jumlah/Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	311.148	732.616	549.212	894.971	325.141	2.813.088
TPT	2,85	3,36	1,69	3,28	6,45	3,24

Sumber: D.I. Yogyakarta Dalam Angka, 2014

3.3.2. Lapangan Usaha

Secara umum, sektor lapangan usaha yang menjadi tumpuan utama penduduk D.I. Yogyakarta untuk mencari nafkah tahun 2013 adalah sektor pertanian dan sektor jasa-jasa. Sektor pertanian mampu menyerap tenaga kerja terbesar yaitu 531.559 penduduk, diikuti oleh sektor jasa-jasa mampu menyerap sekitar 375.954 penduduk dan sektor industri pengolahan menyerap sekitar 251.892 penduduk.

Tabel 3.4. Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta, Agustus 2013

Lapangan Pekerjaan Utama	Kabupaten/Kota					
	Kulon- progo	Bantul	Gunung kidul	Sleman	Yogya karta	DIY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pertanian	114.840	80.271	228.751	107.211	486	531.559
2. Industri Pengolahan	26.540	102.983	36.003	67.220	19.146	251.892
3. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan	40.686	125.879	65.999	162.207	93.152	487.923
4. Jasa-jasa	27.817	99.050	51.772	145.851	51.464	375.954
5. Lainnya	18.689	64.625	37.929	85.930	31.570	238.743
Jumlah	228.572	472.808	420.454	568.419	195.818	1.886.071

Sumber : D.I. Yogyakarta Dalam Angka, 2014

Sementara jika dilihat menurut kabupaten/kota, sektor tumpuan perekonomian masing-masing kabupaten/kota berbeda-beda. Sektor perdagangan dan sektor jasa-jasa mempunyai penyerapan tenaga kerja yang terbanyak di Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Di sisi lain, penduduk di

Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunungkidul paling banyak bekerja di sektor pertanian dan sektor perdagangan. Fenomena yang bisa ditangkap adalah sektor pertanian di Daerah Istimewa Yogyakarta masih merupakan pertanian tradisional, jadi kecenderungannya masih bersifat padat karya. Banyaknya pekerja di sektor ini diduga tidak memberikan produksi pertanian sebanyak yang diharapkan. Selain itu Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah tujuan wisata berpengaruh terhadap perkembangan sektor perdagangan dan jasa yang ditunjukkan oleh besarnya penyerapan tenaga kerja di kedua sektor tersebut. Kelompok ini didominasi oleh pekerja yang bisa berganti pekerjaan tergantung ketersediaan kesempatan kerja. Kondisi ini lebih disebabkan posisi tawar tenaga kerja yang lemah sehingga ketergantungan terhadap pemberi kerja relatif tinggi. Ini sebagian besar terjadi pada sektor industri dan perdagangan. Mengatasi hal ini diperlukan peningkatan ketrampilan angkatan kerja melalui kegiatan pelatihan tenaga kerja dan pemberian kemudahan memperoleh modal usaha sehingga dapat mendorong mereka untuk bekerja secara mandiri dari pada menjadi buruh/karyawan atau pekerja bebas.

3.3.3. Bekerja menurut Status

Status pekerjaan menunjukkan posisi seseorang dalam suatu pekerjaan. Posisi ini juga memperlihatkan kemampuan manajerial seseorang ketika berperan di dalam kelompoknya. Jika seseorang tak ingin melibatkan diri pada kelompok tertentu, dia dapat memilih mengelola usaha sendiri di mana dia berperan sebagai manajer sekaligus pekerja.

Status sebagai buruh/karyawan/pegawai/pekerja bebas masih mendominasi penduduk yang bekerja di tahun 2013 yaitu sebanyak 744.261 jiwa. Sebagian besar, karena keadaan yang membuat mereka tidak bisa berusaha sendiri dan akhirnya menjadi buruh/karyawan/pegawai atau pekerja bebas. Mereka yang sengaja memilih menjadi buruh atau pekerja bebas, karena kemungkinan alasan ketiadaan modal usaha atau faktor pendidikan yang masih rendah.

Di lain pihak, mereka yang berusaha dibantu dengan buruh tetap relatif masih rendah. Sebesar 86.198 jiwa saja yang memilih berusaha dengan dibantu buruh tetap. Pekerja yang termasuk dalam kelompok ini adalah mereka yang memiliki jiwa wirausaha yang tinggi. Merekalah yang telah membuka peluang bagi terbentuknya kesempatan kerja baru. Jumlah mereka diharapkan dari tahun ke tahun semakin bertambah. Dampak menurunnya kondisi perekonomian sehingga biaya operasional usaha meningkat membuat banyak pelaku usaha membuat keputusan untuk efisiensi tenaga kerja dengan meminta bantuan anggota keluarga sendiri daripada mencari pekerja dibayar, mengingat tingginya upah yang harus diberikan.

Secara umum gambaran status pekerjaan penduduk yang bekerja tidak jauh berbeda di antara kabupaten/kota. Tabel 3.5. menunjukkan bahwa selama periode tahun 2013, sekitar 111.256 (62,22%) penduduk di Kota Yogyakarta yang bekerja berstatus sebagai buruh/karyawan. Selanjutnya penduduk di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai masing-masing sebesar 287.740 (49,22%) dan 213.853 (46,43 %). Di sisi lain, penduduk yang bekerja di Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunungkidul yang berstatus berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar masing-masing tercatat sebesar

69.768 (25,44%) dan 136.344 (26,40%). Sebagian besar penduduk yang berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar adalah mereka yang bekerja di sektor pertanian atau perdagangan. Ini berkaitan erat dengan ketrampilan yang mereka miliki dengan keterbatasan modal yang dimiliki.

Tabel 3.5. Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu menurut Status Pekerjaan Utama dan Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta, Agustus 2013

Status Pekerjaan Utama	Kabupaten/Kota					
	Kulon progo	Bantul	Gunung kidul	Sleman	Yogya Karta	DIY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Berusaha sendiri	24.137	78.035	40.270	67.127	34.174	243.743
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	69.768	65.860	136.344	83.282	18.767	374.021
3. Berusaha dibantu buruh tetap	7.394	24.016	12.162	34.786	7.840	86.198
4. Buruh/karyawan/pegawai	53.077	213.853	77.335	287.740	112.256	744.261
5. Pekerja bebas di pertanian	3.414	5.140	6.045	13.128	0	27.727
6. Pekerja bebas non pertanian	7.645	33.577	29.967	27.077	8.264	106.530
7. Pekerja Keluarga	63.137	52.327	118.331	55.279	14.517	303.591
Jumlah	274.203	460.633	516.528	584.574	180.411	2.016.349

Sumber: BPS Provinsi D.I.Yogyakarta, Sakernas Agustus 2013

Secara umum, tabel 3.5. juga memperlihatkan bahwa jumlah penduduk yang berstatus berusaha sendiri secara proporsional hampir sama di semua kabupaten/kota. Mereka yang berusaha sendiri sebagian besar adalah berprofesi sebagai penjual dengan tempat yang tetap atau pedagang keliling, petani atau

penggarap lahan pertanian dengan luas lahan sempit dan atau skala usaha yang relatif kecil, transportasi sederhana seperti becak, serta mereka yang berusaha pada usaha industri rumah tangga. Umumnya mereka memiliki keterbatasan ketrampilan serta keterbatasan kemampuan secara ekonomi. Sehingga bekerja secara sendiri bagi mereka merupakan alternatif untuk dijalani karena kesulitan bersaing dengan pekerja lainnya serta keterbatasan sektor formal untuk menampung pekerja dengan kemampuan yang terbatas.

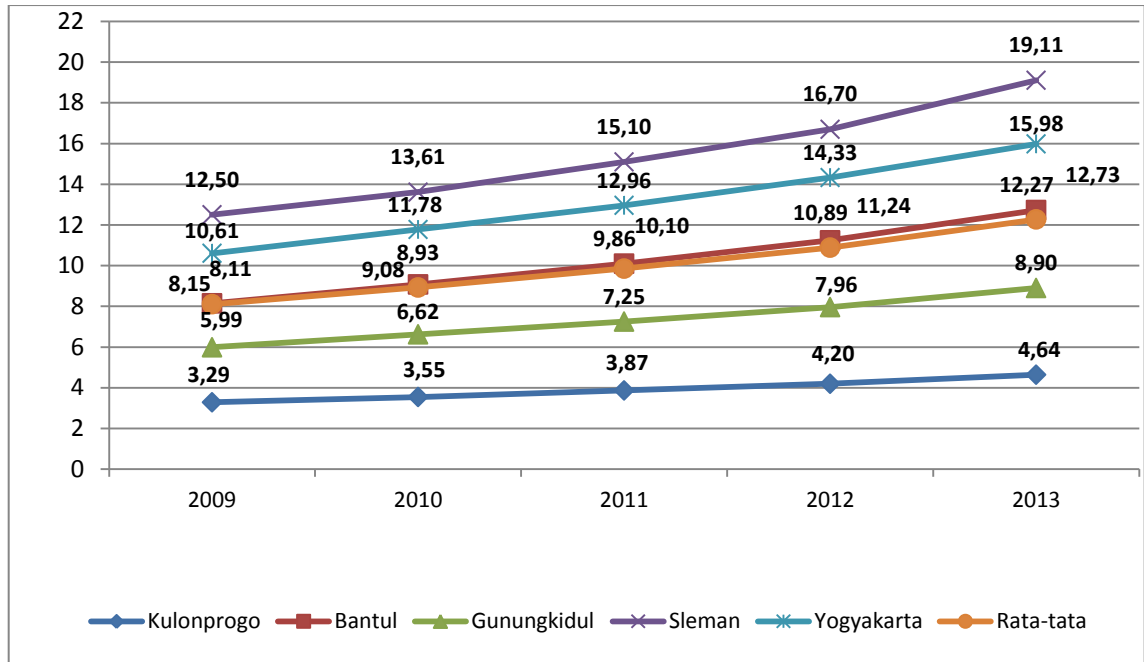
3.4. Kondisi Perekonomian

Perekonomian D.I. Yogyakarta selama periode tahun 2013 menunjukkan kinerja yang membaik. Hal ini ditandai dengan meningkatnya nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang meningkat dibandingkan dengan tahun 2012. PDRB atas dasar harga berlaku D.I. Yogyakarta pada tahun 2013 mencapai Rp 63,69 triliun. Secara nominal nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar Rp 6,66 triliun dibandingkan dengan PDRB tahun 2012 yang mencapai Rp 57,03 triliun.

Berdasarkan harga konstan 2000, PDRB juga mengalami kenaikan, dari Rp23,31 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp 24,57 triliun pada tahun 2013. Ini berarti selama tahun 2013 D.I. Yogyakarta mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 5,40 persen. Berdasarkan kabupaten/kota terlihat bahwa selama kurun waktu 5 (lima) tahun, kinerja perekonomian Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta melampaui rata-rata D.I. Yogyakarta. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kedua wilayah tersebut merupakan penopang perekonomian di D.I. Yogyakarta. Kinerja ekonomi di Kabupaten Bantul relatif sama dengan rata-rata D.I. Yogyakarta,

sedangkan kinerja ekonomi di Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunungkidul di bawah rata-rata D.I. Yogyakarta.

Gambar 3.2. Nilai PDRB menurut Kabupaten/kota di D.I.Yogyakarta Atas Dasar Harga Berlaku, 2009-2013 (triliun rupiah)



3.4.1. Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi merupakan sebaran nilai tambah yang dilihat secara sektoral. Sektor perekonomian terbagi menjadi sembilan jenis. Perekonomian D.I. Yogyakarta tahun 2013 ditinjau menurut struktur ekonomi menunjukkan bahwa sektor perdagangan, hotel dan restoran adalah sektor yang memiliki kontribusi terbesar pada pembentukan PDRB. Sekitar 20,65 persen nilai PDRB tahun 2013 adalah dari sektor perdagangan, hotel dan restoran. Posisi kedua adalah sektor jasa-jasa dan sektor pertanian yang masing-masing mampu memberikan sumbangan sebesar 20,16 persen dan 13,91 persen.

Tabel 3.6. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku di D.I. Yogyakarta 2012 – 2013

Lapangan Usaha	2012*	2013**
(1)	(2)	(3)
1. Pertanian	14,65	13,91
2. Pertambangan dan Penggalian	0,67	0,65
3. Industri Pengolahan	13,34	13,77
4. Listrik, Gas & Air Bersih	1,28	1,25
5. Bangunan	10,85	10,85
6. Perdagangan, Hotel-Restoran	20,09	20,65
7. Pengangkutan & Komunikasi	8,60	8,48
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	10,30	10,27
9. Jasa-Jasa	20,23	20,16
PDRB	100,00	100,00

Sumber : Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2014

Alih fungsi lahan pertanian ke sektor industri atau perumahan di D.I. Yogyakarta menjadikan peranan sektor pertanian terus menurun. Kecenderungan ini akan terus berlangsung pada tahun-tahun mendatang mengingat makin tingginya nilai jual tanah di daerah ini. Masih tingginya penduduk yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini membuat pemerintah daerah seharusnya makin memperhatikan kesinambungan sektor ini dan terus mencari alternatif untuk menyerap limpahan pekerja dari sektor pertanian ini. Dengan demikian diharapkan sektor pertanian tetap ada dan menjadi tulang punggung ekonomi daerah ini.

Sektor ekonomi lain di luar tiga sektor ekonomi dominan, yang juga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian D.I. Yogyakarta adalah sektor industri pengolahan yang mampu memberikan kontribusi sebesar 13,54 persen. Posisi D.I. Yogyakarta yang langsung berbatasan dengan Kabupaten/kota di

Provinsi Jawa Tengah dan pantai selatan serta pusat pendidikan menjadikan sektor jasa-jasa, perdagangan dan industri pengolahan mulai berkembang semakin pesat. Banyak penduduk yang migran dan tinggal di D.I. Yogyakarta untuk melanjutkan pendidikan atau karena daya tarik pariwisata memicu semakin meningkatnya permintaan berbagai kebutuhan hidup seperti perumahan, makanan dan juga perbaikan infrastruktur.

3.4.2. Pertumbuhan Ekonomi

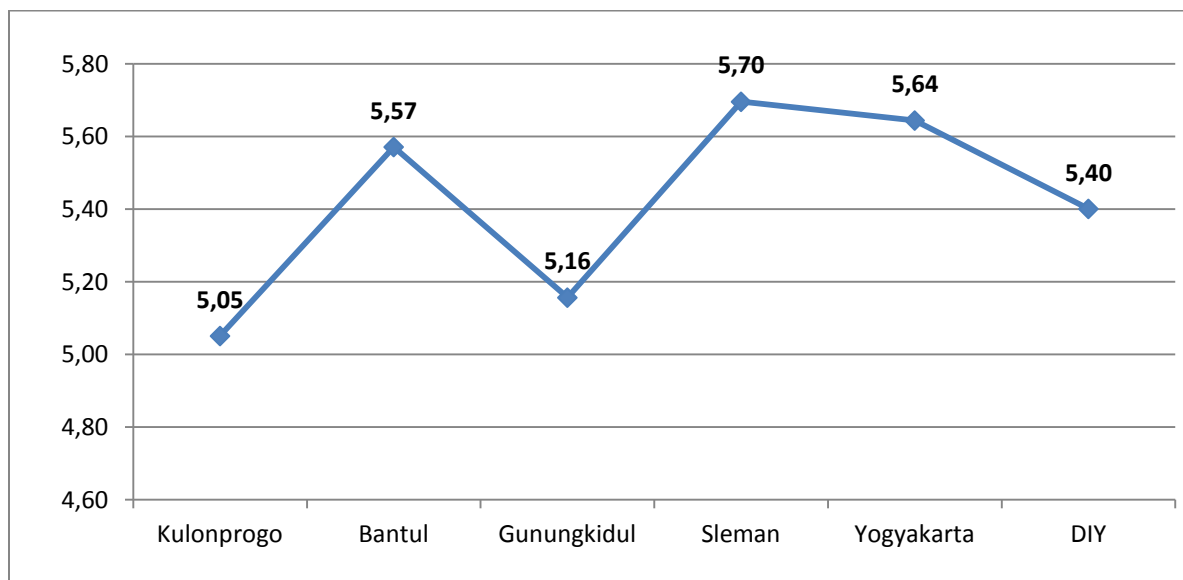
Pertumbuhan ekonomi sering dijadikan indikator utama pembangunan ekonomi makro karena memberikan implikasi pada kinerja ekonomi makro lainnya. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah menunjukkan makin berkembangnya aktifitas perekonomian baik aktifitas produksi, konsumsi, investasi maupun perdagangan di daerah tersebut yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja (Tri Widodo, 2006:81).

Laju pertumbuhan ekonomi dihitung dari perubahan nilai PDRB atas dasar harga konstan 2000 untuk menghilangkan pengaruh perubahan harga sehingga nilai pertumbuhan yang diperoleh benar-benar merupakan pertambahan kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan dan bukan pertambahan yang disebabkan oleh perubahan harga. Pada tahun 2013 PDRB atas dasar harga konstan 2000 D.I. Yogyakarta tercatat sebesar Rp 24.567.476 juta atau tumbuh sekitar 5,40 persen dibanding tahun sebelumnya yang sebesar Rp 23.308.558 juta. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2009 yang hanya tumbuh sekitar 5,32 persen.

Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun ini disebabkan oleh makin kondusifnya perekonomian nasional di seluruh sektor lapangan usaha.

Sektor industri pengolahan pada tahun 2013 mampu tumbuh paling cepat dari pada delapan sektor lainnya dengan laju pertumbuhan sebesar 7,81 persen. Posisi kedua dan ketiga adalah sektor listrik, gas dan air bersih serta sektor pengangkutan dan komunikasi yang masing-masing tumbuh sebesar 6,54 persen dan 6,30 persen. Di sisi lain, setelah mengalami pertumbuhan sebesar 4,19 persen pada tahun 2012, sektor pertanian pada tahun 2013 ini hanya mampu tumbuh sebesar 0,63 persen. Secara umum sektor-sektor yang mengalami peningkatan pertumbuhan disebabkan oleh stabilitas ekonomi yang makin kondusif di samping makin membaiknya kinerja sektor-sektor tersebut. Kinerja yang mulai membaik terutama pada sektor keuangan, sektor angkutan dan sektor jasa-jasa.

Gambar 3.3. Laju Pertumbuhan PDRB Harga Konstan menurut Kabupaten/Kota di D.I.Yogyakarta Tahun 2013



Pertumbuhan ekonomi selama tahun 2013 menurut kabupaten/kota tampak bahwa Kabupaten Sleman memiliki pertumbuhan PDRB paling tinggi selama tahun 2013 dibandingkan dengan empat kabupaten kota lainnya yaitu sebesar 5,70 persen diikuti oleh Kota Yogyakarta yang tumbuh sebesar 5,64 persen. Tingginya pertumbuhan PDRB di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa perekonomian daerah tersebut secara umum jauh lebih baik karena struktur perekonomian di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta sedang memasuki fase pertumbuhan yang relatif cepat dan belum mencapai kapasitas maksimum. Sementara antara Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunungkidul menunjukkan pertumbuhan PDRB yang relatif tidak tinggi. Hal ini menjelaskan bahwa kedua kota tersebut pertumbuhan perekonomian wilayahnya telah mendekati fase kapasitas maksimum.

3.4.3. PDRB Perkapita

Salah satu indikator yang mampu menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk adalah PDRB Perkapita. PDRB perkapita menyatakan nilai rata-rata tambah bruto yang dihasilkan oleh setiap penduduk di suatu daerah dalam setahun. Salah satu komponen dalam nilai tambah tersebut adalah upah dan gaji yang diterima masyarakat sebagai balas jasa tenaga kerja. Jika PDRB perkapita meningkat secara hipotesis pendapatan masyarakat juga meningkat. Angka PDRB perkapita diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Tabel 3.7. memperlihatkan bahwa PDRB perkapita kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta pada tahun 2013 secara nominal cukup beragam. Kota Yogyakarta

memiliki PDRB perkapita yang paling tinggi yaitu sebesar RP. 39.689.015,-. Hal ini berarti bahwa Kota Yogyakarta masih memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian D.I. Yogyakarta. Kota Yogyakarta sebagai pusat pertumbuhan D.I. Yogyakarta berdampak pada meningkatnya pendapatan masyarakat di wilayah tersebut dan wilayah sekitar yang berbatasan sekaligus menjadi daya tarik ekonomi bagi masyarakat di wilayah sekitar. Hal ini dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita untuk Kabupaten Bantul (Rp.13.441.259,-) dan Kabupaten Sleman (Rp.16.773.771,-) yang berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta menduduki posisi kedua dan ketiga. Sementara PDRB Perkapita Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunungkidul tahun 2013 ini masing-masing sebesar Rp.11.513.261,- dan Rp.12.701.399,- jauh lebih rendah dari PDRB per kapita Kota Yogyakarta.

Tabel 3.7. Nilai PDRB Per kapita menurut Kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta Atas Dasar Harga Berlaku, 2012-2013 (rupiah)

No	Kabupaten/kota	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kulonprogo	10.671.983	11.513.261
2	Bantul	12.114.961	13.441.259
3	Gunungkidul	11.628.655	12.701.399
4	Sleman	14.976.756	16.733.771
5	Yogyakarta	36.363.266	39.689.015
D.I. Yogyakarta		16.053.977	17.717.081

Sumber: Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2014

Peran pemerintah untuk menyediakan fasilitas pelayanan publik, infrastruktur dan menciptakan pusat aktifitas ekonomi baru di masing-masing kabupaten/kota akan dapat meningkatkan PDRB perkapita dan menurunkan kesenjangan pendapatan di antara penduduk di kabupaten/kota D.I. Yogyakarta.

3.5. Kondisi Kesehatan

Faktor kesehatan menjadi satu dari tiga indikator penting penunjang pembangunan manusia karena bila daya tahan tubuhnya baik maka tingkat produktifitas manusia secara langsung terdali dengan optimal. Pada saat sehat orang dapat menjalankan aktivitas bekerja, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun aktifitas lainnya lebih baik dibandingkan dengan kondisi saat tubuhnya sedang sakit. Karena itu pembangunan bidang kesehatan terus dilakukan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dan peningkatan sumber daya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan biaya kesehatan.

3.5.1. Penolong Kelahiran Pertama

Derajat kesehatan penduduk di suatu wilayah selain ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, juga ditunjukkan oleh persentase balita menurut penolong kelahiran pertama. Kesehatan bayi yang baru lahir sangat erat hubungannya dengan pertolongan persalinan yang aman dan perawatan bayi yang baru lahir. Pengetahuan yang minim tentang cara persalinan dan perawatan pasca persalinan yang sehat dan aman serta sangat minimnya alat bantu penolong persalinan merupakan beberapa faktor penyebab terjadinya kematian bayi.

Menurut data Susenas 2010-2013, masih terdapat balita yang hanya mendapatkan pertolongan pertama dari tenaga non medis seperti dukun dan keluarga. Presentase balita dengan penolong kelahiran pertama dari tenaga non medis tahun 2013 tercatat 0,40 persen. Persentase ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana penolong persalinan tenaga non

medis mencapai 3,47 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses tenaga medis penolong persalinan lebih mudah. Keberadaan bidan yang siaga membantu proses persalinan merupakan salah satu faktor menurunnya persentase penolong persalinan oleh tenaga non medis. Selain itu adanya program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) juga mempunyai andil dalam menurunkan angka ini, karena masyarakat miskin dapat mengakses fasilitas kesehatan, termasuk untuk persalinan melalui tenaga medis.

Tabel 3.8. Persentase Balita menurut Penolong kelahiran Pertama di D.I. Yogyakarta, 2010-2013

Tahun	Penolong_kelahiran					Total
	Dokter	Bidan	Tenaga Medis Lainnya	Dukun Bersalin	lainnya	
2010	36.97	59.24	1.01	2.29	0.49	100,00
2011	37.25	60.56	0,00	0.68	1.51	100,00
2012	35,00	60.99	0.54	0.90	2.57	100,00
2013	42.59	56.51	0.50	0.33	0.07	100,00

Sumber: BPS Provinsi DIY, Susenas diolah

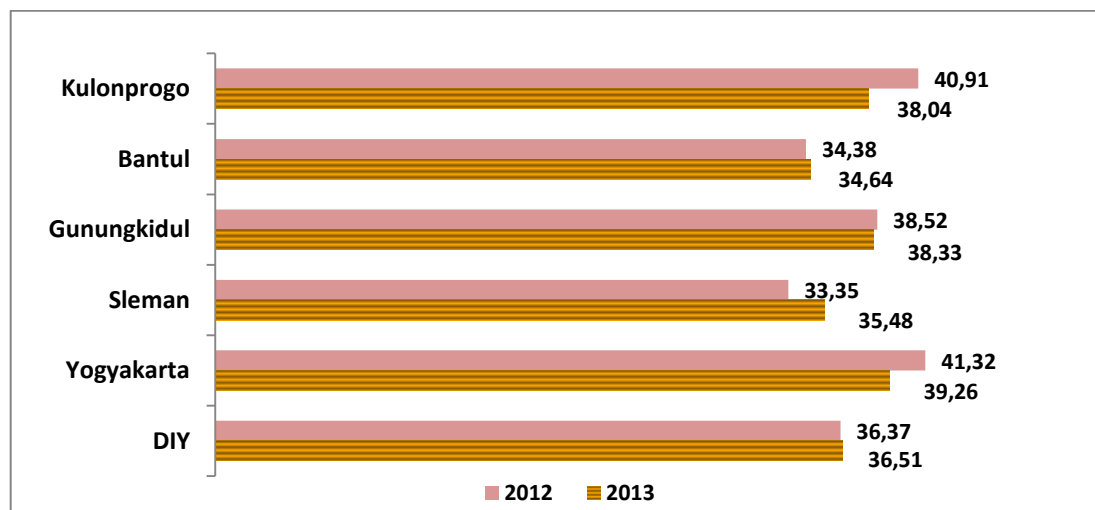
3.5.2. Angka Kesakitan

Salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan derajat kesehatan penduduk adalah angka kesakitan (*morbidity rate*). Angka ini merupakan proporsi penduduk yang mengalami gangguan kesehatan sehingga menyebabkan terganggunya aktifitas sehari-hari. Waktu rujukan yang digunakan untuk mengamati variabel ini adalah selama sebulan yang lalu dari saat pencacahan.

Berdasarkan hasil Susenas 2013, persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan di D.I. Yogyakarta tercatat 36,51 persen. Angka tersebut sedikit mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2012 yang tercatat sebesar 36,37

persen. Meskipun hanya mengalami penurunan cukup kecil, namun ini merupakan indikasi yang perlu diperhatikan mengingat keluhan kesehatan dapat menyebabkan penurunan produktivitas masyarakat karena berkurangnya gangguan akibat sakit. Di samping itu, meningkatnya derajat kesehatan penduduk akan menurunkan biaya yang dikeluarkan untuk berobat sehingga dapat meringankan beban ekonomi rumah tangga. Penyebab utama jenis keluhan tersebut adalah daya tahan tubuh yang kurang menunjang di samping faktor kesehatan lingkungan serta perubahan cuaca yang terjadi secara mendadak.

Gambar 3.4. Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan menurut Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta, 2012-2013



Sumber: BPS Provinsi DIY, Susenas diolah

Perbandingan angka keluhan kesehatan menurut kabupaten/kota disajikan pada gambar 3.4. Angka keluhan kesehatan di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman pada tahun 2013 sedikit meningkat dibandingkan pada tahun 2012, sementara tiga kabupaten/kota lainnya mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Penurunan tertinggi adalah di Kabupaten Kulonprogo dari 40,91 persen pada tahun 2012 menjadi 38,04 persen pada tahun 2013. Di lain pihak angka keluhan kesehatan di Kabupaten Sleman justru meningkat cukup tinggi dari 33,35 persen di tahun 2012 menjadi 35,48 pada tahun 2013.

Melihat perkembangan angka keluhan kesehatan tersebut, berbagai upaya yang dilakukan untuk mengatasi keluhan kesehatan yang diderita penduduk harus didukung oleh ketersediaan fasilitas dan sarana kesehatan yang mudah diakses oleh penduduk dan relatif murah bagi sebagian masyarakat. Jenis fasilitas tersebut adalah puskesmas dan puskesmas pembantu (pustu). Fasilitas kesehatan masyarakat milik pemerintah yang berbiaya murah dan dekat dengan lingkungan penduduk sekitarnya diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang umumnya diderita oleh penduduk seperti penyakit-penyakit yang disebabkan oleh infeksi, bukan penyakit degeneratif.

3.5.3. Ketersediaan Sarana Kesehatan

Sarana utama pendukung keberhasilan pembangunan bidang kesehatan adalah tersedianya sarana kesehatan yang memadai untuk berbagai kalangan masyarakat, kelengkapan fasilitas kesehatan serta tenaga kesehatan yang memadai dan seimbang dengan jumlah masyarakat yang dilayani. Pelayanan kesehatan harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Penggunaan layanan kesehatan yang rendah akan mengakibatkan terhambatnya pembangunan kesehatan ke arah yang lebih baik.

Sarana kesehatan yang ada di D.I. Yogyakarta dikelola oleh pemerintah dan swasta. Beberapa sarana kesehatan yang tersedia di D.I. Yogyakarta tahun 2013 di antaranya adalah rumah sakit sebanyak 84 unit yang tersebar di 5 kabupaten/kota, 38 rumah sakit bersalin, fasilitas balai pengobatan terdapat 95 buah dan apotik tercatat 526 unit. Fasilitas pelayanan kesehatan yang tersebar di 17 kecamatan adalah puskesmas induk, puskesmas pembantu masing-masing sebesar 121 unit dan 321 unit. Di samping beberapa fasilitas tersebut, di D.I. Yogyakarta terdapat juga fasilitas kesehatan lainnya seperti praktek dokter, toko obat, dan lainnya.

Tabel 3.9. Jumlah Sarana Kesehatan di D.I. Yogyakarta menurut Kabupaten/kota Tahun 2013

Fasilitas Kesehatan	Kabupaten/Kota					DIY
	Kulon-progo	Bantul	Gunung-kidul	Sleman	Yogya-karta	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Rumah Sakit	8	14	5	26	19	72
2. Rumah Sakit Jiwa	0	0	0	1	1	2
3. Rumah Sakit Khusus	1	4	0	7	10	22
a. RS.Khusus Bedah.	0	1	0	2	1	4
b. RS.Khusus Lainnya	1	3	0	5	9	18
4. Puskesmas						
a. Puskesmas	21	27	30	25	18	121
b. Puskesmas Pembantu	63	67	110	70	11	321
c. Puskesmas Keliling	21	27	30	41	18	137
5. Praktek Dokter Perorangan	89	228	84	481	260	1.142
6. Praktek Bidan	-	-	-	-	-	-
7. Rumah Bersalin	4	15	3	5	11	38
8. Balai Pengobatan	5	31	12	24	23	95
9. Gudang Farmasi Kabupaten	1	1	1	1	1	5
10. Apotik	26	101	27	234	133	526
11. Toko Obat Berijin	4	1	3	7	38	53

Sumber: Dinas Kesehatan D.I. Yogyakarta

Tabel 3.9. Lanjutan

Fasilitas Kesehatan	Kabupaten/Kota					DIY
	Kulon-Progo	Bantul	Gunung-kidul	Sleman	Yogya-karta	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12. Industri RT Makanan	1.461	1.617	1.360	1.531	1.379	7.348
13. Sub/Cab. Penyalur Alat Kes.	0	2	0	9	7	18
14. Industri Obat Tradisional	0	0	0	0	0	0
15. Industri Kecil Obat Tradisional	4	5	0	2	1	12
16. Pabrik Farmasi	0	0	0	1	0	1
17. Pedagang Besar Farmasi	0	10	0	21	20	51

Sumber: Dinas Kesehatan D.I. Yogyakarta

Sampai saat ini puskesmas dan pustu tetap dijadikan tumpuan masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan yang murah dan masih merupakan pilihan utama bagi penduduk untuk mengatasi masalah kesehatan, karena umumnya tarif fasilitas kesehatan selain puskesmas/pustu relatif lebih mahal, tidak semua lapisan masyarakat mampu menjangkau dan memanfaatkannya sesuai dengan prosedur berobat yang resmi.

Sebuah puskesmas/pustu di D.I. Yogyakarta melayani sebanyak 6.209 penduduk. Berdasarkan rekomendasi dari PBB setiap fasilitas puskesmas dan pustu kesehatan yang tersedia maksimal melayani sebanyak 10.000 penduduk. Dengan demikian beban jangkauan puskesmas/pustu di D.I. Yogyakarta dalam memberikan layanan kesehatan sudah memadai.

Tabel 3.10. Jumlah Puskesmas dan Rasionya terhadap Penduduk di D.I. Yogyakarta menurut Kabupaten/kota Tahun 2013

No	Kabupaten/kota	Jumlah Penduduk	Jumlah Puskesmas	Rasio Puskesmas-Penduduk
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
1	Kulonprogo	401 450	105	3 823
2	Bantul	955 015	121	7 893
3	Gunungkidul	693 524	170	4 080
4	Sleman	1 147 037	136	8 434
5	Yogyakarta	397 828	47	8 464
D.I. Yogyakarta		3 594 854	579	6 209

Sumber: Dinas Kesehatan D.I. Yogyakarta

Tabel 3.10 memperlihatkan bahwa di setiap kabupaten/kota telah memiliki berbagai sarana penunjang kesehatan seperti rumah sakit, balai pengobatan, rumah bersalin, sehingga masyarakat yang ada di tiap kabupaten/kota tersebut tidak terlalu sulit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan lebih lanjut selain puskesmas, walaupun beberapa rumah sakit tersebut belum memiliki peralatan medis yang lengkap dan memadai. Puskesmas di masing-masing kabupaten/kota rata-rata cukup memadai. Namun yang perlu mendapat perhatian pemerintah adalah ketersediaan tenaga kesehatan yang memadai, profesional dan handal, sehingga pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas bisa memuaskan bagi masyarakat di daerah pedesaan.

3.5.4. Tenaga Kesehatan

Secara umum, jumlah tenaga kesehatan tahun 2013 tercatat sebanyak 13.047 tenaga kesehatan yang tersebar di 5 kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta. Tenaga

kesehatan tersebut terdiri atas dokter, bidan dan tenaga kesehatan lainnya seperti tenaga farmasi, ahli gizi yang memberikan pelayanan terhadap sekitar 3.594.854 jiwa. Jumlah tersebut belum mencukupi untuk memberikan pelayanan yang optimal.

Meskipun hampir di semua kabupaten/kota terdapat tenaga kesehatan, namun tidak menjamin seluruh masyarakat sudah mendapatkan pelayanan tenaga kesehatan yang baik. Masih terdapat beberapa daerah yang sulit dijangkau oleh tenaga kesehatan atau sebaliknya, masyarakat sulit menjangkau pelayanan kesehatan dari tenaga kesehatan tersebut. Belum meratanya penyebaran tenaga kesehatan antara daerah perkotaan dan daerah perdesaan menjadi permasalahan tersendiri yang memerlukan kajian lebih lanjut bagi pemerintah daerah, agar seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan pelayanan kesehatan dengan baik.

Tabel 3.11. Jumlah Tenaga Kesehatan di D.I. Yogyakarta Menurut Kabupaten/kota Tahun 2013

No	Kabupaten/kota	Dokter	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Tenaga Medis Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kulonprogo	178	30	441	227	389
2	Bantul	403	73	650	409	596
3	Gunungkidul	104	32	524	304	218
4	Sleman	838	87	2 258	413	1 596
5	Yogyakarta	1 093	231	2 663	348	1 558
D.I. Yogyakarta		2 616	453	6 536	1 701	4 357

Sumber: Dinas Kesehatan D.I. Yogyakarta

3.6. Pendidikan

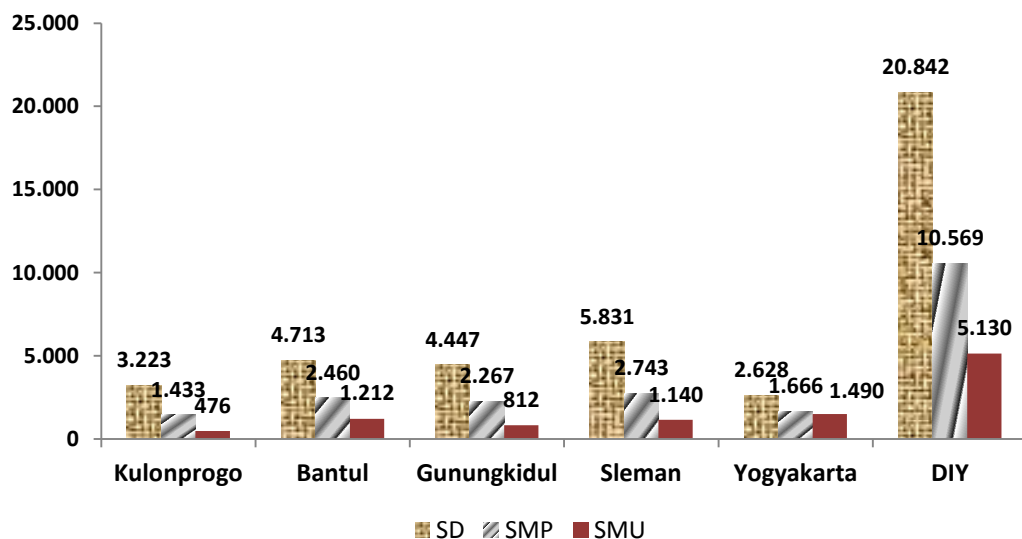
Keberhasilan pembangunan tidak hanya memerlukan investasi modal fisik, lebih jauh lagi memerlukan dukungan investasi Sumber Daya Manusia (SDM). Disadari bahwa biaya investasi pendidikan tidak sedikit jumlahnya baik dikeluarkan oleh individu maupun pemerintah. Komitmen nasional sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa Kepada TuhanYang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab.

Pemerintah telah berupaya untuk mewujudkan sistem pendidikan nasional seperti yang diharapkan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang mudah, murah, terjangkau dan memadai. Jalur sistem pendidikan nasional terdiri atas jalur pendidikan formal, non formal dan informal agar dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pemerintah juga mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu, dengan program wajib belajar untuk pendidikan dasar. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan dasar bagi setiap penduduk agar dapat mengembangkan potensi dirinya untuk dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Investasi pendidikan merupakan investasi yang bersifat jangka panjang dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Kemampuan masyarakat untuk membiayai pendidikan masih sangat lemah karena tingkat pendapatan mereka masih rendah.

3.6.1. Sekolah dan Guru

Sarana pendidikan merupakan media atau alat material yang berperan langsung dalam kegiatan belajar mengajar. Sedangkan prasarana pendidikan berperan secara tidak langsung dalam proses belajar mengajar seperti bangunan, biaya dan penunjang pendidikan lainnya. Mutu pendidikan suatu wilayah tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan pendidikan yang berkualitas dan merata hingga ke pelosok. Pemerataan kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan adalah dengan tersedianya gedung sekolah, ruang belajar, perpustakaan serta tenaga pengajar dengan distribusi yang relatif merata antar daerah .

Gambar 3.5. Jumlah Sekolah menurut Jenjang Pendidikan dan Kabupaten/kota, Tahun Ajaran 2013/2014



Sumber: Dinas Pendidikan D.I. Yogyakarta

Pada tahun ajaran 2013/2014, jumlah sekolah untuk jenjang pendidikan SD sebanyak 1.851 sekolah, SMP sebanyak 431 sekolah dan SMU sebanyak 160 sekolah.

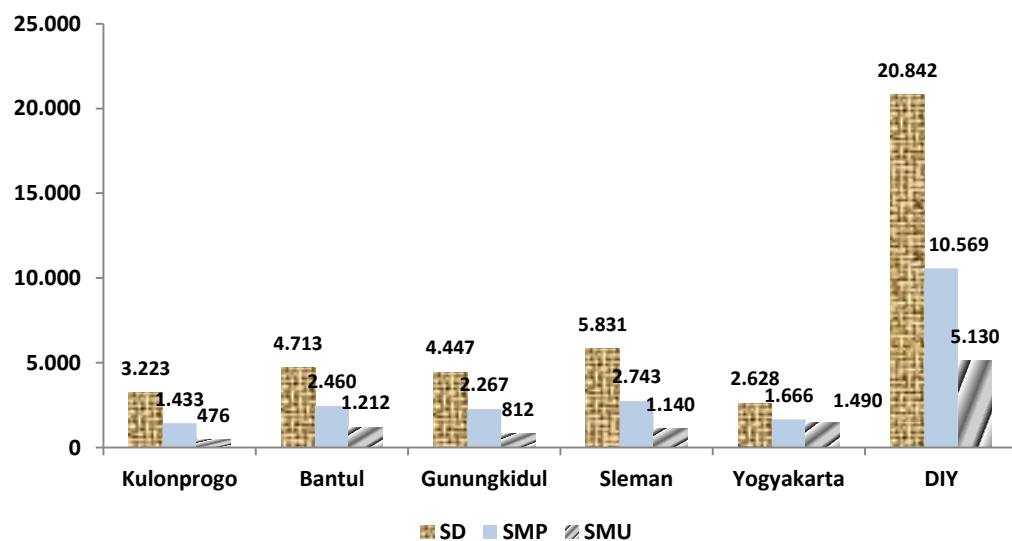
Gambar 3.5. memperlihatkan bahwa jumlah sekolah SD, SMP dan SMU semakin menurun untuk jenjang pendidikan yang semakin tinggi. Jumlah sekolah menurut jenjang pendidikan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat secara proporsional menurut kabupaten/kota, yang pada tahun ajaran 2013/2014 cukup bervariasi. Jumlah sekolah pada jenjang SD dan SMP tertinggi adalah di Kabupaten Sleman masing-masing sebanyak 501 sekolah dan 110 sekolah. Sementara itu untuk jumlah sekolah pada jenjang SMU tertinggi adalah di Kota Yogyakarta (43 sekolah). Namun demikian, jumlah sekolah jenjang SD dan SMP di Kabupaten Gunungkidul, dengan jumlah penduduk terendah, lebih banyak daripada di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulonprogo untuk jenjang pendidikan yang sama. Ini adalah salah satu wujud komitmen pemerintah daerah untuk menyediakan sarana pendidikan yang dapat dijangkau sampai wilayah terpencil untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun bagi setiap penduduk.

Selain jumlah sekolah, prasarana lain yang turut berperan penting dalam peningkatan mutu pendidikan adalah tenaga pendidik. Lewat bimbingan guru yang profesional, peserta didik diharapkan menjadi generasi yang handal dan berkualitas, memiliki pengetahuan dan ketrampilan untuk dapat menghadapi persaingan yang semakin ketat, agar kelak dapat bersaing di pasar tenaga kerja di tingkat nasional maupun internasional.

Gambar 3.6. memperlihatkan komposisi guru pada jenjang pendidikan SD sampai SMU menurut kabupaten/kota. Sebaran guru antar kabupaten/kota pada masing-masing jenjang pendidikan menunjukkan adanya indikasi ketimpangan. Hal ini dapat dilihat dari tingginya jumlah guru yang berpusat di wilayah Kabupaten

Sleman, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta. Untuk jenjang SD jumlah guru tertinggi berturut-turut di Kabupaten Sleman (5.831) dan Kabupaten Bantul (4.713). Pola yang sama juga terjadi untuk jenjang SMP, sedangkan pada jenjang SMU jumlah guru tertinggi berada di Kota Yogyakarta (1.490) dan peringkat kedua di Kabupaten Bantul (1.212).

Gambar 3.6. Jumlah Guru menurut Jenjang Pendidikan dan Kabupaten/kota, Tahun Ajaran 2013/2014



Sumber: Dinas Pendidikan D.I. Yogyakarta

Mutu pendidikan dapat pula dilihat dari beban guru, yang diukur melalui indikator rasio murid-guru dan rasio kelas-guru. Rasio murid-guru adalah perbandingan antara jumlah guru terhadap jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu, mencerminkan rata-rata jumlah murid yang dihadapi oleh seorang guru. Standar ideal murid-guru adalah 1:40 untuk SD, 1:21 untuk SMP dan 1:21 untuk SM. Adapun rasio kelas-guru didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah guru terhadap jumlah kelas pada suatu jenjang pendidikan tertentu. Standar ideal kelas-

guru adalah 1:1 untuk SD, 1:0,42 untuk SMP dan 1:0,42 untuk SM. Indikator ini berguna untuk mengetahui tingkat kekurangan atau kelebihan jumlah guru yang mengajar di kelas pada jenjang pendidikan tertentu.

Tabel 3.12. Rasio Guru, Murid, dan Ruang Kelas menurut Jenjang Pendidikan dan Kabupaten/kota, Tahun Ajaran 2013/2014

No	Kabupaten/kota	Rasio Murid-Guru			Rasio Kelas-Guru		
		SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kulonprogo	10	11	8	0,65	0,41	0.35
2	Bantul	15	12	10	0,65	0,47	0.40
3	Gunungkidul	12	11	7	0.71	0.50	0.29
4	Sleman	15	13	9	0.61	0.42	0.35
5	Yogyakarta	17	14	11	0.64	0.48	0.37
D.I. Yogyakarta		14	12	9	0.65	0.46	0.36

Sumber: Dinas Pendidikan D.I. Yogyakarta

Tabel 3.12 menunjukkan bahwa rasio murid-guru telah memenuhi ketentuan yang berlaku baik jenjang pendidikan dasar maupun menengah di seluruh kabupaten/kota, sehingga perhatian dan konsentrasi guru dalam memberikan materi pelajaran dapat tersampaikan dengan baik. Kondisi ini memberikan harapan bahwa jika kondisi kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi guru telah terpenuhi maka proses pendidikan dan pengajaran dari seorang guru akan memberikan hasil yang maksimal.

Indikator rasio kelas-guru pada tabel 3.12 menunjukkan bahwa beban tugas mengajar guru SD dan SM di seluruh kabupaten/kota relatif masih di bawah standar

ideal. Adapun untuk jenjang SMP telah melebihi standar ideal di semua kabupaten/kota, kecuali di Kabupaten Kulonprogo, di mana rasio kelas-guru tercatat sebesar 0,41.

3.6.2. Partisipasi Sekolah

Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas merupakan salah satu faktor penting penunjang keberhasilan pembangunan. Pemerintah telah berupaya meningkatkan mutu pendidikan mulai dengan pemberian kesempatan yang seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengecap pendidikan terutama pada tingkat dasar hingga pada peningkatan kualitas dan sarana dan prasarana pendidikan.

Indikator partisipasi sekolah digunakan untuk memantau program pendidikan yang telah digulirkan pemerintah. Partisipasi sekolah menggambarkan efektifitas program pendidikan dalam menyerap potensi pendidikan yang ada di masyarakat. Semakin tinggi nilainya menunjukkan semakin efektif suatu program. Indikator yang sering digunakan untuk menggambarkan capaian pembangunan di bidang pendidikan antara lain Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

APK merupakan proporsi jumlah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah dengan jenjang pendidikan tersebut. APK mengindikasikan partisipasi sekolah penduduk sesuai jenjang pendidikannya. Sedangkan APM adalah proporsi penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah tersebut.

APM berfungsi untuk menunjukkan partisipasi penduduk pada tingkat pendidikan tertentu yang sesuai dengan usianya, atau melihat penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu, yang ditunjukkan dengan nilai APM mencapai 100 persen.

Tabel 3.13. Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Kabupaten/kota dan Jenis Kelamin, 2013

Kabupaten/ kota	SD			SMP			SM		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kulon Progo	108.10	99.98	103.32	94.72	111.46	102.47	81.84	115.77	96.26
Bantul	113.41	106.52	110.11	73.90	98.55	85.46	84.97	73.24	79.44
Gunung Kidul	106.18	108.28	107.15	85.76	96.10	91.04	87.19	81.15	84.31
Sleman	108.57	104.36	106.68	88.05	77.21	82.53	92.25	72.19	81.54
Yogyakarta	100.69	109.76	104.91	91.39	99.90	95.46	84.13	81.98	82.97
D.I. Yogyakarta	108.69	105.44	107.13	84.88	93.26	88.99	86.90	79.23	83.09

Sumber: Dinas Pendidikan D.I. Yogyakarta

Susenas 2013 memperlihatkan bahwa APK berbeda-beda untuk setiap jenjang pendidikan. APK SD tahun 2013 tercatat sebesar 107,13 persen, lebih tinggi daripada APK SMP (84,88%) dan SM (83,09%). Penurunan APK pada jenjang pendidikan yang semakin tinggi juga terjadi untuk APK perempuan. Di sisi lain, tampak bahwa APK laki-laki memiliki pola yang berbeda. APK SD laki-laki sebesar 108,69, menurun menjadi 84,88 untuk APK SMP laki-laki, namun meningkat kembali untuk APK SM yaitu sebesar 86,90 persen. Selanjutnya, tabel 3.13 juga mencatat angka APK SD antara laki-laki dan perempuan lebih dari 100. Ini berarti murid SD selain mencakup anak yang berusia 7-12 tahun juga mencakup anak yang berusia kurang dari 7 tahun dan lebih dari 12 tahun. Kenyataan ini menunjukkan bahwa banyak anak yang

terlambat masuk SD atau sebaliknya sangat dini (belum cukup umur) untuk bersekolah SD, atau masih ada murid SD yang tinggal kelas.

Jika ditinjau sebarannya menurut kabupaten/kota, terlihat bahwa APK SD lebih besar dari 100. APK tertinggi adalah Kabupaten Bantul(110,11) dan terendah di Kabupaten Kulonprogo (103,32). Sementara itu APK jenjang pendidikan SMP umumnya kurang dari 100 persen, kecuali Kabupaten Kulonprogo (102,47).

Perkembangan pembangunan sektor pendidikan menurut angka APM memperlihatkan bahwa selama periode tahun 2013, secara umum nilai APM D.I. Yogyakarta untuk semua jenjang pendidikan nilainya kurang dari 100 persen. APM menurut jenjang pendidikan juga mengalami penurunan sejalan dengan meningkatnya jenjang pendidikan. Angka APM SD tercatat sebesar 96,03 persen, turun menjadi 72,64 untuk APM SMP dan 64,02 persen untuk APM SM.

Tidak ada perbedaan yang signifikan antara APM laki-laki dan APM perempuan. APM laki-laki sedikit lebih besar daripada APM perempuan untuk jenjang pendidikan SD dan SM, sebaliknya untuk jenjang pendidikan SMP, APM perempuan lebih besar dari APM laki-laki. Fakta tersebut menunjukkan bahwa secara umum kesenjangan gender tidak menjadi masalah dalam pembangunan bidang pendidikan di D.I. Yogyakarta.

Tabel 3.14. menyajikan APM menurut kabupaten/kota. Tabel tersebut memperlihatkan bahwa semua APM SD di kabupaten/kota lebih besar dari 90 persen, dengan APM tertinggi di Kabupaten Bantul (98,63 persen) dan terendah Kabupaten Kulonprogo (90,50 persen). Sementara itu APM SMP secara umum nilainya lebih dari 70 persen, APM SMP tertinggi di Kota Yogyakarta sebesar 74,30

persen dan terendah di Kabupaten Bantul yaitu 70,00 persen. Untuk APM SM memperlihatkan perbedaan yang signifikan. Kabupaten Kulonprogo dengan APM SM sebesar 72,03 persen tercatat sebagai APM SM tertinggi, sedangkan terendah adalah Kabupaten Sleman dengan nilai APM SM sebesar 56,91 persen.

Tabel 3.14. Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Kabupaten/kota dan Jenis Kelamin, 2013

Kabupaten/ kota	SD			SMP			SM		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kulon Progo	93.18	88.63	90.50	73.84	67.35	70.84	66.29	79.80	72.03
Bantul	99.32	97.88	98.63	63.70	77.14	70.00	68.30	61.47	65.09
Gunung Kidul	94.54	92.66	93.67	69.96	75.99	73.04	71.71	58.05	65.18
Sleman	99.09	97.13	98.21	78.12	70.62	74.30	65.01	49.84	56.91
Yogyakarta	92.00	93.38	92.64	69.33	82.81	75.78	67.14	71.93	69.73
DI Yogyakarta	97.06	94.91	96.03	70.88	74.48	72.64	67.60	60.39	64.02

Sumber : BPS Provinsi DIY, Susenas 2013 diolah

3.7. Kemiskinan

Secara umum kemiskinan didefinisikan sebagai suatu kondisi kehidupan dimana terdapat sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum (*basic needs*) dan mereka hidup di bawah tingkat kebutuhan minimum tersebut (Todaro dan Smith, 2007). Konsep yang dipakai BPS dalam mengukur kemiskinan juga berdasarkan kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Nilai kebutuhan dasar minimum digambarkan dengan garis kemiskinan (GK), yaitu batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan, yang memisahkan seseorang tergolong miskin atau tidak.

Garis kemiskinan pada Maret 2014 adalah Rp.313.452,-per kapita per bulan. Jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2013 yang garis kemiskinannya sebesar Rp.283.454,- per kapita per bulan, terjadi kenaikan sebesar 10,58 persen dan jika dibandingkan dengan kondisi September 2013 yang besarnya Rp 303.843,- per kapita per bulan, maka tampak adanya kenaikan garis kemiskinan sebesar 3,16 persen. Terjadinya peningkatan garis kemiskinan ini sejalan dengan terjadinya inflasi Maret 2013 ke Maret 2014 yang sebesar 6,16 persen.

**Tabel 3.15. Garis Kemiskinan menurut Tipe Daerah
Maret 2013 - Maret 2014**

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
<u>Perkotaan</u>			
Mar 2013	206 534	90 856	397 391
Sept 2013	222 466	95 459	317 925
Maret 2014	227 691	99 582	327 273
<u>Perdesaan</u>			
Mar 2013	193 711	62 847	256 558
Sept 2013	231 359	62 427	275 786
Maret 2014	220 412	65 724	286 137
<u>Kota+Desa</u>			
Sept 2013	202 158	81 296	283 454
Sept 2013	219 422	84 421	303 843
Maret 2014	225 245	88 207	313 452

Sumber: BPS Provinsi DIY, Susenas Maret 2013, September 2013, dan Maret 2014

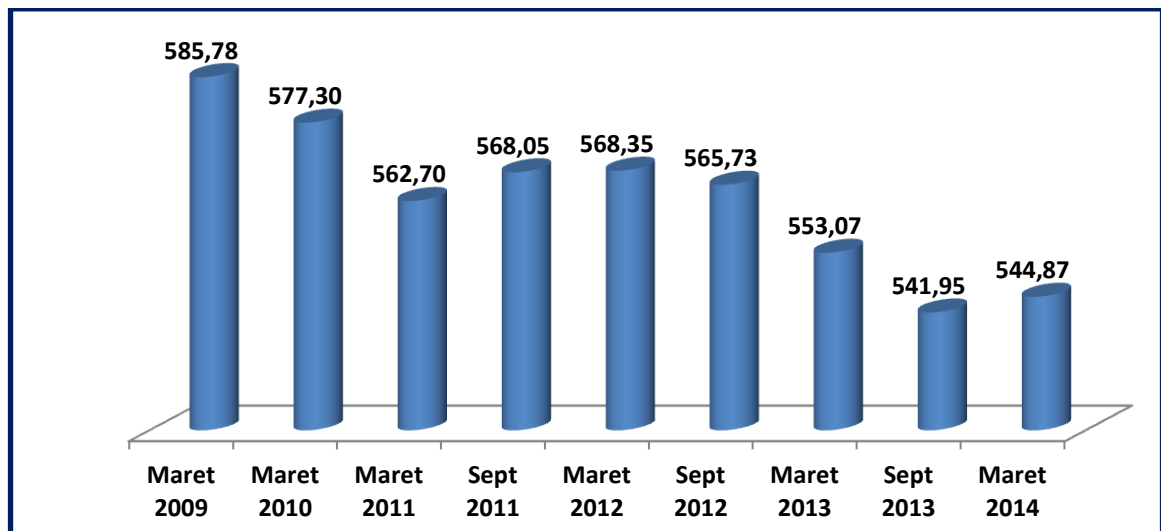
Bila dilihat komponen Garis Kemiskinan (GK) yang terdiri atas Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada

Maret 2014 sumbangan GKM terhadap GK sebesar 69,57 persen dan 71,32 persen pada Maret 2013.

Pada Maret 2014 garis kemiskinan di daerah perkotaan sebesar Rp 327.273,- per kapita per bulan, mengalami kenaikan 10,05 persen dibanding keadaan Maret 2013 yang sebesar Rp 297.391,- per kapita per bulan. Garis kemiskinan di daerah perdesaan pada Maret 2014 sebesar Rp 286.137,- per kapita per bulan, mengalami kenaikan 11,53 persen dibanding keadaan Maret 2013 yang mencapai Rp 256.558,- per kapita per bulan.

3.7.1. Perkembangan Penduduk Miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta

**Gambar 3.7. Jumlah Penduduk Miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta
Maret 2009 - Maret 2014 (dalam ribu orang)**



Sumber: BPS Provinsi DIY, Susenas Maret 2009- Maret 2014

Jumlah penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode Maret 2009-Maret2014 mengalami fluktuasi, meskipun ada kecenderungan menurun. Periode Maret 2009-Maret 2011, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan,

namun meningkat kembali pada September 2011- Maret 2012. Selanjutnya pada kondisi Maret 2012 – Maret 2014 jumlah penduduk miskin cenderung menurun. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2012 tercatat 568,35 ribu orang dan turun menjadi menjadi 544,87 ribu pada bulan Maret 2014. Perkembangan jumlah penduduk miskin diperlihatkan oleh Gambar 3.7.

Penduduk miskin tersebar di perkotaan (61,12 persen) maupun perdesaan (68,88 persen). Jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2014 sebanyak 333,03 ribu orang, bertambah bila dibandingkan keadaan Maret 2013 yang mencapai 317,12 ribu orang. Jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2014 sebanyak 211,84 ribu orang, mengalami penurunan dari keadaan Maret 2013 yang jumlahnya mencapai 235,95 ribu orang.

Tabel 3.16. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin menurut Tipe Daerah, Maret 2013 - Maret 2014

Daerah/Tahun	Jumlah penduduk miskin (000)	Persentase penduduk miskin
<u>Perkotaan</u>		
Maret 2013	317,12	13,43
Sept 2013	329,65	13,73
Maret 2014	333,03	13,81
<u>Perdesaan</u>		
Maret 2013	235,95	19,29
Sept 2013	212,30	17,62
Maret 2014	211,84	17,36
<u>Kota+Desa</u>		
Maret 2013	553,07	15,43
Sept 2013	541,95	15,03
Maret 2014	544,87	15,00

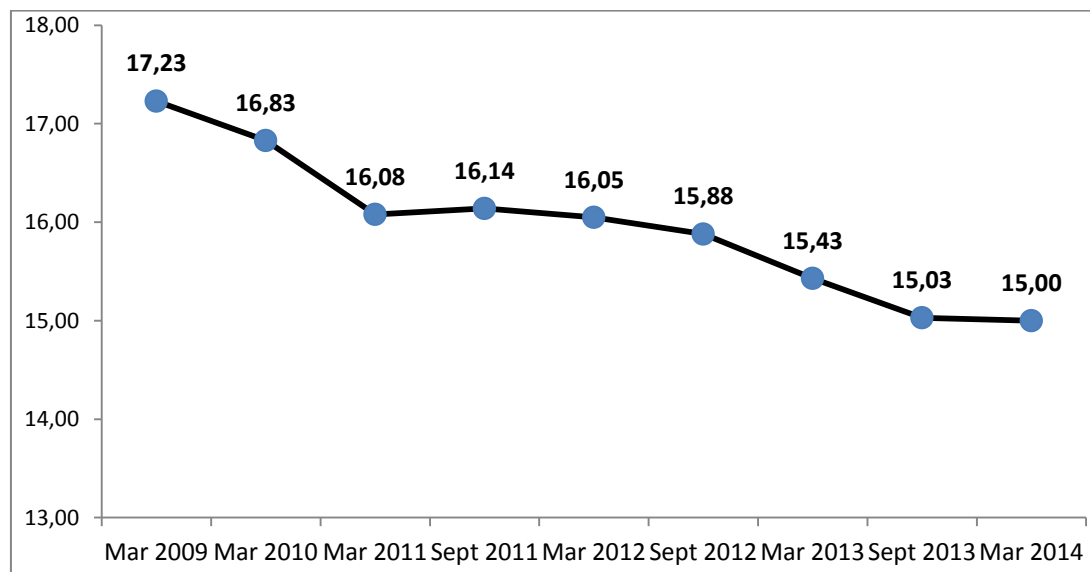
Sumber: BPS Provinsi DIY, Susenas Maret 2013, September 2013, dan Maret 2014

3.7.2. Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode Maret 2009-Maret 2014 cenderung mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin pada Maret 2009 sebesar 17,23 persen, turun menjadi 15,00 persen pada Maret 2014. Perkembangan angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta selengkapnya seperti terlihat pada Gambar 3.8.

Tingkat kemiskinan di daerah perkotaan lebih kecil daripada di perdesaan. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2014 sebesar 13,81 persen mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan keadaan Maret 2013 yang besarnya mencapai 13,43 persen. Persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2014 adalah 17,36 persen, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan keadaan Maret 2013 yang besarnya mencapai 19,29 persen.

**Gambar 3.8. Persentase Penduduk Miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta
Maret 2009- Maret 2014**



Sumber: BPS Provinsi DIY, Susenas Maret 2009- Maret 2014

3.7.3. Kualitas Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Persoalan kemiskinan bukan hanya berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman (*poverty gap index*) dan tingkat keparahan (*poverty severity index*) dari kemiskinan. Artinya, selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan berkaitan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan itu.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P_2) pada periode Maret 2013- Maret 2014 cenderung mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan tercatat 2,40 pada keadaan Maret 2013 menjadi 2,19 pada keadaan Maret 2014. Demikian pula Indeks Keparahannya Kemiskinan turun dari 0,55 menjadi 0,48 pada periode yang sama (Tabel 3.17). Nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin juga semakin menyempit.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P_2) pada Maret 2014 di daerah perkotaan lebih tinggi dari pada perdesaan. Pada bulan Maret 2014 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) untuk perkotaan 2,22, sementara di daerah perdesaan 2,11. Indeks Keparahannya Kemiskinan (P_2) di daerah perkotaan 0,53 sementara di daerah perdesaan mencapai 0,40. Hal ini berarti rata-rata defisit pengeluaran konsumsi penduduk miskin terhadap garis kemiskinan di perdesaan lebih kecil dibandingkan defisit di perkotaan. Kesenjangan pengeluaran konsumsi

antar penduduk miskin di daerah perdesaan juga lebih sempit dibandingkan dengan di daerah perkotaan.

Tabel 3.17. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahana Kemiskinan (P_2) di Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Daerah, Maret 2013-Maret 2014

Tahun	Kota	Desa	Kota + Desa
<u>Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1)</u>			
Maret 2013	2,08	3,02	2,40
September 2013	2,18	2,04	2,13
Maret 2014	2,22	2,11	2,19
<u>Indeks Keparahana Kemiskinan (P_2)</u>			
Maret 2013	0,50	0,63	0,55
September 2013	0,52	0,34	0,46
Maret 2014	0,53	0,40	0,48

Sumber: BPS Provinsi DIY, Susenas Maret 2013, September 2013, dan Maret 2014

Model pembangunan manusia telah menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan yang berarti bahwa pembangunan yang dilaksanakan adalah dari rakyat (*of people*), untuk rakyat (*for people*), dan oleh rakyat (*by people*). Pembangunan dari rakyat mengandung makna pemberdayaan yaitu peningkatan kapabilitas melalui pendidikan, pelatihan, pemeliharaan kesehatan yang lebih baik, perumahan layak huni, dan perbaikan gizi. Pembangunan untuk rakyat berarti hasil pembangunan benar-benar diterima semua rakyat secara adil, buah pertumbuhan ekonomi harus terlihat pada kehidupan rakyat sehari-hari, tidak terjadi ketimpangan dalam masyarakat. Proses ini biasanya tidak secara otomatis tampak, akan tetapi memerlukan waktu serta manajemen kebijakan yang hati-hati. Pembangunan oleh rakyat berarti rakyat harus benar-benar ikut mengambil bagian dan berperan aktif dalam pembangunan, bukan sebagai penonton dan penerima hasil pembangunan. Dengan berperan aktif berarti ikut serta berkontribusi dalam pengambilan keputusan yang pada akhirnya akan mempengaruhi kehidupannya.

Dua hal yang ditekankan pada konsep pembangunan manusia, yaitu peningkatan kapabilitas atau pemberdayaan, dan penciptaan peluang. Antara kapabilitas dan peluang harusimbang. Bila kapabilitas berhasil ditingkatkan melalui pembangunan SDM namun tidak ada peluang, atau sebaliknya bila peluang telah tercipta tapi tidak ditopang oleh kemampuan SDM maka akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik.

IPM dapat digunakan sebagai ukuran kebijakan dan upaya yang dilakukan

dalam kerangka pembangunan manusia khususnya upaya pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan partisipasi dalam pembangunan. Namun indeks ini hanya akan memberikan gambaran perbandingan antar waktu dan perbandingan antar wilayah. IPM menjadi data yang sangat strategis dewasa ini karena selain banyak dibutuhkan sebagai rujukan dari berbagai kalangan untuk penentuan kebijakan juga merupakan semacam “*raport*” bagi kinerja pembangunan masing-masing daerah dalam pembangunan manusia di wilayah.

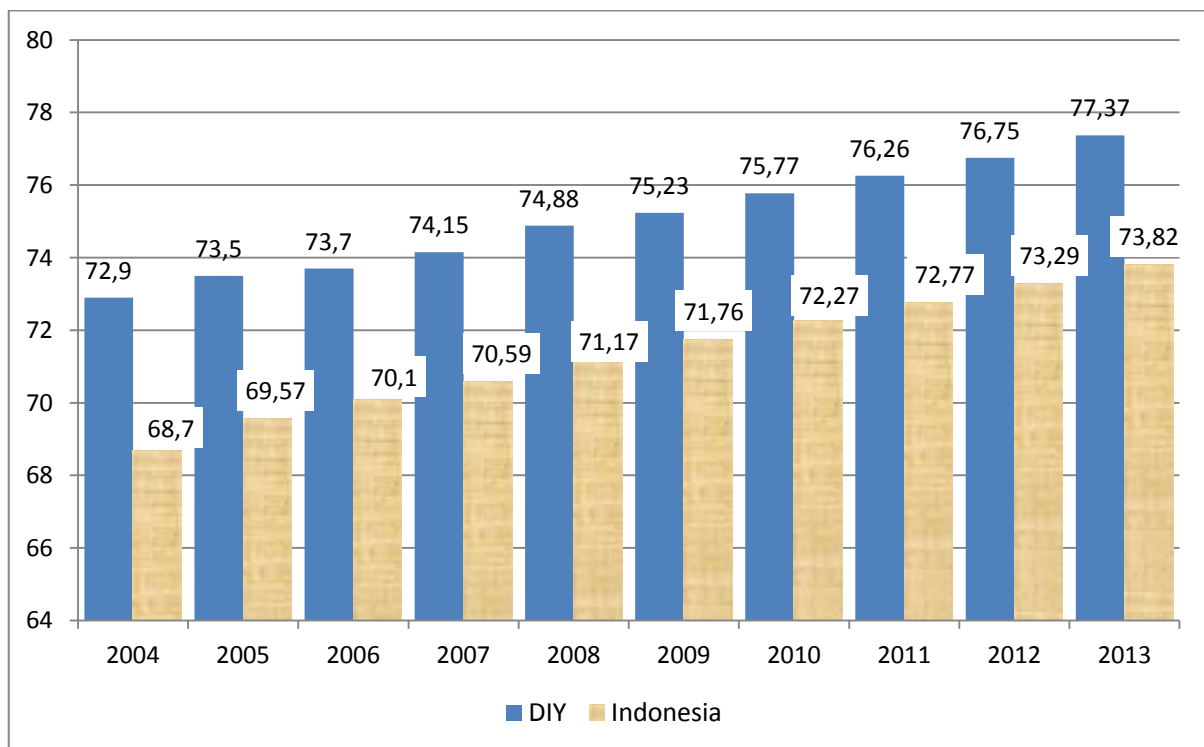
IPM merupakan suatu jawaban untuk menilai tingkat kinerja pembangunan manusia secara keseluruhan dari tingkat pencapaian pembangunan manusia. Indikator ini juga secara mudah dapat memberikan posisi kinerja pembangunan (output pembangunan) yang dicapai oleh suatu daerah. Makin tinggi nilai IPM suatu daerah, makin tinggi pula tingkat kinerja pembangunan yang dicapai wilayah tersebut.

4.1. Perkembangan IPM Daerah Istimewa Yogyakarta

Secara umum perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 2004–2013 mengalami peningkatan setiap tahunnya seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 4.1. Indeks Pembangunan Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2004 sekitar 72,90 mengalami peningkatan menjadi 77,37 pada tahun 2013. Posisi IPM Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2004 berada pada peringkat ke 3 (tiga), sedangkan sejak tahun 2005 sampai dengan 2012 pada posisi ke 4 (empat) dari 33 provinsi di Indonesia. Pada tahun 2013 posisi Daerah Istimewa Yogyakarta berada pada peringkat 2 dari 34 provinsi di Indonesia. Posisi pertama adalah DKI Jakarta (tahun 2013 sebesar 78,59).

Hal ini diduga karena adanya kesadaran masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta akan pentingnya kesehatan yang tercermin pada meningkatnya angka harapan hidup, kesadaran akan pentingnya pendidikan yang tercermin pada meningkatnya angka melek huruf, dan daya beli masyarakat yang semakin tinggi. Berdasarkan kriteria United Nations Development Programme (UNDP), nilai IPM kurang atau sama dengan 50 digolongkan rendah, nilai IPM antara 51 sampai dengan 79 (51-79) digolongkan menengah, dan nilai IPM 80 ke atas digolongkan tinggi. Sesuai dengan kriteria tersebut, IPM Daerah Istimewa Yogyakarta tergolong IPM menengah, proses menuju kriteria tinggi, baik dari tahun 2004 sampai tahun 2013.

Gambar 4.1
Perkembangan IPM Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2004– 2013



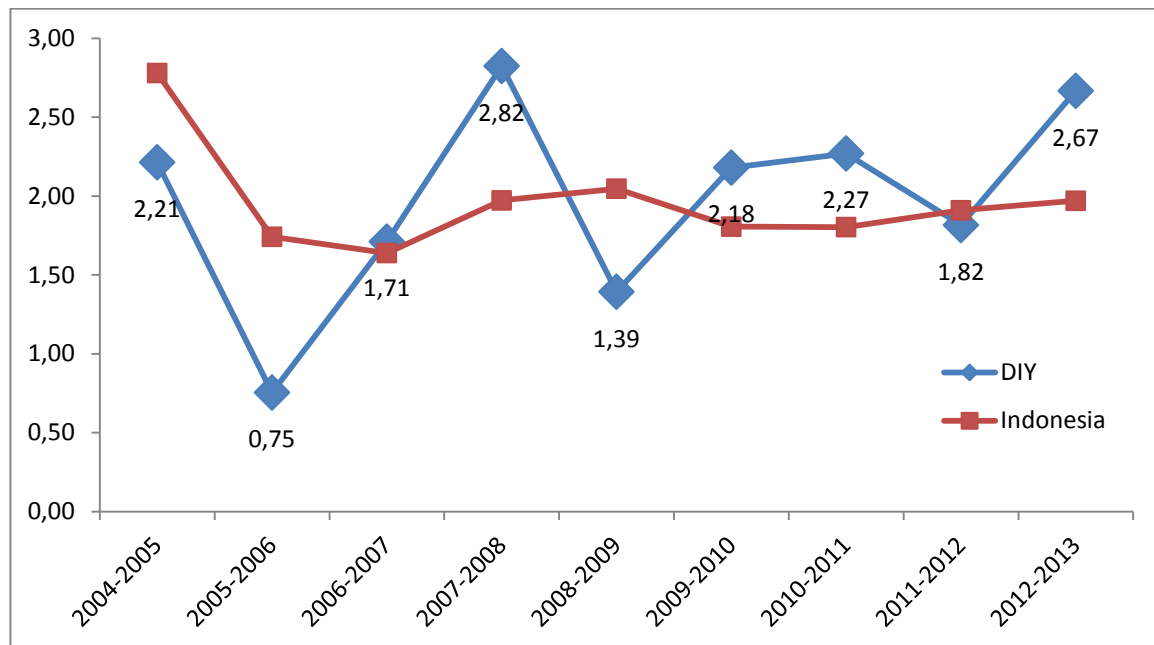
Pembangunan manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kurun waktu tersebut menunjukkan bahwa usaha Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah berada pada jalur yang benar (*on the track*). Perkembangan IPM menunjukkan *trend* yang positif dan cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Usaha meningkatkan kualitas pembangunan manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta memang tidak semudah membalik telapak tangan. Karena investasi dalam pembangunan manusia tidak langsung terwujud seketika namun memerlukan waktu dan *cost* yang panjang dan mahal serta berkesinambungan.

Jika kita memperhatikan secara rinci, pada dasarnya *trend* positif pada besaran IPM di Daerah Istimewa Yogyakarta secara umum menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pada bidang pendidikan, kesehatan dan pendapatan pada masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Tahun 2011 besaran IPM Daerah Istimewa Yogyakarta 76,26 dan meningkat menjadi 76,75 pada tahun 2012 dan kembali meningkat secara signifikan pada tahun 2013 menjadi 77,37.

Selain dilihat dari besaran IPM-nya, pola perkembangan IPM dapat diperhatikan dari nilai idealnya (100) yang direpresentasikan dengan ukuran reduksi *shortfall*. Pola dan perkembangan reduksi *shortfall* IPM Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat dari Gambar 4.2. Perkembangan reduksi *shortfall* IPM Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa *shortfall* berada pada nilai positif yang artinya bahwa dalam periode tersebut IPM semakin mendekat ke arah nilai idealnya. Suatu hal yang menggambarkan bahwa kualitas hidup penduduk pada periode tersebut semakin membaik. Reduksi *shortfall* relatif rendah pada tahun-tahun periode 2005-2006; 2008-2009; 2011-2012 yang memberi indikasi bahwa meski kualitas penduduk sudah

membaik, namun capaian peningkatan kualitas hidup bergerak melambat.

Gambar 4.2
Perkembangan Reduksi *Shortfall* IPM Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2008 - 2013



Pada tahun 2012-2013 perkembangan positif pembangunan manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan dibanding pada periode tahun 2010-2012 yang ditunjukkan dengan naiknya *reduksi shortfall* menjadi 2,67 persen dari semula 2,27 dan 1,82 persen pada tahun 2010-2011 atau 2011-2012. Perkembangan angka IPM yang terlihat lebih fluktuatif dibanding angka IPM nasional yang tampak perubahannya lebih landai. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta menggeliat lebih cepat dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Indeks kesehatan dan pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan indeks pembentuk dari IPM tahun 2013 yang cukup menonjol yaitu mencapai 81,03, kemudian

indeks pendidikan sebesar 82,64, sementara indeks PPP sebesar 68,45.

Perkembangan besaran IPM dapat terjadi karena komponen-komponen pembentuknya juga mengalami perubahan. Perkembangan atau perubahan dapat mengarah pada kenaikan besaran atau penurunan besaran dari masing-masing komponen IPM angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran riil perkapita yang mencerminkan pendapatan. Sedangkan perubahan dari masing-masing komponen tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam makro sosial ekonomi pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Secara teoritis, berdasarkan data *Human Development Index* (HDI) menunjukkan bahwa pada data-data empiris kenaikan angka harapan hidup dalam satu tahun tidak melebihi dari satu tahun. Hal ini berarti bahwa kondisi angka kematian bayi (*infant mortality rate*) merupakan komponen yang bergerak lambat. Demikian halnya di Daerah Istimewa Yogyakarta kenaikan angka harapan hidup berjalan secara perlahan namun pasti.

Untuk rata-rata lama sekolah tergantung dari partisipasi sekolah untuk semua kelompok umur. Yang paling memungkinkan dari komponen-komponen IPM untuk cepat berakselerasi adalah komponen daya beli masyarakat. Namun bukan berarti akselerasi percepatan beberapa komponen-komponen IPM yang berkategori lambat bergerak tidak mungkin dilakukan karena pada beberapa negara di dunia data empiris menunjukkan ada yang dapat berakselerasi dengan cepat. Dibutuhkan perencanaan pembangunan dan sinergi yang baik dari berbagai *stakeholder* pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

4.2. Perkembangan Komponen IPM

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, perkembangan masing-masing komponen IPM akan dibahas secara terpisah untuk memudahkan melihat perkembangan IPM di Daerah Istimewa Yogyakarta.

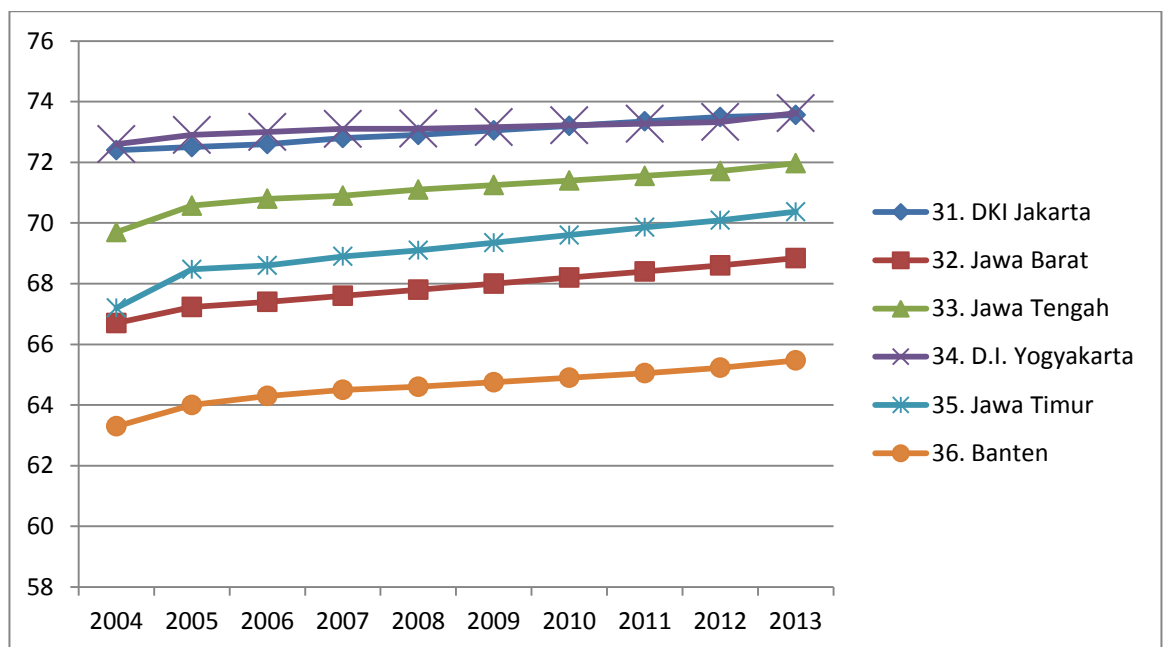
4.2.1 Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup adalah perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang dari lahir selama hidupnya secara rata-rata. Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja pemerintahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan. Angka harapan hidup diharapkan dapat mencerminkan “lama hidup” sekaligus “hidup sehat” seseorang. Dengan semakin panjang harapan hidup seseorang tentunya tidak lepas dari faktor kesehatan yang baik. Usia yang panjang tanpa didukung oleh kesehatan tentunya hanya akan menjadi beban, sehingga membicarakan masalah usia harapan hidup tidak akan terlepas dari upaya peningkatan taraf kesehatan orang itu sendiri. Gambar 4.3 menggambarkan perkembangan angka harapan hidup Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun ke tahun dan perbandingannya dengan provinsi lain di Pulau Jawa.

Angka harapan hidup penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta meningkat secara perlahan sejak tahun 2004. Pada tahun 2004 angka harapan hidup penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 72,60 tahun meningkat tipis menjadi 72,90 tahun pada tahun berikutnya dan pada tahun 2006 angka harapan hidup penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai level 73,00 tahun. Dalam kurun waktu tiga tahun level angka harapan hidup berada pada kisaran usia 73,1 tahun lebih. Pada tahun 2010 angka

harapan hidup “naik kelas” pada level usia 73,2 tahun yakni 73,22 tahun. Sedangkan tahun 2011 angka harapan hidup naik menjadi 73,27 tahun dan meningkat lagi pada tahun 2012 menjadi 73,33 tahun. Keadaan angka harapan hidup Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2013 yang mencapai 73,62 tahun mencerminkan bahwa bayi yang lahir pada tahun 2013 memiliki peluang untuk terus bertahan hidup hingga usia 73,62 tahun. Lebih baik daripada peluang bayi yang lahir pada tahun 2010 yang memiliki peluang untuk dapat bertahan secara rata-rata hingga usia 73,22 tahun. Naiknya usia harapan hidup tidak lepas dari upaya dan kerja keras dinas terkait terutama yang membidangi kesehatan untuk meningkatkan kualitas derajat hidup masyarakat.

Gambar 4.3. Perkembangan Angka Harapan Hidup Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2004-2013



Perbandingan antar provinsi di Pulau Jawa menunjukkan bahwa pola angka harapan hidup antara DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa berada pada kelompok yang berbeda. DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki pola angka harapan hidup yang berbeda dengan provinsi lainnya di Jawa. Kita dapat menyatakan secara tidak langsung bahwa derajat kesehatan di DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta berbeda secara nyata dengan provinsi-provinsi lain di sekitarnya. Kajian sosial ekonomi akan dapat menelaah lebih dalam mengenai pola-pola penyokong indikator angka harapan hidup yang merupakan representasi dari ukuran kesehatan suatu wilayah.

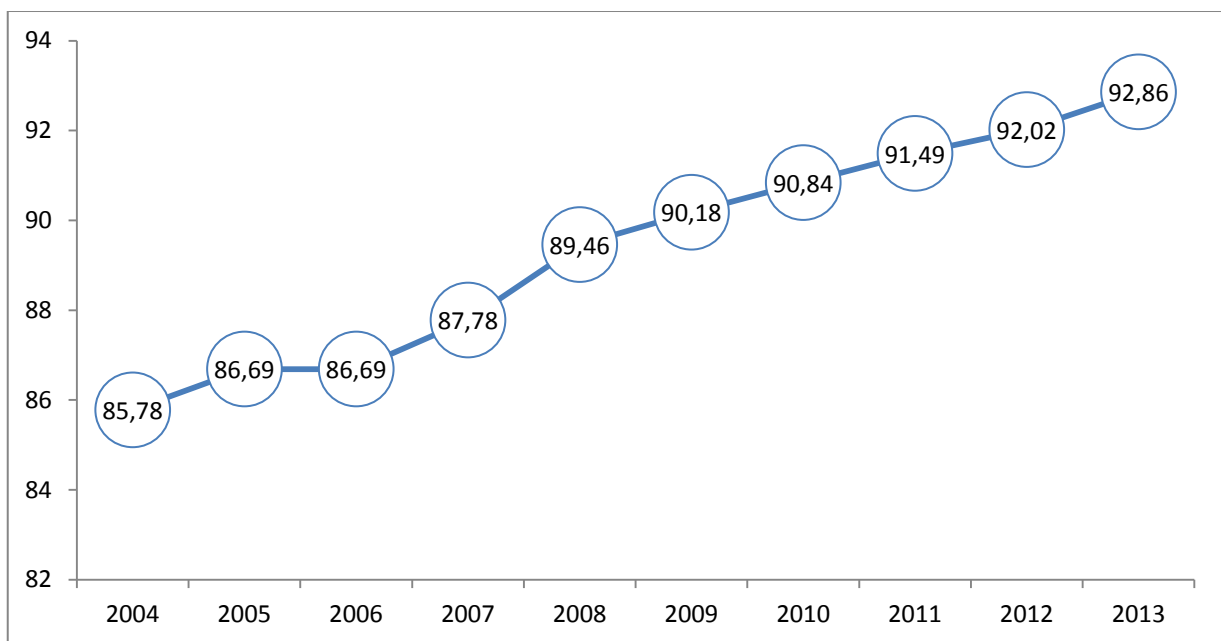
4.2.2 Melek Huruf dan Rata – Rata Lama Sekolah

Indikator pendidikan yang merepresentasikan dimensi pengetahuan dalam IPM adalah angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Kedua indikator ini dapat dimaknai sebagai ukuran kualitas sumber daya manusia. Angka melek huruf menggambarkan persentase penduduk umur 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis. Sementara indikator rata-rata lama sekolah menggambarkan rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal.

Perkembangan angka melek huruf seperti yang nampak dalam Gambar 4.4 menunjukkan perkembangan yang meningkat. Akan tetapi antara tahun 2005 hingga 2006 cenderung stagnan yakni berada di kisaran 86,69 persen. Di tahun 2010 angka melek huruf penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta meningkat menjadi 90,84 persen dan di tahun 2011 meningkat signifikan menjadi 91,49 persen dan meningkat lagi pada

tahun 2013 menjadi 92,86, yang menggambarkan bahwa 92,86 persen penduduk umur 15 tahun ke atas telah dapat membaca dan menulis lebih baik dibandingkan keadaan tahun sebelumnya yang menunjukkan bahwa kinerja pembangunan manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta dari indikator pendidikan meningkat.

Gambar 4.4. Perkembangan Angka Melek Huruf Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004-2013

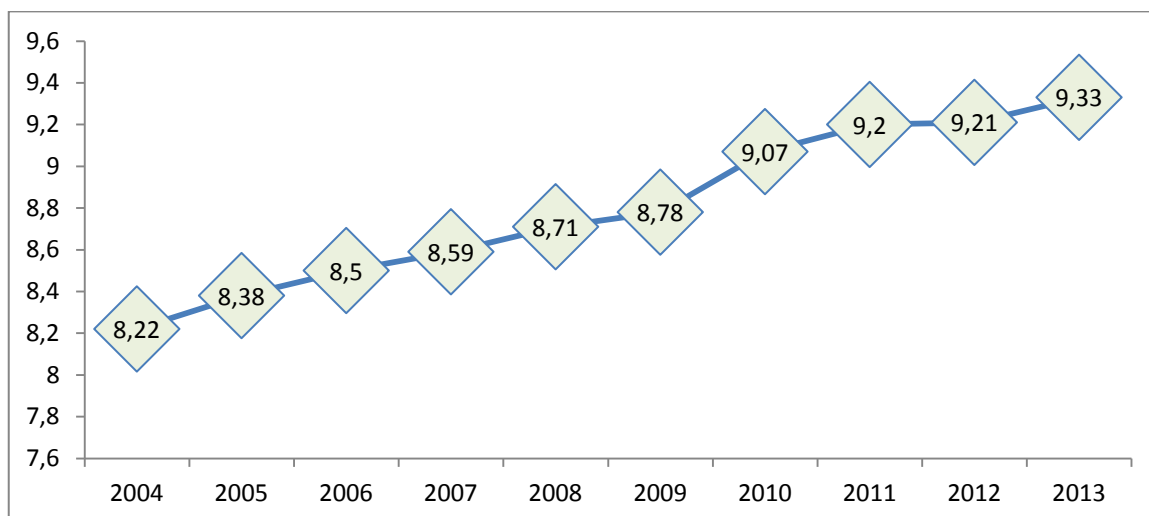


Bila dibandingkan dengan provinsi sekitar di Pulau Jawa persentase melek huruf Daerah Istimewa Yogyakarta berada di bawah angka melek huruf DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten tahun 2012 yang berarti bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta terperosok pada peringkat bawah ranking provinsi se Jawa bila dilihat dari angka melek huruf. Keadaan buta huruf di Daerah Istimewa Yogyakarta setidaknya juga menggambarkan posisi wilayah ini yang lebih baik dibanding Jawa Tengah dan Jawa Timur dalam hal angka buta huruf.

Indikator pendidikan lainnya yang juga merupakan komponen IPM adalah rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013 adalah 9,33 tahun meningkat dari keadaan tahun sebelumnya (9,21 tahun). Kenaikan angka rata-rata lama sekolah di Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2010 ke tahun 2013 memiliki makna khusus yang sangat berarti dalam momentum pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun jika melihat ke belakang, walaupun tingkat pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta sampai tahun 2013 meningkat signifikan, peningkatan tersebut terasa berjalan lambat dan seperti jalan di tempat pada beberapa tahun sebelumnya. Ini bukan berarti tidak ada upaya dari instansi terkait untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta, namun karena memang perbaikan dari sisi kualitas sumber daya manusia tidak se"mewah" hasil dari percepatan sisi ekonomi, dan investasi pendidikan tidak akan langsung menampilkan hasilnya "seketika" namun harus melewati fase yang tidak sebentar.

Akan tetapi setidaknya pengambil kebijakan dapat melihat bahwa capaian rata-rata lama sekolah dikaitkan dengan target UNDP yakni minimal 15 tahun pada tahun 2015 masa pendidikan masih jauh tertinggal. Diperlukan kerja super ekstra dan komitmen yang luar biasa untuk memperpendek jarak ketertinggalan Daerah Istimewa Yogyakarta dari target UNDP, seperti pada Gambar 4.5. Di Daerah Istimewa Yogyakarta capaian rata-rata lama sekolah pada tahun 2013 sekitar 9,33 tahun atau setara dengan lulus SLTP.

**Gambar 4.5. Perkembangan Angka Rata – Rata Lama Sekolah
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004-2013**

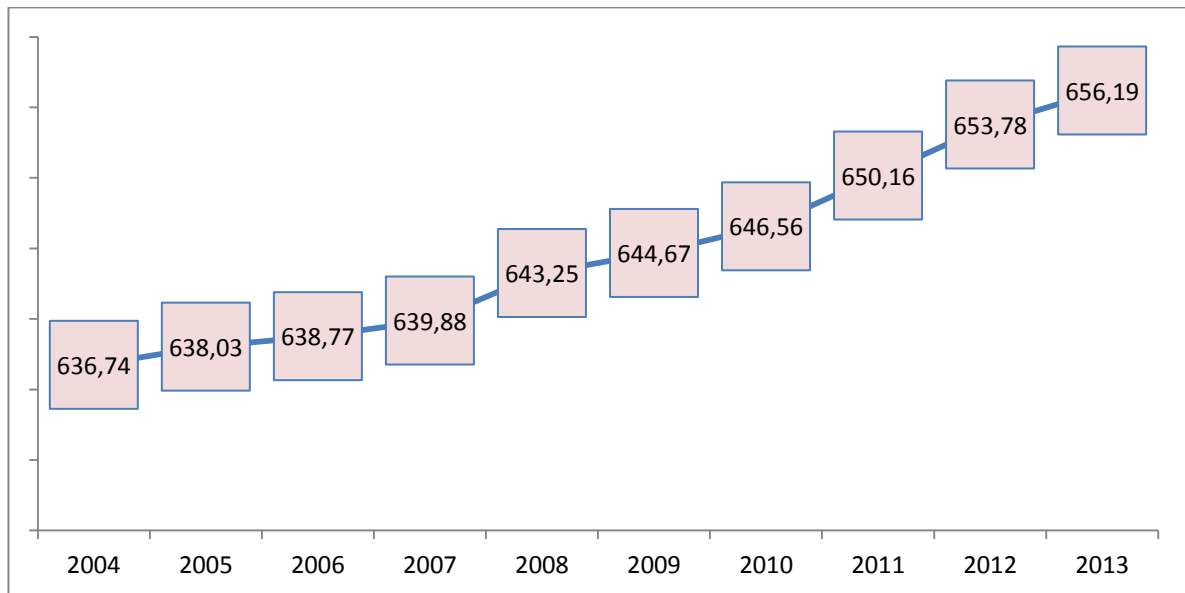


Sumber : BPS Provinsi DIY

4.2.3 Standar Hidup Layak/Daya Beli

Daya beli merupakan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya untuk barang dan jasa. Kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh harga riil antar wilayah karena nilai tukar yang digunakan dapat menurunkan atau menaikkan daya beli. Dengan demikian kemampuan daya beli masyarakat antar satu wilayah dengan wilayah lainnya akan berbeda. Oleh karena itu diperlukan standarisasi agar kemampuan daya beli antar wilayah dapat diperbandingkan. Standarisasi tersebut, misal satu rupiah di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki daya beli yang sama dengan satu rupiah suatu wilayah yang dijadikan patokan, dalam hal ini adalah Jakarta Selatan. Sedemikian sehingga perbedaan kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah dapat dibandingkan.

Gambar 4.6. Perkembangan Daya Beli Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010– 2013



Sumber: BPS Provinsi DIY

Secara umum kemampuan daya beli masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta tercermin dari pengeluaran per kapita yang disesuaikan, sebagaimana yang dapat dilihat pada Gambar 4.6. Gambar tersebut menunjukkan peningkatan daya beli dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut mencerminkan kondisi perekonomian yang terus membaik dan stabil dari tahun ke tahun. Secara perlahan daya beli masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta meningkat dari sekitar 637 ribu rupiah per bulan pada tahun 2014 menjadi 645 ribu rupiah pada tahun 2009. Sementara dari tahun 2010 ke 2011 mengalami peningkatan sekitar tiga ribu rupiah, yaitu 647 ribu rupiah pada tahun 2010 dan menjadi 650 ribu rupiah pada tahun 2011. Sementara pada tahun 2013 daya beli masyarakat sebesar 656 ribu rupiah per bulan.

4.3. Capaian IPM Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Wilayah Lain

Capaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan secara komprehensif tergambar dari angka IPM masing-masing provinsi. Perkembangan angka IPM dari tahun ke tahun memberi indikasi peningkatan atau penurunan kinerja pembangunan manusia setiap tahunnya. Capaian angka IPM akan menentukan urutan (rangking) antar provinsi. Namun demikian, untuk menilai keberhasilan pembangunan manusia tidak hanya dilihat dari posisi rangking saja namun dapat dilihat juga dari besaran reduksi *shortfall*.

Berdasarkan ukuran gabungan tersebut akan dapat dilihat bagaimana akselerasi capaian pembangunan manusia dari tahun ke tahun. Perkembangan pembangunan manusia suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kwadran berdasarkan perbandingan dengan angka IPM dan reduksi *shortfall* rata-rata nasional. Termasuk dalam kelompok Kwadran I bila memiliki IPM lebih tinggi dan akselerasi yang lebih tinggi pula, Kwadran II bila memiliki angka IPM lebih rendah tetapi reduksi *shortfall* lebih rendah. Sementara masuk Kwadran III bila memiliki angka dan reduksi *shortfall* lebih rendah dibanding angka nasional dan termasuk dalam Kwadran IV bila memiliki angka IPM lebih tinggi tetapi reduksi *shortfall*-nya rendah.

Pada tahun 2013 Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki capaian pembangunan manusia dalam kelompok kwadran I atau dapat diartikan memiliki capaian angka IPM yang sudah tinggi dan mempunyai akselerasi atau reduksi *shortfall* yang lebih tinggi dari pada reduksi rata-rata nasional. Dalam kelompok ini selain Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Jambi, Jawa Tengah, Bali, dan Kalimantan Timur. Sedangkan provinsi dengan capaian baik tetapi reduksi *shortfall*-nya rendah atau masuk kwadran

IV adalah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Utara.

Tabel 4.1. Posisi IPM Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Wilayah Lain, Tahun 2013 dan *Reduksi Shortfall* 2012-2013

Kwadran IV	Kwadran I
Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Sumatera Selatan Bengkulu Kep. Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Kalimantan Tengah Sulawesi Utara	Jambi Jawa Tengah D.I. Yogyakarta Bali Kalimantan Timur
Kwadran III	Kwadran II
Aceh Lampung Jawa Barat Banten Nusa Tenggara Timur Sulawesi Tengah Gorontalo Maluku Papua Barat Papua	Jawa Timur Nusa Tenggara Barat Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Sulawesi Barat Maluku Utara

Sumber: BPS

4.4. Variasi IPM antar Kabupaten/Kota

Gambaran perkembangan IPM masing-masing kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada tabel 4.8. Pada tahun 2013 hanya ada 2 kabupaten/kota telah berada pada posisi di atas angka IPM Daerah Istimewa

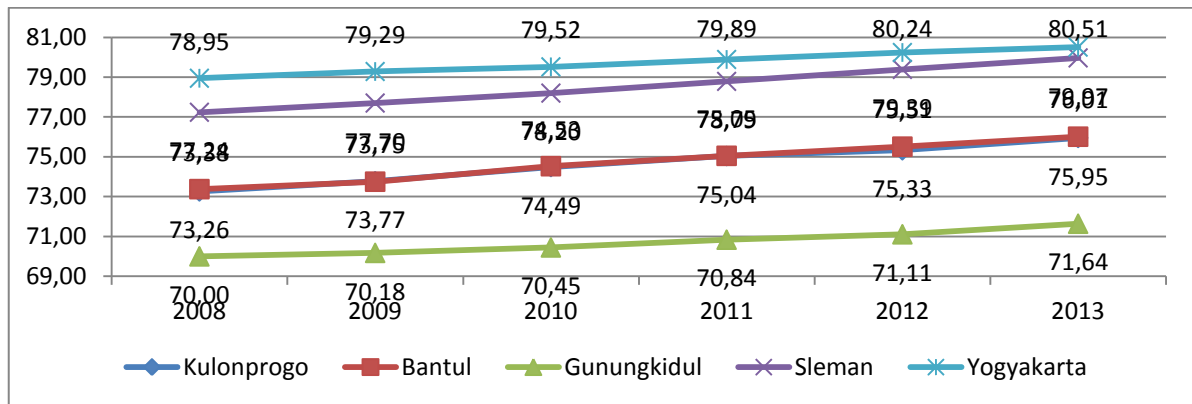
Yogyakarta (77,37). Posisi urutan teratas adalah Kota Yogyakarta (80,51) diikuti Kabupaten Sleman (79,97). Sedangkan angka IPM kabupaten lain lebih rendah dari angka IPM Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Kabupaten Bantul dan Kulonprogo yang memiliki angka IPM berturut-turut 76,01 dan 75,95 tetapi lebih tinggi dari angka IPM nasional. Sementara IPM Kabupaten Gunungkidul di posisi terbawah dengan nilai 71,64 dan berada di bawah angka IPM nasional.

Secara umum kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dikelompokkan menjadi tiga berdasarkan angka IPM. Kelompok pertama Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman dengan angka IPM relatif tinggi. Kelompok kedua Kabupaten Bantul dan Kulonprogo dengan angka IPM menengah, dan kelompok ketiga Kabupaten Gunungkidul yang angka IPM-nya cenderung rendah. Akan tetapi bila digunakan standar UNDP, hanya Kota Yogyakarta yang masuk kategori tinggi, sedangkan kabupaten yang lain termasuk dalam kelompok menengah.

Berbagai upaya telah ditempuh dalam memacu angka IPM baik melalui peningkatan kualitas serta penambahan jumlah sarana maupun pembebasan pungutan biaya untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan dengan berbagai program (BOS, keaksaraan fungsional dan pendidikan luar sekolah, pelayanan kesehatan gratis, dan lain-lain), ataupun pelaksanaan program-program berkelanjutan seperti PKH dan sebagainya. Meskipun di beberapa wilayah dirasa belum optimal pelaksanaan program pembangunan tersebut, masih dibutuhkan perhatian yang lebih intensif lagi guna mempertajam hasil yang ingin dicapai. Sedangkan pada komponen daya beli sendiri pengaruh kondisi pasar nasional maupun regional serta stabilitas ekonomi mempunyai pengaruh yang cukup besar

walaupun pemerintah daerah telah melakukan intervensi. Pada tahun 2013 PDRB di D.I. Yogyakarta tumbuh sekitar 5,40 persen dibanding tahun 2012. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2009 yang hanya tumbuh sekitar 5,32 persen.

Gambar 4.7. Perkembangan IPM Menurut Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2008-2013



Tabel 4.2. Reduksi *shortfall* IPM Kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2008-2013

No	Kabupaten/kota	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	Kulonprogo	1,88	2,74	2,16	1,16	2,50
02	Bantul	1,40	2,96	2,04	1,84	2,04
03	Gunungkidul	0,58	0,93	1,32	0,93	1,82
04	Sleman	2,05	2,21	2,71	2,83	2,80
71	Yogyakarta	1,61	1,12	1,81	1,74	1,38
34	D.I. Yogyakarta	1,39	2,18	2,27	1,82	2,67

Bila diperhatikan dari nilai reduksi *shortfall* perkembangan IPM kabupaten/kota pada periode 2008-2013 tampak bahwa nilai reduksi *shortfall* yang selalu di atas dua persen terjadi di Kabupaten Sleman. Sementara di Kabupaten Kulonprogo dan Bantul reduksi *shortfall* di atas dua persen terjadi pada periode 2009-2010, 2010-2011, dan 2012-2013. Untuk Kota Yogyakarta dan Kabupaten Gunungkidul nilai reduksi *shortfall* pada periode tersebut tidak pernah di atas dua persen.

Ketika terjadi pergeseran paradigma pembangunan dari pembangunan yang berorientasi ekonomi (pertumbuhan ekonomi, kebutuhan dasar, kesejahteraan masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia) kepada pembangunan yang berorientasi manusia maka terjadi pergeseran pusat perhatian pembangunan dari yang bersifat fisik kepada manusia. Ketika manusia menjadi titik sentral pembangunan maka secara otomatis manusia tidak hanya menjadi objek pembangunan tetapi juga menjadi subjek pembangunan dalam setiap tahap pembangunan.

Pembangunan sesungguhnya adalah tentang penduduk (berupa pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial), untuk penduduk (berupa penciptaan peluang kerja melalui perluasan pertumbuhan ekonomi) dan oleh penduduk (berupa upaya pemberdayaan penduduk dalam partisipasi politik dan pembangunan). Keberhasilan pembangunan manusia pada akhirnya akan menentukan keberhasilan pembangunan secara keseluruhan.

Untuk mengukur pencapaian keberhasilan pembangunan manusia dimanifestasikan dalam bentuk indeks pembangunan manusia (IPM) yang merupakan pengukuran perbandingan nilai harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup layak. IPM dapat digunakan untuk mengklasifikasikan apakah suatu wilayah dikategorikan maju, berkembang, atau terbelakang, dan digunakan untuk mengukur pengaruh dari kebijakan pembangunan terhadap kualitas hidup.

Untuk lebih melengkapi penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013 ini maka disajikan angka IPM per kecamatan. Angka IPM yang disajikan adalah keadaan tahun 2010 dan tahun 2013 untuk dapat memberi gambaran disparitas pembangunan manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta.

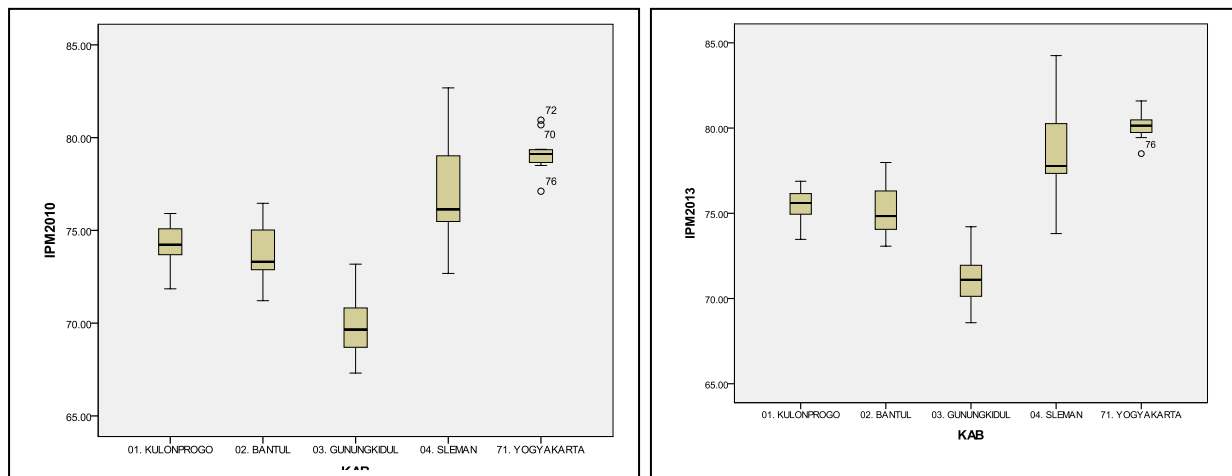
5.1. Indeks Pembangunan Manusia Tingkat Kecamatan

Indeks Pembangunan Manusia mengukur capaian secara umum dari proses pembangunan manusia dengan indikator yang dilihat berdasarkan dimensi kesehatan, pendidikan, dan ekonominya. Masing-masing dari dimensi tersebut memiliki ukurannya masing-masing. Seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, nilai IPM Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2013 sebesar 77,37. Nilai ini meningkat jika dibandingkan tahun 2010 yang sebesar 75,77. Hal ini bisa diartikan bahwa pembangunan manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan. Nilai IPM bervariasi antar kecamatan.

Gambaran variasi IPM masing-masing kecamatan di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada gambar 5.1. Sebaran IPM di hampir semua kabupaten/kota relatif homogen, kecuali di kabupaten Sleman yang tampak sebaran IPM-nya relatif beragam dengan ditunjukkan oleh gambar “dahan” atau “ekor” yang cukup panjang. Hal ini mengindikasikan bahwa IPM di empat daerah lain tidak beragam, atau menunjukkan bahwa pembangunan manusia di wilayah tersebut relatif merata. Hanya saja masalahnya homogen di angka IPM yang rendah atau nilai yang tinggi. Bila homogen di angka IPM yang rendah maka perlu diperhatikan dalam pengembangan pembangunan manusia di masa selanjutnya. Sementara di Kabupaten Sleman mengindikasikan kualitas

pembangunan manusianya relatif berbeda. Pada tahun 2013 IPM di Kecamatan Depok mencapai 84,25 sementara di Kecamatan Prambanan sekitar 73,81, walaupun secara umum pembangunan manusia di Kabupaten Sleman relatif baik bila dibandingkan kabupaten/kota lain di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Gambar 5.1. Variasi IPM menurut Kecamatan se Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2013



Sumber: BPS Provinsi DIY

Capaian IPM tertinggi terdapat di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, pada tahun 2013 mencapai poin 84,25 yang relatif konsisten pada posisi teratas dengan kondisi pada tahun 2010. Posisi berikutnya pada tahun 2013 adalah Kecamatan Ngaglik dan Gondokusuman dengan nilai IPM masing-masing secara berurutan 81,89 dan 81,59. Sementara itu yang mengejutkan adalah capaian pembangunan manusia di posisi ke-empat yaitu Kecamatan Pakualaman (81,46 poin) mengungguli Kecamatan Danurejan, Umbulharjo, dan Mergangsan yang memiliki capaian IPM masing-masing secara berturut-turut sebesar 80,52; 80,48; dan 80,38 poin di Kota Yogyakarta, atau Kecamatan Kalasan (81,17), Mlati (80,37), serta Kecamatan Ngemplak dengan angka IPM sebesar 80,26 poin di Kabupaten Sleman.

Sementara itu tiga kecamatan terendah capaian pembangunan manusianya tahun 2013 dibandingkan kecamatan lain adalah Kecamatan Girisubo (69,72), Saptosari (68,89), dan Gedangsari (68,58) Kabupaten Gunungkidul. Sementara kecamatan lain dengan nilai IPM yang masuk 10 Terendah lainnya juga terdapat di Kabupaten Gunungkidul yaitu Tanjungsari, Tepus, Paliyan, Purwosari, Ngawen, dan Panggang.

Tabel 5.1 IPM Kecamatan dengan Urutan 10 Tertinggi dan Terendah di Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2010-2013

10 Tertinggi 2013

NO	KAB/KOTA	KECAMATAN	IPM 2010	IPM 2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sleman	Depok	82.68	84.25
2	Sleman	Ngaglik	79.81	81.89
3	Yogyakarta	Gondokusuman	80.69	81.59
4	Yogyakarta	Pakualaman	80.94	81.46
5	Sleman	Kalasan	79.32	81.17
6	Yogyakarta	Danurejan	79.37	80.52
7	Yogyakarta	Umbulharjo	79.35	80.48
8	Yogyakarta	Mergangsan	79.22	80.38
9	Sleman	Mlati	79.02	80.37
10	Sleman	Ngemplak	79.17	80.26

10 Terendah 2013

NO	KAB/KOTA	KECAMATAN	IPM 2010	IPM 2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Gunungkidul	Tanjungsari	70.13	71.23
2	Gunungkidul	Tepus	69.79	70.98
3	Gunungkidul	Paliyan	68.70	70.52
4	Gunungkidul	Purwosari	68.98	70.51
5	Gunungkidul	Ngawen	69.12	70.29
6	Gunungkidul	Panggang	69.20	70.13
7	Gunungkidul	Nglipar	68.10	70.05
8	Gunungkidul	Girisubo	68.31	69.72
9	Gunungkidul	Saptosari	67.61	68.89
10	Gunungkidul	Gedangsari	67.31	68.58

Sumber: BPS Provinsi DIY

Disparitas capaian IPM antara kecamatan yang memiliki capaian IPM tertinggi (Kecamatan Depok) dan yang terendah (Kecamatan Gedangsari) relatif cukup besar yakni 15,54 poin. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan pembangunan manusia antar wilayah kecamatan. Jika kita membagi wilayah kecamatan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi tiga bagian yakni menurut disparitas rentang nilai IPM, maka disparitas di Kabupaten Kulonprogo dan Kota Yogyakarta relatif kecil yaitu masing-masing secara berurutan sebesar 3,41 dan 3,09 poin. Di Kabupaten Kulonprogo kecamatan dengan angka IPM tertinggi tahun 2013 adalah Kecamatan Wates (76,88) dan terendah Kecamatan Kokap (73,47). Sementara di Kota Yogyakarta IPM tertinggi di Kecamatan Gondokusuman (81,59) dan terendah di Kecamatan Gedongtengen (78,50). Rentang menengah IPM kecamatan di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki disparitas sekitar 4,91 dan 5,63 poin terjadi di Kabupaten Bantul dan Gunungkidul. Kecamatan Kasihan dan Wonosari dengan angka IPM tertinggi di kedua kabupaten ini sedangkan skor terendah di Kecamatan Dlingo dan Gedangsari. Wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki disparitas pembangunan manusia tertinggi yaitu sebesar 10,44 poin terdapat di Kabupaten Sleman dengan Kecamatan Depok memiliki nilai IPM tertinggi dan Kecamatan Prambanan yang terendah.

Kecamatan Depok yang merupakan kecamatan dengan pembangunan manusia peringkat pertama di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki keunggulan di ketiga khususnya indeks kesehatan yaitu umur harapan hidup. Indikator tersebut berada di peringkat pertama, sedangkan untuk indeks lain pada posisi 10 tertinggi. Dimensi kesehatan di Kecamatan Depok merupakan dimensi yang paling dominan dibandingkan dengan dimensi pembangunan manusia lainnya.

Selain melihat peringkat atau rangking, capaian IPM di kecamatan dapat juga dilihat dari besaran *reduksi shortfall*-nya. Besaran *reduksi shortfall* menggambarkan seberapa besar akselerasi capaian pembangunan manusia dalam tiga tahun (tahun 2013 berbanding 2010). Akselerasi tertinggi pembangunan manusia secara umum berada di Kecamatan Ngaglik, diikuti Kecamatan Depok, Kalasan, Godean, dan Pakem di Kabupaten Sleman, serta Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul yang memiliki nilai reduksi 2 persen atau lebih. Sehingga sangat wajar dengan akselerasi pembangunan manusia yang relatif tinggi Kecamatan Ngaglik mampu menggeser peringkat Kecamatan Gondokusuman atau Pakualaman di Kota Yogyakarta, dengan kata lain Kecamatan Ngaglik mampu naik dua peringkat dibandingkan tiga tahun sebelumnya. Besaran rata-rata *reduksi shortfall* dari Kecamatan Ngaglik dalam periode 2010-2013 mencapai 2,18 persen per tahun. Kecamatan Depok, Kalasan, dan Godean juga memiliki *reduksi shortfall* sangat tinggi, yaitu berturut-turut 2,09; 2,07 dan 2,07 persen. Hal ini cukup wajar oleh karena bangkitnya wilayah ini akibat perkembangan yang cepat untuk tempat tinggal dan fasilitas pendidikan atau kesehatan. Selain itu Kecamatan Depok yang memiliki IPM tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta juga masih mengalami peningkatan nilai IPM yang relatif tinggi dengan *reduksi shortfall* sebesar 2,09 persen.

Kecamatan Panggang, Tanjungsari, Ngawen, dan Gedangsari di Kabupaten Gunungkidul merupakan kecamatan yang memiliki capaian IPM 10 terendah dibandingkan dengan kecamatan lainnya, sayangnya *reduksi shortfall* juga tidak menunjukkan indikasi menggembirakan bahkan cenderung lebih rendah dibandingkan capaian *reduksi shortfall* kecamatan lain. Sementara Kecamatan Pakualaman memiliki *reduksi shortfall* paling rendah, yaitu hanya 1,40 persen pada periode 2010-2013.

Tabel 5.2. *Reduksi Shortfall* IPM Kecamatan dengan Urutan 10 Tertinggi dan Terendah di Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2010-2013

10 Tertinggi 2013

NO	KAB/KOTA	KECAMATAN	<i>Reduksi Shortfall</i> 2010-2013
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sleman	Ngaglik	2.18
2	Sleman	Depok	2.09
3	Sleman	Kalasan	2.07
4	Sleman	Godean	2.07
5	Sleman	Pakem	2.05
6	Bantul	Sewon	2.00
7	Sleman	Moyudan	1.97
8	Sleman	Minggir	1.97
9	Sleman	Tempel	1.97
10	Sleman	Seyegan	1.95

10 Terendah 2013

NO	KAB/KOTA	KECAMATAN	<i>Reduksi Shortfall</i> 2010-2013
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Gunungkidul	Gedangsari	1.57
2	Kulonprogo	Girimulyo	1.56
3	Gunungkidul	Wonosari	1.56
4	Gunungkidul	Ngawen	1.56
5	Gunungkidul	Tanjungsari	1.55
6	Bantul	Kretek	1.53
7	Gunungkidul	Rongkop	1.48
8	Bantul	Pandak	1.46
9	Gunungkidul	Panggung	1.45
10	Yogyakarta	Pakualaman	1.40

Sumber: BPS Provinsi DIY

Berdasarkan skala internasional dan BPS-Bappenas, status pembangunan manusia dikategorikan menjadi empat bagian. Bagian pertama adalah kategori tinggi ($IPM \geq 80$), kategori menengah atas ($66 \leq IPM < 80$), kategori menengah bawah ($50 \leq IPM < 66$) dan kategori rendah ($IPM < 50$). Menurut skala ini, terdapat 15 (lima belas) kecamatan yakni 5 (lima) kecamatan di Kabupaten Sleman dan 10 (sepuluh)

kecamatan di Kota Yogyakarta yang masuk dalam kategori pencapaian IPM tinggi. Sedangkan selebihnya termasuk seluruh kecamatan di Kulonprogo, Bantul, Gunungkidul (63 kecamatan) termasuk dalam kecamatan dengan status capaian pembangunan manusianya menengah ke atas. Namun yang patut disyukuri adalah tidak satupun kecamatan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terkategori dalam status pembangunan manusia yang rendah atau menengah bawah. Kemajuan IPM yang dicapai serta kemampuan kecepatan dalam reduksi *shortfall* hingga mencapai titik ideal sesungguhnya sangat tergantung dari komitmen pemerintah daerah sendiri untuk dapat meningkatkan kapasitas dasar penduduk dengan memperlebar pilihan-pilihan mereka yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup.

Jika kita melihat dalam dua aspek tinjauan IPM yakni nilai dan capaian reduksi *shortfall* pada masing-masing kecamatan di Daerah Istimewa Yogyakarta, maka dapat kita simak dalam gambar 5.2. Amatan dapat dipisahkan menjadi empat kwadran yang berbeda.

Kecamatan yang tergabung dalam kwadran pertama yakni Kecamatan Moyudan, Seyegan, Godean, Gamping, Depok, Berbah, Kalasan, Ngaglik, dan Pakem. Kecamatan-kecamatan ini memiliki IPM dan reduksi *shortfall* di atas median (dalam hal ini digunakan angka IPM dan reduksi *shortfall* Daerah Istimewa Yogyakarta). Kecamatan-kecamatan yang tergabung dalam kelompok ini memiliki nilai IPM tinggi sekaligus memiliki kecepatan akselerasi yang tinggi juga.

Kecamatan yang tergabung dalam kwadran kedua adalah Kecamatan Sanden, Sewon, Sedayu, Minggir, dan Tempel. Kecamatan yang tergabung dalam kwadran ini memiliki peringkat capaian IPM tergolong rendah namun *reduksi shortfall*-nya cukup

tinggi. Hal ini terbukti dengan naik peringkat-nya Kecamatan Sanden dua tingkat di Kabupaten Bantul.

Gambar 5.2.
Kwadran IPM dan Reduksi *Shortfall* Menurut Kecamatan

Kwadran IV		Angka IPM	Kwadran I
	Banguntapan	Kotagede	Moyudan
	Kasih	Gondokusuman	Seyegan
	Mlati	Danurejan	Godean
	Ngemplak	Pakualaman	Gamping
	Sleman	Gondomanan	Depok
	Mantrijeron	Ngampilan	Berbah
	Kraton	Wirobrajan	Kalasan
	Mergangsan	Gedong Tengen	Ngaglik
	Umbulharjo	Jetis	Pakem
		Tegalrejo	Reduksi shortfall
	Temon	Pajangan	
	Wates	Panggang	Sanden
	Panjatan	Purwosari	Sewon
	Galur	Paliyan	Sedayu
	Lendah	Saptosari	Minggir
	Sentolo	Tepus	Tempel
	Pengasih	Tanjungsari	
	Kokap	Rongkop	
	Girimulyo	Girisubo	
	Nanggulan	Semanu	
	Kalibawang	Ponjong	
	Samigaluh	Karangmojo	
	Srandakan	Wonosari	
Kwadran III	Kretek	Playen	
	Pundong	Patuk	Kwadran II
	Bambang Lipuro	Gedangsari	
	Pandak	Nglipar	
	Bantul	Ngawen	
	Jetis	Semin	
	Imogiri	Prambanan	
	Dlingo	Turi	
	Pleret	Cangkringan	
	Piyungan		

Sumber: BPS Provinsi DIY

Terdapat 45 kecamatan yang tergolong dalam kwadran ketiga, yaitu kecamatan yang memiliki capaian IPM relatif rendah sekaligus akselerasinya juga

rendah. Pada kecamatan ini diperlukan intensifikasi program untuk mempercepat laju pembangunan manusianya. Pada kelompok kecamatan ini jika tidak diperhatikan secara serius akan membawa dampak yang serius secara keseluruhan bagi capaian pembangunan manusia sebagai amanah rakyat di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kecamatan yang tergabung dalam kwadran keempat yaitu Kecamatan Mantrijeron, Kraton, Mergangsan, Umbulharjo, Kotagede, Gondokusuman, Danurejan, Pakualaman, Gondomanan, Ngampilan, Wirobrajan, Gedong Tengen, Jetis dan Tegalrejo di Kota Yogyakarta. Di Kabupaten Sleman dan Bantul yang masuk kwadran ini adalah Banguntapan, Kasihan, Mlati, Ngemplak, dan Sleman. Kecamatan-kecamatan yang termasuk dalam kwadran ini memiliki IPM tinggi namun mengalami perlambatan dalam akselerasi pembangunan manusianya.

5.2. Indikator Kesehatan

Salah satu kunci pokok dalam pembangunan manusia adalah pembangunan di bidang kesehatan, sehingga derajat dan kualitas kesehatan di masing-masing wilayah dapat terpantau. Salah satu ukuran dalam pembangunan manusia pada indikator kesehatan dilihat dengan meningkatnya usia harapan hidup di masing-masing wilayah. Meningkatnya usia harapan hidup mengindikasikan meningkatnya peran dimensi kesehatan dalam meningkatkan pilihan-pilihan hidup yang tertuang dalam IPM.

Angka harapan hidup secara rata-rata di Daerah Istimewa Yogyakarta meningkat menjadi 73,62 tahun pada tahun 2013 dari sebelumnya yang mencapai 73,22 tahun di tahun 2010. Angka harapan hidup tertinggi tingkat kecamatan pada tahun 2013 adalah di Kecamatan Depok yakni 79,86 tahun. Angka harapan hidup tertinggi berikutnya

terletak pada Kecamatan Kalasan yakni 77,76 tahun, Kecamatan Ngaglik (77,35 tahun), Kecamatan Godean sebesar 76,29, dan Kecamatan Mlati (76,08 tahun). Lima kecamatan lain yang memiliki angka harapan hidup di atas angka harapan hidup kecamatan yang lainnya dan masuk dalam 10 tertinggi angka harapan hidupnya yaitu Kecamatan Ngemplak, Sleman, Wates, Gamping, dan Panjatan.

Tabel 5.3. Angka Harapan Hidup dengan Urutan 10 Tertinggi dan Terendah di Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2010-2013

10 Tertinggi 2013

NO	KAB/KOTA	KECAMATAN	AHH 2010	AHH 2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sleman	Depok	79.21	79.86
2	Sleman	Kalasan	77.17	77.76
3	Sleman	Ngaglik	76.18	77.35
4	Sleman	Godean	75.18	76.29
5	Sleman	Mlati	75.44	76.08
6	Sleman	Ngemplak	75.73	75.76
7	Sleman	Sleman	75.73	75.76
8	Kulonprogo	Wates	74.98	75.47
9	Sleman	Gamping	74.94	75.36
10	Kulonprogo	Panjatan	74.56	75.29

10 Terendah 2013

NO	KAB/KOTA	KECAMATAN	AHH 2010	AHH 2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Gunungkidul	Girisubo	70.46	70.85
2	Bantul	Sedayu	70.36	70.79
3	Bantul	Dlingo	70.36	70.79
4	Gunungkidul	Semanu	70.14	70.46
5	Gunungkidul	Panggang	69.95	70.26
6	Gunungkidul	Paliyan	69.38	70.19
7	Gunungkidul	Purwosari	69.59	70.13
8	Gunungkidul	Saptosari	69.45	69.98
9	Gunungkidul	Nglipar	69.58	69.81
10	Gunungkidul	Gedangsari	69.14	69.69

Sumber: BPS Provinsi DIY

Kecamatan Gedangsari memiliki besaran angka harapan hidup bagi bayi yang lahir di tahun 2013 paling kecil dibandingkan dengan kecamatan lain di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mencapai 69,69 tahun. Kecamatan yang juga memiliki angka harapan hidup di bawah 70 tahun pada tahun 2013 yaitu Saptosari, dan Nglipar. Sedangkan tujuh kecamatan yang memiliki peringkat angka harapan hidup 10 terendah tetapi angka harapan hidupnya di atas 70 tahun adalah Kecamatan Girisubo. Semanu, Panggang, Paliyan, dan Purwosari di Kabupaten Gunungkidul serta Kecamatan Sedayu dan Dlingo di Kabupaten Bantul.

Perkembangan angka harapan hidup di setiap kecamatan mengalami peningkatan dari tahun 2010 ke tahun 2013, walaupun ada variasi dalam perkembangannya. Hal ini pada prinsipnya menunjukkan bahwa pembangunan di bidang kesehatan pada setiap wilayah kecamatan di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan kinerja yang baik.

5.3. Indikator Pendidikan

Pembangunan pada dimensi pendidikan saat ini merupakan salah satu prioritas pokok pemerintah yang nampak pada semakin besarnya komitmen pemerintah untuk meningkatkan alokasi terutama anggaran pendidikan. Indikator pendidikan merupakan salah satu ukuran untuk melihat bagaimana keberlangsungan pembangunan manusia berproses di Daerah Istimewa Yogyakarta. Perkembangan pendidikan ditunjukkan dengan indikator pendidikan yang diukur dengan memantau perkembangan angka melek huruf di suatu wilayah dan rata-rata lama sekolahnya.

5.3.1 Perkembangan Angka Melek Huruf

Perkembangan angka melek huruf menggambarkan dinamika penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin di masing-masing kecamatan. Kemampuan membaca dan menulis dianggap sebagai hal paling mendasar untuk transfer pengetahuan yang paling sederhana dalam rangka meningkatkan kualitas pilihan hidup sebagai suatu ukuran kualitas sumber daya manusia.

Semua kecamatan di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami kenaikan persentase angka melek huruf dari tahun 2010 ke tahun 2013, yang berarti semakin menurun persentase penduduk yang buta aksara/buta huruf. Secara berurutan kecamatan yang memiliki persentase penduduk melek huruf usia 15 tahun ke atas paling tinggi adalah Kecamatan Gondomanan yakni 99,46 persen. Berikutnya adalah Kecamatan Gondokusuman sebesar 99,32 persen, Kecamatan Mergangsan dengan persentase sebesar 99,28 persen, disusul Kecamatan Danurejan 99,21 persen. Urutan ke lima adalah Kecamatan Mantriweron (99,06 persen), disusul Kecamatan Depok (98,91 persen), baru kemudian diurutkan ke tujuh Kecamatan Kotagede (98,70 persen).

Menarik dicermati bahwa Kecamatan Danurejan ternyata memiliki persentase buta huruf lebih tinggi dari kecamatan penyangga ekonominya yakni Kecamatan Gondomanan, dan Mergangsan. Sektor ekonomi yang berkembang di sana adalah sektor pariwisata atau sektor tersier yang secara tidak langsung menuntut spesifikasi kualifikasi manusia dengan sumber daya manusia yang lebih tinggi. Hal ini membuktikan bahwa kualitas pendidikan dalam hal ini persentase melek huruf, di dua wilayah tersebut relatif tertinggi di antara persentase melek huruf di Kota Yogyakarta dan di atas kecamatan yang dianggap “besar” yakni kecamatan Umbulharjo atau

Kotagede. Kecamatan berikutnya yang berada pada peringkat ke delapan adalah Kecamatan Wirobrajan (98,64 persen), kemudian Kecamatan Jetis Yogyakarta (98,61 persen), berikutnya Kecamatan Umbulharjo (98,50 persen).

Tabel 5.4. Angka Melek Huruf dengan Urutan 10 Tertinggi dan Terendah di Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2010-2013

10 Tertinggi 2013

NO	KAB/KOTA	KECAMATAN	AMH 2010	AMH 2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Yogyakarta	Gondomanan	99.41	99.46
2	Yogyakarta	Gondokusuman	99.21	99.32
3	Yogyakarta	Mergangsan	99.23	99.28
4	Yogyakarta	Danurejan	97.99	99.21
5	Yogyakarta	Mantrijeron	98.70	99.06
6	Sleman	Depok	96.86	98.91
7	Yogyakarta	Kotagede	97.39	98.70
8	Yogyakarta	Wirobrajan	97.33	98.64
9	Yogyakarta	Jetis	97.31	98.61
10	Yogyakarta	Umbulharjo	98.23	98.50

10 Terendah 2013

NO	KAB/KOTA	KECAMATAN	AMH 2010	AMH 2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Gunungkidul	Panggang	84.88	84.92
2	Gunungkidul	Tanjungsari	84.58	84.62
3	Gunungkidul	Tepus	83.45	84.04
4	Gunungkidul	Paliyan	81.11	83.14
5	Gunungkidul	Girisubo	80.63	82.65
6	Gunungkidul	Semin	79.86	81.86
7	Gunungkidul	Nglipar	79.79	81.79
8	Gunungkidul	Ngawen	81.33	81.37
9	Gunungkidul	Saptosari	80.81	80.85
10	Gunungkidul	Gedangsari	79.64	79.68

Sumber: BPS Provinsi DIY

Angka melek huruf yang relatif kecil ditunjukkan dengan peringkat 10 terendah di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat di Kabupaten Gunungkidul yaitu Kecamatan Panggang, Tanjungsari, Tepus, Paliyan, Girisubo, Semin, Nglipar, Ngawen, Saptosari, dan

Gedangsari. Kecamatan Panggang menduduki urutan ke 10 terendah dengan persentase melek huruf sebesar 84,92 persen. Kecamatan Tanjungsari (84,62 persen) urutan berikutnya dan disusul Kecamatan Tepus (84,04 persen). Sementara tiga kecamatan dengan angka melek huruf terendah masing-masing adalah kecamatan Ngawen (81,37 persen), Kecamatan Saptosari (80,85 persen), dan Kecamatan Gedangsari (79,68 persen).

5.3.2 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah juga merepresentasikan dimensi pengetahuan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Daerah Istimewa Yogyakarta di mana perkembangannya merepresentasikan bergeraknya kualitas sumber daya manusia. Rata-rata lama sekolah di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013 sebesar 9,33 tahun lebih tinggi dari tahun 2010 yang sebesar 9,07 tahun, atau sekitar lulus SLTP. Untuk kecamatan tertinggi angka rata-rata lama sekolahnya adalah Kecamatan Gondokusuman, Umbulharjo, dan Depok masing-masing secara berurutan sebesar 12,39; 12,12; dan 12,04 tahun atau rata-rata penduduknya berpendidikan lulus SLTA.

Berikutnya adalah Kecamatan Pakualaman dengan rata-rata lama sekolah sekitar 11,97 tahun atau setara kelas tiga SLTA. Sedangkan kecamatan dengan rata-rata lama sekolahnya setara dengan kelas dua SLTA berturut turut adalah Kecamatan Mergangsan (11,64 tahun), Danurejan (11,31 tahun), Ngaglik (11,25 tahun), Tegalrejo (11,11 tahun), Kraton (11,10 tahun), dan Ngemplak (11,05 tahun). Keenam kecamatan tersebut memiliki rata-rata lama sekolah jauh di atas rata-rata lama sekolah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang setara tamat SLTP atau 9,33 tahun.

Tabel 5.5. Rata-rata Lama Sekolah dengan Urutan 10 Tertinggi dan Terendah di Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2010-2013

10 Tertinggi 2013

NO	KAB/KOTA	KECAMATAN	RLS 2010	RLS 2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Yogyakarta	Gondokusuman	12.37	12.39
2	Yogyakarta	Umbulharjo	11.90	12.12
3	Sleman	Depok	11.81	12.04
4	Yogyakarta	Pakualaman	11.97	11.97
5	Yogyakarta	Mergangsan	11.20	11.33
6	Yogyakarta	Danurejan	11.31	11.31
7	Sleman	Ngaglik	10.89	11.25
8	Yogyakarta	Tegalrejo	11.06	11.11
9	Yogyakarta	Kraton	10.95	11.10
10	Sleman	Ngemplak	10.76	11.05

10 Terendah 2013

NO	KAB/KOTA	KECAMATAN	RLS 2010	RLS 2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Gunungkidul	Ponjong	7.20	7.25
2	Bantul	Pleret	7.04	7.24
3	Bantul	Pajangan	7.14	7.20
4	Bantul	Dlingo	6.76	7.14
5	Gunungkidul	Tanjungsari	7.06	7.07
6	Gunungkidul	Panggang	6.71	6.72
7	Gunungkidul	Gedangsari	6.31	6.56
8	Gunungkidul	Saptosari	6.15	6.43
9	Gunungkidul	Purwosari	6.40	6.40
10	Gunungkidul	Girisubo	6.37	6.39

Sumber: BPS Provinsi DIY

Kecamatan yang memiliki penduduk rata-rata tamat Sekolah Dasar (SD) pada tahun 2013 antara lain Kecamatan Panggang (6,72 tahun), Gedangsari (6,56 tahun), Saptosari (6,43 tahun), Purwosari (6,40 tahun), dan Gedangsari (6,39 tahun). Kecamatan-kecamatan tersebut memiliki rata-rata lama sekolah terendah di Daerah Istimewa Yogyakarta yakni rata-rata penduduknya “hanya” berpendidikan tamat Sekolah Dasar atau dengan rata-rata lama sekolah sekitar 6 tahun.

Selama kurun waktu tiga tahun, upaya peningkatan kualitas pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta membawa peningkatan rata-rata lama sekolah 0,26 poin saja. Hal ini menunjukkan bahwa upaya meningkatkan kualitas pendidikan bukanlah pekerjaan yang mudah, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Jika dikaitkan dengan target MDG's, batas minimal yang diusulkan oleh UNDP untuk mencapai tingkat pendidikan adalah 15 tahun, maka untuk mencapai keadaan pendidikan tersebut di Daerah Istimewa Yogyakarta membutuhkan komitmen dan kesadaran yang tinggi baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Perlu terobosan luar biasa dan pengawalan yang ketat untuk menjamin suksesnya pembangunan manusia terutama dimensi pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu diperlukan sosialisasi yang intensif pada masyarakat untuk menekankan pentingnya bersekolah demi menyadari bahwa pembangunan pendidikan akan menjamin terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dalam jangka yang panjang.

Angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah jika digabungkan sesuai dengan standar UNDP, maka kita akan mendapatkan indeks pendidikan. Indeks ini menggambarkan kualitas pendidikan dan posisi kinerja pembangunan manusia di bidang pendidikan masing-masing kecamatan dibandingkan dengan kecamatan lainnya.

Peringkat pertama dalam indeks pendidikan adalah Kecamatan Gondokusuman (93,74). Peringkat selanjutnya yaitu Kecamatan Depok (92,69), Umbulharjo (92,61), dan Pakualaman (92,06). Keempat kecamatan tersebut memiliki indeks pendidikan di atas angka indeks sebesar 92. Kecamatan yang memiliki skor indeks pendidikan kurang dari

70, yang berada pada kelompok peringkat 3 terbawah dari indeks pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Kecamatan Girisubo (69,31), Saptosari (68,19), dan Gedangsari (67,70) di Kabupaten Gunungkidul.

Tabel 5.6. Indeks Pendidikan dengan Urutan 10 Tertinggi dan Terendah di Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2010-2013

10 Tertinggi 2013

NO	KAB/KOTA	KECAMATAN	Indeks didik 2010	Indeks didik 2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Yogyakarta	Gondokusuman	93.63	93.74
2	Sleman	Depok	90.82	92.68
3	Yogyakarta	Umbulharjo	91.92	92.61
4	Yogyakarta	Pakualaman	93.14	92.06
5	Yogyakarta	Mergangsan	91.03	91.36
6	Yogyakarta	Danurejan	90.84	91.26
7	Yogyakarta	Tegalrejo	89.91	90.28
8	Yogyakarta	Mantrijeron	89.66	90.15
9	Yogyakarta	Gondomanan	90.09	90.15
10	Yogyakarta	Kraton	89.70	90.06

10 Terendah 2013

NO	KAB/KOTA	KECAMATAN	Indeks didik 2010	Indeks didik 2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Gunungkidul	Paliyan	70.58	72.67
2	Gunungkidul	Tepus	71.16	72.24
3	Gunungkidul	Semin	69.46	72.13
4	Gunungkidul	Tanjungsari	72.07	72.12
5	Gunungkidul	Nglipar	68.89	71.93
6	Gunungkidul	Panggang	71.50	71.54
7	Gunungkidul	Ngawen	70.49	70.78
8	Gunungkidul	Girisubo	67.91	69.31
9	Gunungkidul	Saptosari	67.54	68.19
10	Gunungkidul	Gedangsari	67.11	67.70

Sumber: BPS Provinsi DIY

5.4. Indikator Ekonomi

Indikator ekonomi dalam Indeks Pembangunan Manusia menggambarkan bagaimana pilihan-pilihan dalam membangun sumber daya manusia dapat dipilih oleh rumah tangga. Dengan gambaran keadaan ekonomi pada indikator ekonomi dengan pendekatan standar hidup layak atau mengukur bagaimana daya beli penduduk, maka konstelasi ekonomi dalam pembangunan manusia dapat diintegrasikan dengan pendekatan yang sedikit berbeda dibandingkan dengan ukuran makro ekonomi.

Untuk mengukur standar hidup layak, data dasar PDRB per kapita belum cukup mewakili informasi yang diperlukan. Oleh karena itu pada perhitungan IPM ini digunakan ukuran konsumsi per kapita riil yang telah disesuaikan untuk mengukur kemampuan daya beli masyarakat. Nilai tingkat daya beli menunjukkan tingkat kemampuan daya beli penduduk. Semakin besar nilai indeks daya beli mengindikasikan tingkat kesejahteraan penduduk semakin baik.

Pendekatan indikator ekonomi dengan melihat kemampuan daya beli atau standar hidup layak sangat dipengaruhi oleh harga riil yang terjadi antar wilayah. Dengan melakukan standarisasi sedemikian rupa, maka kemampuan daya beli di suatu wilayah kecamatan di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi dapat diperbandingkan dan diikuti perkembangannya.

Pada tahun 2013, indeks daya beli penduduk atau konsumsi riil per kapita (PPP) penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai Rp. 656,19 ribu rupiah, lebih tinggi bila dibandingkan dengan keadaan pada tahun 2010 yang sebesar Rp. 646,56 ribu. Hal ini memberi gambaran bahwa terjadi peningkatan daya beli masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta pada 3 tahun terakhir. Bila PPP dilihat menurut kecamatan,

Kecamatan Gondokusuman nilai PPP-nya tertinggi dibanding dengan kecamatan lain di DIY yaitu mencapai 659,79 ribu rupiah pada tahun 2013. Kecamatan dengan nilai PPP yang juga cukup besar yaitu Kecamatan Umbulharjo dan Danurejan, Hal ini tampak wajar karena ketiga wilayah ini merupakan pusat perekonomian di wilayah ini. Sementara Kecamatan Ngawen memiliki PPP paling rendah dibandingkan kecamatan lain di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2013 yaitu sebesar 633,60 ribu.

Tabel 5.7. *Purchasing Power Parity* (PPP) dengan Urutan 10 Tertinggi dan Terendah di Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2010-2013

10 Tertinggi 2013

NO	KAB/KOTA	KECAMATAN	PPP 2010	PPP 2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Yogyakarta	Gondokusuman	650.99	659.79
2	Yogyakarta	Danurejan	649.73	659.57
3	Yogyakarta	Umbulharjo	650.50	659.28
4	Yogyakarta	Kraton	649.44	658.88
5	Yogyakarta	Pakualaman	649.30	658.82
6	Yogyakarta	Mantrijeron	648.36	658.56
7	Yogyakarta	Kotagede	648.68	658.45
8	Yogyakarta	Tegalrejo	649.68	658.38
9	Yogyakarta	Mergangsan	649.15	658.17
10	Yogyakarta	Wirobrajan	649.15	658.08

10 Terendah 2013

NO	KAB/KOTA	KECAMATAN	PPP 2010	PPP 2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Gunungkidul	Saptosari	624.80	634.82
2	Gunungkidul	Tanjungsari	624.59	634.80
3	Gunungkidul	Semanu	625.16	634.71
4	Gunungkidul	Rongkop	624.99	634.56
5	Gunungkidul	Panggang	624.77	634.48
6	Gunungkidul	Girisubo	625.04	634.47
7	Gunungkidul	Patuk	624.76	634.40
8	Gunungkidul	Semin	624.44	634.28
9	Gunungkidul	Tepus	624.31	633.73
10	Gunungkidul	Ngawen	624.25	633.60

Sumber: BPS Provinsi DIY

Sebagai indeks ekonomi, kita dapat melihat capaian pembangunan ekonomi menuju posisi yang ideal pada kemampuan daya beli penduduknya. Perbandingan indeks standar hidup layak/kemampuan daya beli/PPP dari tahun 2010 ke 2013 menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan di seluruh wilayah kecamatannya mengalami kenaikan. Secara umum dapat dirasakan adanya dampak, baik langsung maupun tidak langsung dari proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perbaikan ekonomi penduduknya.

Namun ke depan perlu lebih diperhatikan bagaimana kecepatan perubahan dari proses pembangunan menyeluruh yang dilakukan pemerintah dengan dampaknya pada pembangunan manusia. Kecamatan Nglipar yang merupakan kecamatan yang masuk dalam kelompok peringkat 10 terendah dalam kemampuan daya beli penduduknya, namun memiliki kenaikan yang cukup besar dari tahun 2010 ke tahun 2013. Hal mengindikasikan bahwa ada upaya untuk segera “melesat” dari lemahnya posisi tawar ekonomi dalam Indeks Pembangunan Manusia. Demikian juga Kecamatan Pundong, Bambanglipuro, Kretek, Pleret dan Dlingo, upayanya untuk menuju posisi ideal dengan mengurangi “gap”nya dalam sisi ekonomi nampak lebih signifikan, yang ditunjukkan oleh perubahan indeks PPP tertinggi dibandingkan kecamatan lain di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Secara umum indeks ekonomi (indeks standar hidup layak) di masing-masing kecamatan mengalami kenaikan, yang berarti pilihan yang dimiliki oleh penduduk di masing-masing kecamatan lebih baik/lebih banyak dari periode sebelumnya. Oleh karena prinsip dari pembangunan manusia adalah memperbesar kesempatan dan pilihan-pilihan yang dapat dilakukan oleh penduduk.

6.1. Kesimpulan

Capaian IPM Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2013 sebesar 77,37, meningkat dari kondisi tahun 2010 yang mencapai 75,77. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pembangunan manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta. Angka IPM sebesar itu menunjukkan bahwa IPM di Daerah Istimewa Yogyakarta masuk dalam kategori menengah atas.

Capaian IPM tertinggi menurut kecamatan di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013 (84,25 poin) adalah Kecamatan Depok. Posisi berikutnya adalah Kecamatan Ngaglik dan Gondokusuman dengan nilai IPM secara berurutan masing-masing sebesar 81,89 dan 81,59. Sementara itu yang mengejutkan adalah capaian pembangunan manusia di posisi keempat yaitu Kecamatan Pakualaman (81,46 poin) mengungguli Kecamatan Danurejan, Umbulharjo, dan Mergangsan yang memiliki capaian IPM masing-masing secara berturut-turut sebesar 80,52; 80,48; dan 80,38 poin di Kota Yogyakarta, atau Kecamatan Kalasan (81,17), Mlati (80,37), serta Kecamatan Ngemplak dengan angka IPM sebesar 80,26 poin di Kabupaten Sleman.

Sementara itu tiga kecamatan terendah capaian pembangunan manusianya dibandingkan kecamatan lain di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Kecamatan Girisubo (69,72), Saptosari (68,89), dan Gedangsari (68,58). Sementara kecamatan lain yang masuk 10 terendah IPM lainnya yaitu Tanjungsari, Tepus, Paliyan, Purwosari, Ngawen, Panggang, dan Nglipar di Kabupaten Gunungkidul.

Kecamatan Depok Kabupaten Sleman yang merupakan kecamatan dengan pembangunan manusia peringkat pertama di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki keunggulan di indeks kesehatan. Dimensi kesehatan di Kecamatan Depok merupakan dimensi yang paling dominan dibandingkan dengan dimensi pembangunan manusia lainnya.

Selain melihat peringkat atau ranking, capaian IPM di kecamatan dapat juga dilihat dari besaran reduksi *shortfall*-nya. Besaran reduksi *shortfall* menggambarkan seberapa besar akselerasi capaian pembangunan manusia dalam tiga tahun (tahun 2013 berbanding 2010). Akselerasi tertinggi pembangunan manusia secara umum berada di Kecamatan Ngaglik, diikuti Kecamatan Depok, Kalasan, Godean, dan Pakem, serta Kecamatan Sewon yang memiliki nilai reduksi 2 persen atau lebih. Sehingga sangat wajar dengan akselerasi pembangunan manusia yang relatif tinggi, Kecamatan Ngaglik mampu menggeser peringkat Kecamatan Gondokusuman atau Pakualaman di Kota Yogyakarta, dengan kata lain Kecamatan Ngaglik mampu naik dua peringkat dibandingkan tiga tahun sebelumnya. Besaran rata-rata reduksi *shortfall* dari Kecamatan Ngaglik dalam periode 2010-2013 mencapai 2,18 persen per tahun. Kecamatan Depok, Kalasan, dan Godean juga memiliki reduksi *shotfall* sangat tinggi, yaitu berturut-turut 2,09; 2,07 dan 2,07 persen. Hal ini cukup wajar oleh karena bangkitnya wilayah ini akibat perkembangan yang cepat untuk tempat tinggal dan fasilitas pendidikan atau kesehatan.

Kecamatan Panggang, Tanjungsari, Ngawen, dan Gedangsari merupakan kecamatan yang memiliki capaian IPM masuk dalam 10 terendah dibandingkan dengan kecamatan lainnya, sayangnya *reduksi shortfall* juga tidak menunjukkan indikasi

menggembirakan bahkan cenderung lebih rendah dibandingkan capaian *reduksi shortfall* kecamatan lain. Sementara Kecamatan Pakualaman memiliki *reduksi shortfall* paling rendah, yaitu hanya 1,40 persen pada periode 2010-2013.

Jika kita melihat dalam dua aspek tinjauan IPM yakni nilai dan capaian *reduksi shortfall* pada masing-masing kecamatan di Daerah Istimewa Yogyakarta secara bersamaan, terdapat kecamatan-kecamatan yang memiliki nilai IPM tinggi sekaligus memiliki kecepatan akselerasi yang tinggi juga. Kecamatan tersebut yakni Kecamatan Moyudan, Seyegan, Godean, Gamping, Depok, Berbah, Kalasan, Ngaglik, dan Pakem..

Semua kecamatan di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami kenaikan persentase angka melek hurufnya dari tahun 2010 ke tahun 2013, akan tetapi masih cukup besar nilai maupun variasinya. Kecamatan yang memiliki persentase penduduk melek huruf usia 15 tahun ke atas paling tinggi adalah Kecamatan Gondomanan yakni 99,46 persen. Sementara tiga kecamatan dengan angka melek huruf terendah masing-masing adalah kecamatan Ngawen (81,37 persen), Kecamatan Saptosari (80,85 persen), dan Kecamatan Gedangsari (79,68 persen). Untuk indikator lainnya yaitu angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan kemampuan daya beli tampaknya hanya terdapat masalah variasi nilai yang besar antar kecamatan. Hanya saja wilayah yang nilai indikatornya rendah cenderung rendah pada semua variabel penyusun IPM, termasuk dalam angka kemiskinan (tabel lampiran 3). Berdasar tabel tersebut terlihat bahwa terdapat hubungan negatif antara IPM dengan estimasi angka kemiskinan kecamatan.

6.2. TINDAK LANJUT

Dengan adanya variasi antar kecamatan tersebut terdapat beberapa hal yang bisa diperhatikan. Kesehatan yang merupakan modal penting bagi aktivitas penduduk masih sangat perlu ditingkatkan pada masa yang akan datang walaupun tantangannya semakin berat. Polarisasi jenis penyakit yang terjadi di daerah ini, yaitu penyelesaian pemberantasan penyakit menular yang belum tuntas, sudah diimbangi dengan peningkatan yang cukup tajam pada penyakit tidak menular/degeneratif. Pelayanan kesehatan masyarakat dan upaya perbaikan gizi balita serta upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular masih perlu menjadi sasaran utama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Apalagi masih munculnya penyakit menular yang mematikan seperti flu babi (H1N1), flu burung (*avian influenza*), demam berdarah, atau HIV/AIDS. Perubahan cuaca yang tidak menentu juga sangat berdampak pada kesehatan.

Hal ini perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan yang cukup layak dan memadai serta dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Proses kehamilan dan kelahiran yang terus dipantau oleh kader/tenaga kesehatan, apalagi pembiayaan kelahiran yang dibiayai dari Jampersal, pemberian makanan tambahan/vitamin yang penting, atau program suami dan kelurahan siaga masih tetap relevan untuk mencegah kelainan/komplikasi pada kedua kejadian penting tersebut. Pembinaan terhadap kaum ibu akan pentingnya pemberian ASI eksklusif yang lebih panjang, imunisasi, dan gizi yang baik tetap diperlukan terutama pada masyarakat yang selama ini terpinggirkan/masyarakat miskin.

Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang sudah berkembang di daerah ini perlu lebih ditingkatkan peran sertanya dalam memelihara jaring pengaman sosial bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang relatif lemah dan miskin. Hanya saja jangan sampai niat yang luhur tidak menjadi kenyataan karena kesalahan di tingkat implementasi program. Begitu pula perluasan jaminan kesehatan menjadi jaminan kesehatan semesta yang mau mencakup seluruh penduduk patut didukung pelaksanaannya. Demikian pula dukungan terhadap jaminan persalinan untuk mengurangi kejadian kematian ibu saat melahirkan sangat diperlukan.

Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian lebih adalah perbaikan mutu lingkungan hidup atau pemukiman yang dapat mendukung pola hidup sehat. Penyediaan sarana air bersih yang lebih berkualitas, pembuangan limbah rumah tangga dan industri, dan lain-lain yang relatif lancar sangat diperlukan agar masyarakat dapat tetap sehat sehingga dapat mengurangi tingkat kesakitan. Pemantauan kondisi lingkungan sekitar tetap terus ditingkatkan untuk mencegah penyebaran penyakit demam berdarah atau pemantauan mandiri dari setiap warga.

Strategi yang tetap dapat dilakukan dan dilanjutkan antara lain: 1) mengajak/melibatkan setiap rumah tangga untuk memisahkan sampah organik dan non organik sebelum dibuang di tempat yang disediakan. 2) memperluas kawasan hijau tengah kota dengan menanam berbagai tanaman yang bisa menjadi paru-paru kota, misalnya dengan memelihara tanaman pada pergola-pergola di pinggir jalan atau pohon perindang di taman. Selain itu perlu pula mengajak partisipasi masyarakat untuk menanam pohon pelindung atau tanaman perindang di lingkungan tempat tinggalnya. 3) Perang terhadap sampah tidak sekedar hanya kebiasaan membuang sampah pada

tempatnya atau kerja bakti kebersihan lingkungan sebelum hari besar saja, melainkan perlu perang terhadap perilaku buang sampah atau polusi di ruang publik yang sembarangan. Kota hijau atau lebih dikenal dengan '*Green City*' akan diterapkan dengan sendirinya. Meskipun patut diingat penanggulangan polusi udara termasuk di dalamnya dan harus dilakukan secara terpadu.

Seperti halnya di bidang kesehatan, di bidang pendidikan masih terlihat adanya kesenjangan akses antara kabupaten/kota, kaum kaya dan miskin. Hasil pendidikan sampai sejauh ini masih tergantung pada pengaruh keluarga, khususnya tingkat pendidikan orang tua dan ada tidaknya tekanan bagi anak untuk lekas meninggalkan bangku sekolah agar dapat segera bekerja. Akan tetapi pembelanjaan publik juga mempunyai pengaruh besar. Dalam hal pendidikan, pembelanjaan publik cenderung membawa pengaruh yang lebih menyetarakan oleh karena sebagian besar pendidikan tingkat dasar dan menengah dikelola oleh pemerintah. Akibatnya, pada tingkat pendidikan dasar saat ini hampir tidak ada perbedaan dalam keikutsertaan di bangku sekolah antara satu kelompok penghasilan dengan yang lainnya.

Pendidikan yang disisipi dengan pengembangan yang diarahkan pada kondisi dan potensi daerah tetap diperlukan, walaupun pandangan global dan kebutuhan daerah lain tidak dikesampingkan. Hal ini terutama pada sekolah-sekolah kejuruan, sehingga lulusan yang diperoleh dapat ditampung di dunia kerja yang ada dan sekaligus dapat menggali potensi sumber daya yang ada. Meskipun demikian pemasukan nilai mental untuk ulet dan jujur tetap diperlukan agar minat terhadap tenaga kerja asal kota ini bagi daerah lain tidak luntur. Minat terhadap tenaga kerja dari Daerah Istimewa Yogyakarta di Pulau Batam yang cukup besar dapat dijadikan contoh untuk

pengembangan lebih lanjut baik dari aspek pendidikan sendiri maupun dalam kerjasama dengan wilayah perkembangan ekonomi lainnya.

Peningkatan peran serta masyarakat termasuk dunia usaha sangat diharapkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang diidamkan. Peningkatan dapat diupayakan melalui pengembangan mekanisme kerja sama saling menguntungkan bagi peserta pendidikan dan lembaga pendidikan, masyarakat, dan dunia usaha.

Perencanaan pembangunan manusia harus diutamakan kepada sektor-sektor yang sekiranya dapat mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat. Taraf kesejahteraan masyarakat sangat menentukan keberhasilan pembangunan di berbagai bidang. Semakin baik perekonomian masyarakat, akan semakin baik pula tingkat kesehatan dan pendidikan, dan tentunya hal ini menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

Upaya menjembatani kesenjangan, khususnya kesehatan dan pendidikan akan membutuhkan tambahan pada anggaran belanja publik yang tidak hanya untuk mengurangi disparitas tetapi juga untuk menjamin adanya kemajuan pada keseluruhannya. Pertumbuhan memang tetap penting tetapi sulit untuk mencapai tingkat pertumbuhan secepat masalah yang ada. Pertumbuhan tidak dapat menciptakan pendapatan swasta yang cukup untuk dapat mengkompensasi rendahnya belanja publik.

Memacu pembangunan manusia melalui pembelanjaan publik juga merupakan suatu hal yang masuk akal karena perbaikan kesehatan dan pendidikan yang dihasilkan akan menjadi 'barang publik', artinya manfaat yang diperoleh tidak hanya dinikmati individu tetapi juga akan bergaung ke seluruh masyarakat. Hal ini disebabkan banyak

dari dimensi kesejahteraan umat manusia saling menguatkan satu sama lainnya dan memiliki efek meluber positif bagi seluruh masyarakat.

Peningkatan proses demokrasi telah menciptakan banyak pilihan baru dan membuat kehidupan publik menjadi lebih kompleks, akan tetapi demokrasi tampaknya belum membawa perbaikan ekonomi secara nyata. Masyarakat miskin memiliki beberapa saluran untuk menyampaikan pandangan mereka, namun mereka kekurangan kesempatan untuk mengembangkan kapasitas mereka sampai sepenuhnya. Pendidikan dan kesehatan mereka tertinggal sebagai akibatnya mereka tidak akan pernah dapat mencapai potensi fisik dan mental mereka secara optimal.

Pembangunan manusia telah menunjukkan bahwa terdapat kebebasan yang lebih luas – dengan memperluas pilihan-pilihan orang, tidak hanya kebebasan untuk memilih pemimpin politik tetapi juga untuk menikmati kehidupan yang sehat dan untuk memperoleh pengetahuan dan ketrampilan untuk mengembangkan kapasitas mereka. Oleh karena itu demokrasi tidak boleh dipandang sebagai tujuan akhir tetapi lebih sebagai wahana yang akan membawa daerah ini ke dalam era baru yang memberikan kesempatan-kesempatan baru. Setiap orang mempunyai peran yang harus dijalankan baik sebagai individu maupun dalam keluarga atau masyarakat untuk menjamin proses untuk menikmati buah demokrasi dan mengembangkan diri sepenuhnya.

Prinsip dasar pemenuhan hak warga sebenarnya sudah disetujui di forum-forum internasional. Indonesia telah meratifikasi misalnya Konvensi Penghapusan Segala Diskriminasi Terhadap Perempuan, Konvensi Hak Anak, Perjanjian Internasional atas Hak Sipil dan Politik, dan Perjanjian Internasional atas Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. Indonesia juga telah menyetujui tindakan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang

menyatukan hak-hak politik dan hak-hak sosial ekonomi ke dalam 'hak atas pembangunan'.

Di Indonesia sampai sejauh ini telah memenuhi hak-hak ekonomi dan sosial warganya. Layanan publik tidak lagi berdasarkan dari segi kebutuhan tetapi dari segi hak. Hal ini mungkin sulit diterapkan tetapi sangat diperlukan untuk mendapatkan situasi yang lebih baik pada masa datang. Terdapat beberapa kesepakatan bahwa pendekatan ini mengandung beberapa unsur dasar, antara lain:

1. Kestaraan : pelayanan dengan standar yang sama
2. Ketidakterpisahan : hak yang satu tidak dapat didahulukan dari hak lainnya
3. Standar kinerja : upaya menetapkan target yang terukur dan upaya memantau pencapaian target-target.
4. Partisipasi : perhatian khusus tidak hanya pada upaya memenuhi hak, tetapi juga pada bagaimana hak-hak ini dipenuhi.
5. Pemberdayaan : orang-orang yang dapat menuntut haknya merasa dalam posisi yang lebih kuat.
6. Akuntabilitas : penafsiran yang paling kuat akan hak asasi manusia menuntut adanya kemungkinan melakukan tindakan hukum dalam mengejar pemenuhan hak-hak.

Ada berbagai jalan untuk mencapai pembangunan manusia yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi dapat membawa sukses pembangunan manusia. Pertama, dengan meningkatkan standar hidup secara keseluruhan dan mengurangi kemiskinan. Kedua, dengan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran belanja yang lebih besar untuk pendidikan, pelayanan kesehatan, dan berbagai

program untuk memerangi kemiskinan. Hubungan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia tidak langsung tetapi tergantung dua hal yaitu mutu pertumbuhan dalam distribusi pendapatan dan prioritas belanja pemerintah daerah. Terlalu mengandalkan belanja swasta biasanya mendapatkan ketimpangan yang lebih besar karena belanja swasta biasanya kurang terdistribusi secara merata dibandingkan belanja publik. Oleh karena itu diperlukan keseimbangan antara peran sektor swasta dan publik dalam menyediakan layanan sosial.

Di samping langkah-langkah tersebut, berbagai dimensi pembangunan manusia mempunyai hubungan yang sinergis dengan pertumbuhan ekonomi, saling memperkuat dampak satu sama lainnya. Oleh karena itu perlu dukungan publik yang memadai untuk setiap bidang ini. Hal ini tidak mudah tetapi dengan berbasis hak dapat membantu karena dengan pendekatan ini menuntut adanya partisipasi aktif dari para penerima manfaat. Para penerima manfaat ini cenderung dapat lebih menghargai bagaimana harus sebaik mungkin menggunakan sumber daya yang terbatas secara optimal dan turut memelihara keberlanjutannya.

Penjaringan investor baik dari dalam maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya di kota ini merupakan langkah yang positif. Oleh karena dengan masuknya investor maka akan mendorong bagi tumbuhnya perekonomian daerah, selain bisa meningkatkan akses terhadap kebutuhan tenaga kerja bagi masyarakat. Investasi yang masuk harus dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Situasi yang tidak kondusif seperti tindakan anarkis yang memperburuk citra daerah perlu dihindarkan agar investor tidak ragu untuk masuk dan menanamkan modalnya. Dukungan lain adalah birokrasi yang tidak berbelit-belit. Investor akan enggan jika untuk menanamkan

modalnya harus melalui berbagai pintu atau meja yang sulit. Hanya saja investor yang masuk harus bisa memberikan kesempatan kerja yang luas. Apalagi pada saat ini banyak masyarakat yang membutuhkan pekerjaan atau banyak pengangguran. Jika lapangan kerja tersedia maka warga tidak perlu jauh-jauh mencari pekerjaan ke daerah lain atau bahkan ke negara lain.

Kegiatan informal yang berkembang sangat baik di kota ini bahkan bisa menjadi sabuk pengaman yang baik bagi perekonomian masyarakat pada saat krisis ekonomi dan diikuti krisis global, perlu diperhatikan penanganan dan perkembangannya. Program-program penataan atau relokasi yang ada perlu dikomunikasikan lebih efektif dan efisien dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan apa yang menjadi tujuan bersama yaitu masyarakat yang sehat, maju, dan sejahtera.

Berdasarkan gambaran pembangunan manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta,, perencanaan pembangunan diharapkan dapat memperbaiki kualitas dari determinan variabel setiap komponen IPM sehingga target dan sasaran yang ingin dicapai lebih fokus dan tetap sasaran. Beberapa hal yang diutamakan untuk dilakukan dengan pertimbangan upaya yang telah dilakukan dan hasil yang dicapai serta kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat beberapa langkah yang perlu dipertimbangkan guna mendongkrak determinan variabel angka harapan hidup, dengan menekan kasus kematian bayi, dan ibu, menurunkan angka kesakitan serta menghilangkan kasus kekurangan gizi pada balita melalui: pemberdayaan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat serta sadar gizi; mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, terutama keluarga miskin;

meningkatkan pembiayaan kesehatan melalui APBD untuk menjamin pembiayaan kesehatan rakyat miskin; memperluas pelayanan kesehatan sampai ke pelosok melalui sistem monitoring dan informasi kesehatan untuk menangani secara cepat pada saat terjadi kasus-kasus yang mengancam kesehatan masyarakat.

2. Realisasi anggaran pendidikan dari APBD seyogyanya difokuskan kepada tiga permasalahan mendasar yaitu belum meratanya pelayanan pendidikan, masih rendahnya kualitas, dan belum optimal pengelolaan pendidikan.
3. Daya beli masyarakat secara mendasar dipengaruhi oleh pendapatan rumah tangga. Relatif masih rendahnya kualitas hidup masyarakat di perdesaan perlu langkah terobosan untuk membuka peluang pertumbuhan ekonomi di perdesaan yang dapat memperbaiki dan meningkatkan pendapatan rumah tangga. Membuka lapangan usaha pertanian, memberdayakan industri kecil dan mendorong para investor, khususnya dari kalangan swasta, untuk turut berperan serta pada proses pembangunan pada daerah-daerah yang kurang berkembang merupakan hal yang perlu dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Booth, A. 1999. "Survey of Recent Development". Bulletin of Indonesian Economic Studies 35 (3): 3-38.
- Booth, A. 2000. "Poverty and Inequality in the Soeharto Era: An Assessment". Bulletin of Indonesian Economic Studies 36 (1): 73-104.
- BPS-Bappenas-UNDP. 2001. *Indonesia Human Development Report 2001 Toward A New Consensus*. Jakarta
- BPS-Bappenas-UNDP. 2004. *Indonesia Human Development Report 2004. The Economics of Democracy, Financing Human Development in Indonesia*. Jakarta
- BPS. 2013. *Data dan Informasi Kemiskinan per Kabupaten/ Kota 2012*. Jakarta
- BPS Provinsi DIY. 2013. *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2013*. Yogyakarta
- BPS Provinsi DIY. 2013. *Analisis PDRB Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2008-2012*. Yogyakarta
- Brata, A. G. dan Z. Arifin. 2003. "Alokasi Investasi Sektor Publik dan Pengaruhnya Terhadap Konvergensi Ekonomi Regional di Indonesia". Media Ekonomi 13 (20): 59-71.
- Daliyo, Haning Romdiati, dan Suko Bandiyono. 1994. *Indeks Perkembangan Manusia Jawa Barat 1980-1990*. Puslitbang Kependudukan dan Ketenagakerjaan LIPI. Jakarta.
- Fane, G. 2000. "Survey of Recent Developments". Bulletin of Indonesian Economic Studies 36 (1): 13-44
- Imawan, W. 2001. *Indikator Komposit Pembangunan Manusia: Indikator sosial untuk monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan suatu wilayah pemerintahan*. BPS. Jakarta.
- Lanjauw, P., M. Pradhan, F. Saadah, H. Sayed, R. Sparrow. 2001. *Poverty, Education and Health in Indonesia: Who Benefits from Public Spending?*. World Bank Working Paper No. 2739. December 2001.
- Ramirez, A., G. Ranis, dan F. Stewart. 1998. "Economic Growth and Human Capital". *QEH Working Paper* No. 18.
- UNDP. 2010. *Human Development Report 2010*. UNDP. New York.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) MENURUT KECAMATAN DAN INDIKATOR PENYUSUN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 2010 DAN 2013

No	Kecamatan	AHH 2010	AHH 2013	AMH 2010	AMH 2013	MYS 2010	MYS 2013	PPP 2010	PPP 2013	IPM 2010	Rangking IPM 2010	IPM 2013	Rangking IPM 2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3401010	TEMON	74,44	74,92	93,38	94,82	8,75	8,76	631,43	636,24	75,61	2	76,57	2
3401020	WATES	74,98	75,47	93,38	94,82	8,75	8,76	631,50	636,33	75,91	1	76,88	1
3401030	PANJATAN	74,56	75,29	88,13	90,33	8,24	8,40	630,19	635,95	74,04	8	75,49	8
3401040	GALUR	74,38	74,84	89,47	91,71	8,26	8,58	630,26	636,14	74,26	6	75,69	6
3401050	LEDAH	74,16	74,64	90,22	92,48	8,01	8,53	631,48	636,40	74,20	7	75,74	5
3401060	SENTOLO	74,28	74,93	90,29	91,81	8,75	8,76	630,17	635,68	74,73	4	75,86	4
3401070	PENGASIH	74,24	74,72	93,38	94,82	8,75	8,76	630,71	636,16	75,44	3	76,45	3
3401080	KOKAP	72,07	72,98	88,35	90,56	7,12	7,35	629,85	635,78	71,85	12	73,47	12
3401090	GIRIMULYO	74,14	74,49	91,37	92,49	7,10	7,25	629,76	635,56	73,64	10	74,64	10
3401100	NANGGULAN	74,16	74,64	90,24	92,49	8,23	8,29	630,31	635,69	74,28	5	75,51	7
3401110	KALIBAWANG	73,78	74,43	90,10	92,36	7,83	8,11	630,16	635,91	73,74	9	75,25	9
3401120	SAMIGALUH	73,78	74,64	90,10	90,28	7,42	7,77	629,78	635,22	73,40	11	74,60	11
3401000	KULONPROGO	74,38	75,03	90,69	93,13	8,20	8,37	630,38	635,96	74,49		75,95	

Keterangan: AHH = angka harapan hidup; AMH = angka melek huruf; MYS = RLS = Rata-rata lama sekolah; PPP = kemampuan daya beli; IPM = Indeks Pembangunan Manusia

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) MENURUT KECAMATAN DAN INDIKATOR PENYUSUN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 2010 DAN 2013

No	Kecamatan	AHH 2010	AHH 2013	AMH 2010	AMH 2013	MYS 2010	MYS 2013	PPP 2010	PPP 2013	IPM 2010	Rangking IPM 2010	IPM 2013	Rangking IPM 2013
3402010	SRANDAKAN	71,28	71,45	85,59	87,73	7,68	7,87	644,54	654,95	72,34	15	73,86	15
3402020	SANDEN	70,38	71,10	89,69	91,93	8,20	8,61	645,61	655,53	73,22	10	75,18	8
3402030	KRETEK	71,40	71,45	87,11	87,42	8,32	8,33	645,78	656,84	73,31	9	74,27	11
3402040	PUNDONG	71,09	71,14	87,02	89,20	8,22	8,62	644,24	655,63	72,93	12	74,61	10
3402050	BAMBANG LIPURO	71,63	72,24	90,65	90,70	8,10	8,37	644,38	655,67	73,96	7	75,37	7
3402060	PANDAK	71,08	71,14	88,95	89,05	7,79	7,80	645,23	655,39	73,11	11	73,95	14
3402070	BANTUL	72,68	72,73	92,74	93,67	8,91	9,28	646,17	656,04	75,75	3	77,02	4
3402080	JETIS	71,31	71,62	89,83	89,88	8,16	8,36	645,10	655,49	73,70	8	74,83	9
3402090	IMOGIRI	71,22	71,48	87,02	89,20	7,31	7,67	645,51	656,30	72,43	14	74,15	12
3402100	DLINGO	70,36	70,79	86,01	88,16	6,76	7,14	644,22	655,41	71,21	17	73,07	17
3402110	PLERET	72,76	72,81	86,43	87,14	7,04	7,24	644,67	655,65	72,88	13	74,06	13
3402120	PIYUNGAN	72,75	73,63	90,91	90,95	8,48	8,49	645,66	655,81	75,02	5	76,31	5
3402130	BANGUNTAPAN	71,57	72,23	95,28	95,33	9,72	9,80	647,47	656,74	76,39	2	77,54	2
3402140	SEWON	71,11	72,11	92,69	95,00	9,40	9,60	646,77	656,68	75,27	4	77,25	3
3402150	KASIHAN	72,94	73,26	93,43	95,29	9,40	9,64	646,92	656,74	76,46	1	77,98	1
3402160	PAJANGAN	70,40	71,05	87,21	89,39	7,14	7,20	644,57	655,15	71,82	16	73,51	16
3402170	SEDAYU	70,36	70,79	91,31	93,59	8,85	9,31	646,09	656,10	74,09	6	75,94	6
3402000	BANTUL	71,31	71,62	91,03	92,81	8,82	9,02	646,08	656,07	74,53		76,01	

Keterangan: AHH = angka harapan hidup; AMH = angka melek huruf; MYS = RLS = Rata-rata lama sekolah; PPP = kemampuan daya beli; IPM = Indeks Pembangunan Manusia

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) MENURUT KECAMATAN DAN INDIKATOR PENYUSUN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 2010 DAN 2013

No	Kecamatan	AHH 2010	AHH 2013	AMH 2010	AMH 2013	MYS 2010	MYS 2013	PPP 2010	PPP 2013	IPM 2010	Rangking IPM 2010	IPM 2013	Rangking IPM 2013
3403010	PANGGANG	69,95	70,26	84,88	84,92	6,71	6,72	624,77	634,48	69,20	11	70,13	14
3403011	PURWOSARI	69,59	70,13	85,66	87,81	6,40	6,40	625,22	635,05	68,98	13	70,51	12
3403020	PALIYAN	69,38	70,19	81,11	83,14	7,43	7,76	626,26	635,03	68,70	14	70,52	11
3403030	SAPTO SARI	69,45	69,98	80,81	80,85	6,15	6,43	624,80	634,82	67,61	17	68,89	17
3403040	TEPUS	71,27	71,46	83,45	84,04	6,98	7,29	624,31	633,73	69,79	8	70,98	10
3403041	TANJUNGSARI	71,30	71,85	84,58	84,62	7,06	7,07	624,59	634,80	70,13	7	71,23	9
3403050	RONGKOP	71,21	71,51	87,68	87,72	7,62	7,63	624,99	634,56	71,21	4	72,14	4
3403051	GIRISUBO	70,46	70,85	80,63	82,65	6,37	6,39	625,04	634,47	68,31	15	69,72	16
3403060	SEMANU	70,14	70,46	83,32	85,40	7,66	8,02	625,16	634,71	69,69	9	71,34	7
3403070	PONJONG	70,79	71,38	85,44	85,48	7,20	7,25	624,93	635,03	70,16	6	71,32	8
3403080	KARANGMOJO	70,38	71,08	87,96	88,84	8,49	8,49	625,65	635,10	71,51	3	72,83	3
3403090	WONOSARI	72,08	72,47	89,86	89,90	8,83	8,95	626,35	635,57	73,18	1	74,21	1
3403100	PLAYEN	70,64	71,03	92,96	93,01	8,98	9,06	624,95	634,91	73,08	2	74,13	2
3403110	PATUK	70,48	70,91	86,87	87,47	7,91	7,92	624,76	634,40	70,82	5	71,95	5
3403120	GEDANG SARI	69,14	69,69	79,64	79,68	6,31	6,56	625,11	634,97	67,31	18	68,58	18
3403130	NGLIPAR	69,58	69,81	79,79	81,79	7,06	7,83	624,43	634,91	68,10	16	70,05	15
3403140	NGAWEN	70,48	71,11	81,33	81,37	7,32	7,44	624,25	633,60	69,12	12	70,29	13
3403150	SEMIN	71,97	72,40	79,86	81,86	7,30	7,90	624,44	634,28	69,62	10	71,50	6
3403000	GUNUNGKIDUL	70,97	71,36	84,66	85,22	7,65	7,79	625,20	634,88	70,45		71,64	

Keterangan: AHH = angka harapan hidup; AMH = angka melek huruf; MYS = RLS = Rata-rata lama sekolah; PPP = kemampuan daya beli; IPM = Indeks Pembangunan Manusia

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) MENURUT KECAMATAN DAN INDIKATOR PENYUSUN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 2010 DAN 2013

No	Kecamatan	AHH 2010	AHH 2013	AMH 2010	AMH 2013	MYS 2010	MYS 2013	PPP 2010	PPP 2013	IPM 2010	Rangking IPM 2010	IPM 2013	Rangking IPM 2013
3404010	MOYUDAN	72,80	73,93	91,68	93,38	8,84	9,06	646,34	655,36	75,53	12	77,40	12
3404020	MINGGIR	72,80	73,93	91,68	93,37	8,84	9,06	645,59	654,67	75,48	13	77,34	13
3404030	SEYEGAN	74,06	74,79	90,32	92,57	8,84	9,06	645,67	654,85	75,88	10	77,66	11
3404040	GODEAN	75,18	76,29	91,79	94,08	9,77	10,05	646,93	655,41	77,62	6	79,60	6
3404050	GAMPING	74,94	75,36	92,63	94,94	9,63	9,74	646,73	655,61	77,55	7	79,06	7
3404060	MLATI	75,44	76,08	93,86	95,22	10,65	10,78	648,76	656,65	79,02	5	80,37	4
3404070	DEPOK	79,21	79,86	96,86	98,91	11,81	12,04	649,31	657,02	82,68	1	84,25	1
3404080	BERBAH	72,16	73,06	93,57	95,91	9,42	9,43	647,68	655,55	76,13	9	77,76	10
3404090	PRAMBANAN	71,24	71,68	86,25	87,02	7,85	7,89	645,73	654,58	72,68	17	73,81	17
3404100	KALASAN	77,17	77,76	93,81	96,16	9,92	10,39	647,48	655,87	79,32	3	81,17	3
3404110	NGEMPLAK	75,73	75,76	93,30	94,69	10,76	11,05	649,17	656,31	79,17	4	80,26	5
3404120	NGAGLIK	76,18	77,35	94,74	97,11	10,89	11,25	648,97	657,18	79,81	2	81,89	2
3404130	SLEMAN	75,73	75,76	90,38	92,19	9,17	9,36	646,21	654,82	77,11	8	78,33	8
3404140	TEMPEL	73,92	74,93	90,10	92,36	8,54	8,65	644,80	654,16	75,46	14	77,33	14
3404150	TURI	72,63	73,07	88,95	91,18	8,54	8,83	645,01	653,98	74,51	16	76,15	16
3404160	PAKEM	73,60	74,21	89,08	91,31	9,18	9,89	646,63	656,19	75,68	11	77,77	9
3404170	CANGKRINGAN	73,19	73,88	91,02	93,30	7,85	7,89	646,22	655,31	74,86	15	76,48	15
3404000	SLEMAN	75,06	75,79	92,61	95,11	10,30	10,55	647,84	656,00	78,19		79,97	

Keterangan: AHH = angka harapan hidup; AMH = angka melek huruf; MYS = RLS = Rata-rata lama sekolah; PPP = kemampuan daya beli; IPM = Indeks Pembangunan Manusia

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) MENURUT KECAMATAN DAN INDIKATOR PENYUSUN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 2010 DAN 2013

No	Kecamatan	AHH 2010	AHH 2013	AMH 2010	AMH 2013	MYS 2010	MYS 2013	PPP 2010	PPP 2013	IPM 2010	Rangking IPM 2010	IPM 2013	Rangking IPM 2013
3471010	MANTRIJERON	73,60	73,85	98,70	99,06	10,74	10,85	648,36	658,56	79,10	8	80,19	6
3471020	KRATON	73,50	73,78	98,04	98,09	10,95	11,10	649,44	658,88	79,14	7	80,14	8
3471030	MERGANGSAN	72,89	73,53	99,23	99,28	11,20	11,33	649,15	658,17	79,22	6	80,38	5
3471040	UMBULHARJO	72,40	72,80	98,23	98,50	11,90	12,12	650,50	659,28	79,35	4	80,48	4
3471050	KOTAGEDE	73,60	73,91	97,39	98,70	10,61	10,68	648,68	658,45	78,74	10	80,01	10
3471060	GONDOKUSUMAN	73,72	74,04	99,21	99,32	12,37	12,39	650,99	659,79	80,69	2	81,59	1
3471070	DANUREJAN	73,19	73,64	97,99	99,21	11,48	11,31	649,73	659,57	79,37	3	80,52	3
3471080	PAKUALAMAN	74,69	74,96	98,90	98,19	12,24	11,97	649,30	658,82	80,94	1	81,46	2
3471090	GONDONANAN	72,20	72,97	99,41	99,46	10,72	10,73	648,79	657,26	78,50	13	79,60	12
3471100	NGAMPILAN	74,38	74,58	97,80	97,85	10,74	10,75	648,31	657,31	79,33	5	80,15	7
3471110	WIROBRAJAN	73,47	73,78	97,33	98,64	10,85	10,87	649,15	658,08	78,87	9	80,04	9
3471120	GEDONG TENGEN	72,30	72,71	95,43	97,29	9,98	10,05	648,59	657,66	77,11	14	78,50	14
3471130	JETIS	73,62	73,86	97,31	98,61	10,50	10,51	648,82	657,25	78,66	11	79,74	11
3471140	TEGALREJO	72,19	72,46	97,99	98,38	11,06	11,11	649,68	658,38	78,50	12	79,44	13
3471000	YOGYAKARTA	73,44	73,71	98,03	98,48	11,48	11,56	649,71	658,76	79,52		80,52	
3400000	DIY	73,22	73,62	90,84	92,86	9,07	9,33	646,56	656,19	75,77		77,37	

Keterangan: AHH = angka harapan hidup; AMH = angka melek huruf; MYS = RLS = Rata-rata lama sekolah; PPP = kemampuan daya beli; IPM = Indeks Pembangunan Manusia

LAMPIRAN II

REDUKSI *SHORTFALL* IPM MENURUT KECAMATAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 2010-2013

No	Kecamatan	IPM 2010	Rangking IPM 2010	IPM 2013	Rangking IPM 2013	<i>Reduksi Shortfall 2010-2013</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3401010	TEMON	75,61	2	76,57	2	1,58
3401020	WATES	75,91	1	76,88	1	1,59
3401030	PANJATAN	74,04	8	75,49	8	1,78
3401040	GALUR	74,26	6	75,69	6	1,77
3401050	LENDAH	74,20	7	75,74	5	1,81
3401060	SENTOLO	74,73	4	75,86	4	1,65
3401070	PENGASIH	75,44	3	76,45	3	1,60
3401080	KOKAP	71,85	12	73,47	12	1,79
3401090	GIRIMULYO	73,64	10	74,64	10	1,56
3401100	NANGGULAN	74,28	5	75,51	7	1,69
3401110	KALIBAWANG	73,74	9	75,25	9	1,79
3401120	SAMIGALUH	73,40	11	74,60	11	1,65
3401000	KULONPROGO	74,49		75,95		1,79
3402010	SRANDAKAN	72,34	15	73,86	15	1,76
3402020	SANDEN	73,22	10	75,18	8	1,94
3402030	KRETEK	73,31	9	74,27	11	1,53
3402040	PUNDONG	72,93	12	74,61	10	1,84
3402050	BAMBANG LIPURO	73,96	7	75,37	7	1,76
3402060	PANDAK	73,11	11	73,95	14	1,46
3402070	BANTUL	75,75	3	77,02	4	1,74
3402080	JETIS	73,70	8	74,83	9	1,62
3402090	IMOIRI	72,43	14	74,15	12	1,84
3402100	DLINGO	71,21	17	73,07	17	1,86
3402110	PLERET	72,88	13	74,06	13	1,63
3402120	PIYUNGAN	75,02	5	76,31	5	1,73
3402130	BANGUNTAPAN	76,39	2	77,54	2	1,70
3402140	SEWON	75,27	4	77,25	3	2,00
3402150	KASIHAN	76,46	1	77,98	1	1,86
3402160	PAJANGAN	71,82	16	73,51	16	1,82

No	Kecamatan	IPM 2010	Rangking IPM 2010	IPM 2013	Rangking IPM 2013	Reduksi Shortfall 2010-2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3402170	SEDAYU	74,09	6	75,94	6	1,93
3402000	BANTUL	74,53		76,01		1,80
3403010	PANGGANG	69,20	11	70,13	14	1,45
3403011	PURWOSARI	68,98	13	70,51	12	1,70
3403020	PALIYAN	68,70	14	70,52	11	1,80
3403030	SAPTO SARI	67,61	17	68,89	17	1,58
3403040	TEPUS	69,79	8	70,98	10	1,58
3403041	TANJUNGSARI	70,13	7	71,23	9	1,55
3403050	RONGKOP	71,21	4	72,14	4	1,48
3403051	GIRISUBO	68,31	15	69,72	16	1,64
3403060	SEMANU	69,69	9	71,34	7	1,76
3403070	PONJONG	70,16	6	71,32	8	1,57
3403080	KARANGMOJO	71,51	3	72,83	3	1,67
3403090	WONOSARI	73,18	1	74,21	1	1,56
3403100	PLAYEN	73,08	2	74,13	2	1,58
3403110	PATUK	70,82	5	71,95	5	1,57
3403120	GEDANG SARI	67,31	18	68,58	18	1,57
3403130	NGLIPAR	68,10	16	70,05	15	1,83
3403140	NGAWEN	69,12	12	70,29	13	1,56
3403150	SEMIN	69,62	10	71,50	6	1,84
3403000	GUNUNGKIDUL	70,45		71,64		1,59
3404010	MOYUDAN	75,53	12	77,40	12	1,97
3404020	MINGGIR	75,48	13	77,34	13	1,97
3404030	SEYEGAN	75,88	10	77,66	11	1,95
3404040	GODEAN	77,62	6	79,60	6	2,07
3404050	GAMPING	77,55	7	79,06	7	1,89
3404060	MLATI	79,02	5	80,37	4	1,86
3404070	DEPOK	82,68	1	84,25	1	2,09
3404080	BERBAH	76,13	9	77,76	10	1,90
3404090	PRAMBANAN	72,68	17	73,81	17	1,61
3404100	KALASAN	79,32	3	81,17	3	2,07
3404110	NGEMPLAK	79,17	4	80,26	5	1,74
3404120	NGAGLIK	79,81	2	81,89	2	2,18

No	Kecamatan	IPM 2010	Rangking IPM 2010	IPM 2013	Rangking IPM 2013	Reduksi Shortfall 2010-2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3404130	SLEMAN	77,11	8	78,33	8	1,75
3404140	TEMPEL	75,46	14	77,33	14	1,97
3404150	TURI	74,51	16	76,15	16	1,86
3404160	PAKEM	75,68	11	77,77	9	2,05
3404170	CANGKRINGAN	74,86	15	76,48	15	1,86
3404000	SLEMAN	78,19		79,97		2,01
3471010	MANTRIJERON	79,10	8	80,19	6	1,73
3471020	KRATON	79,14	7	80,14	8	1,69
3471030	MERANGSAN	79,22	6	80,38	5	1,77
3471040	UMBULHARJO	79,35	4	80,48	4	1,76
3471050	KOTAGEDE	78,74	10	80,01	10	1,81
3471060	GONDOKUSUMAN	80,69	2	81,59	1	1,67
3471070	DANUREJAN	79,37	3	80,52	3	1,77
3471080	PAKUALAMAN	80,94	1	81,46	2	1,40
3471090	GONDONANAN	78,50	13	79,60	12	1,72
3471100	NGAMPILAN	79,33	5	80,15	7	1,58
3471110	WIROBRAJAN	78,87	9	80,04	9	1,77
3471120	GEDONG TENGEN	77,11	14	78,50	14	1,83
3471130	JETIS	78,66	11	79,74	11	1,72
3471140	TEGALREJO	78,50	12	79,44	13	1,64
3471000	YOGYAKARTA	79,52		80,52		1,70
3400000	DIY	75,77		77,37		1,88

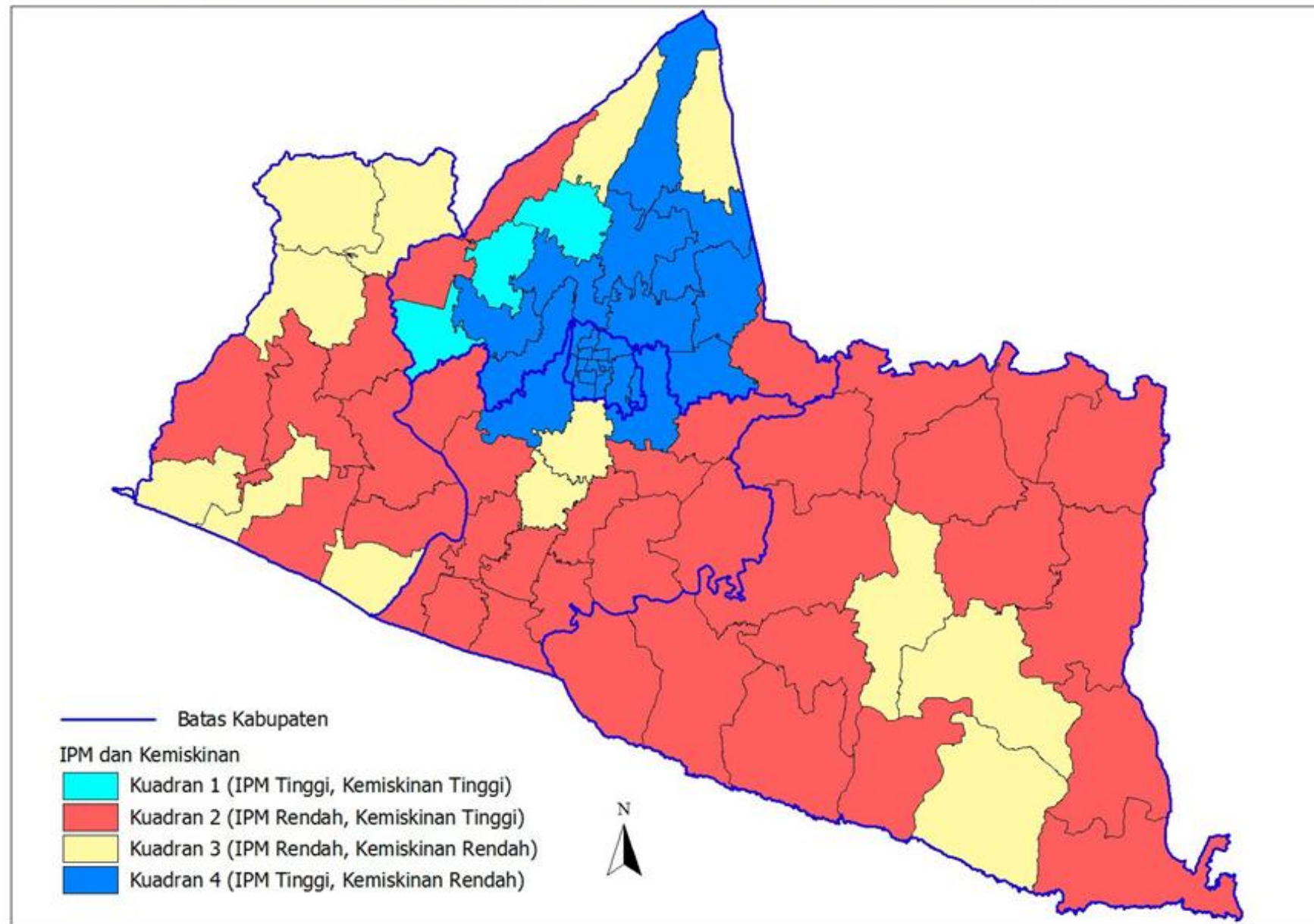
LAMPIRAN 3.

Kwadrant IPM dan Estimasi Persentase Penduduk Miskin PPLS 2011 Menurut Kecamatan di DIY

Kwadrant IV		Angka IPM	Kwadrant I	
Godean	Kraton	Moyudan	Persen Penduduk Miskin	
Gamping	Mergangsan	Seyegan		
Depok	Umbulharjo	Sleman		
Berbah	Kotagede			
Kalasan	Gondokusuman			
Ngaglik	Danurejan			
Pakem	Pakualaman			
Banguntapan	Gondomanan			
Kasihan	Ngampilan			
Mlati	Wirobrajan			
Ngemplak	Gedong Tengen			
Mantriweron	Jetis			
	Tegalrejo			
Sewon		Sanden	Pleret	Kwadrant II
Temon		Sedayu	Piyungan	
Wates		Minggir	Pajangan	
Galur		Tempel	Panggang	
Girimulyo		Panjatan	Purwosari	
Kalibawang		Lendah	Paliyan	
Samigaluh		Sentolo	Saptosari	
Bantul		Pengasih	Tanjungsari	
Tepus		Kokap	Rongkop	
Semanu		Nanggulan	Girisubo	
Wonosari		Srandakan	Ponjong	
Turi		Kretek	Karangmojo	
Cangkringan		Pundong	Playen	
		Bambang Lipuro	Patuk	
		Pandak	Gedangsari	
		Jetis	Nglipar	
		Imogiri	Ngawen	
		Dlingo	Semin	
			Prambanan	

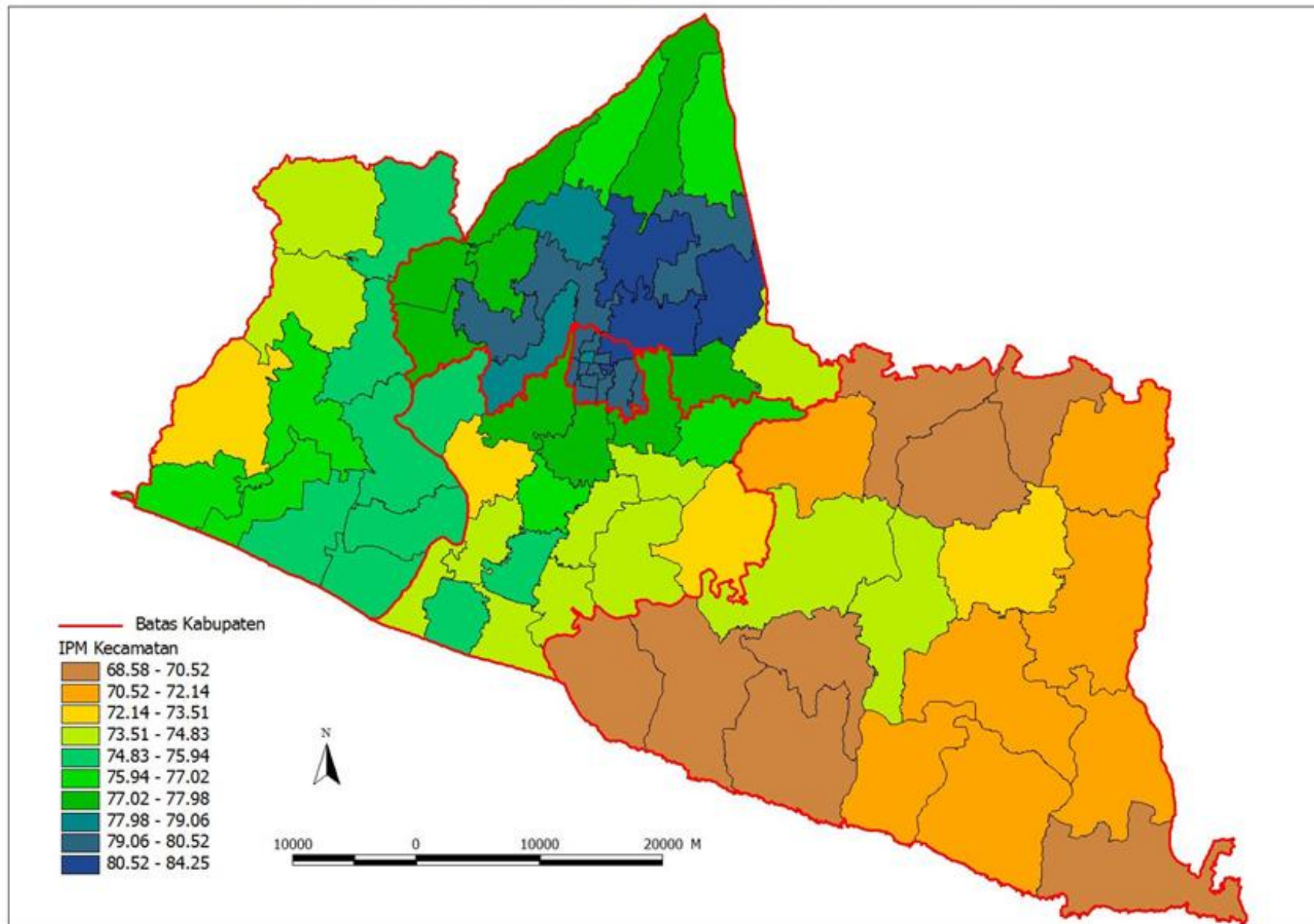
LAMPIRAN IV. PETA TEMATIK IPM DAN TINGKAT KEMISKINAN DI DIY, 2013

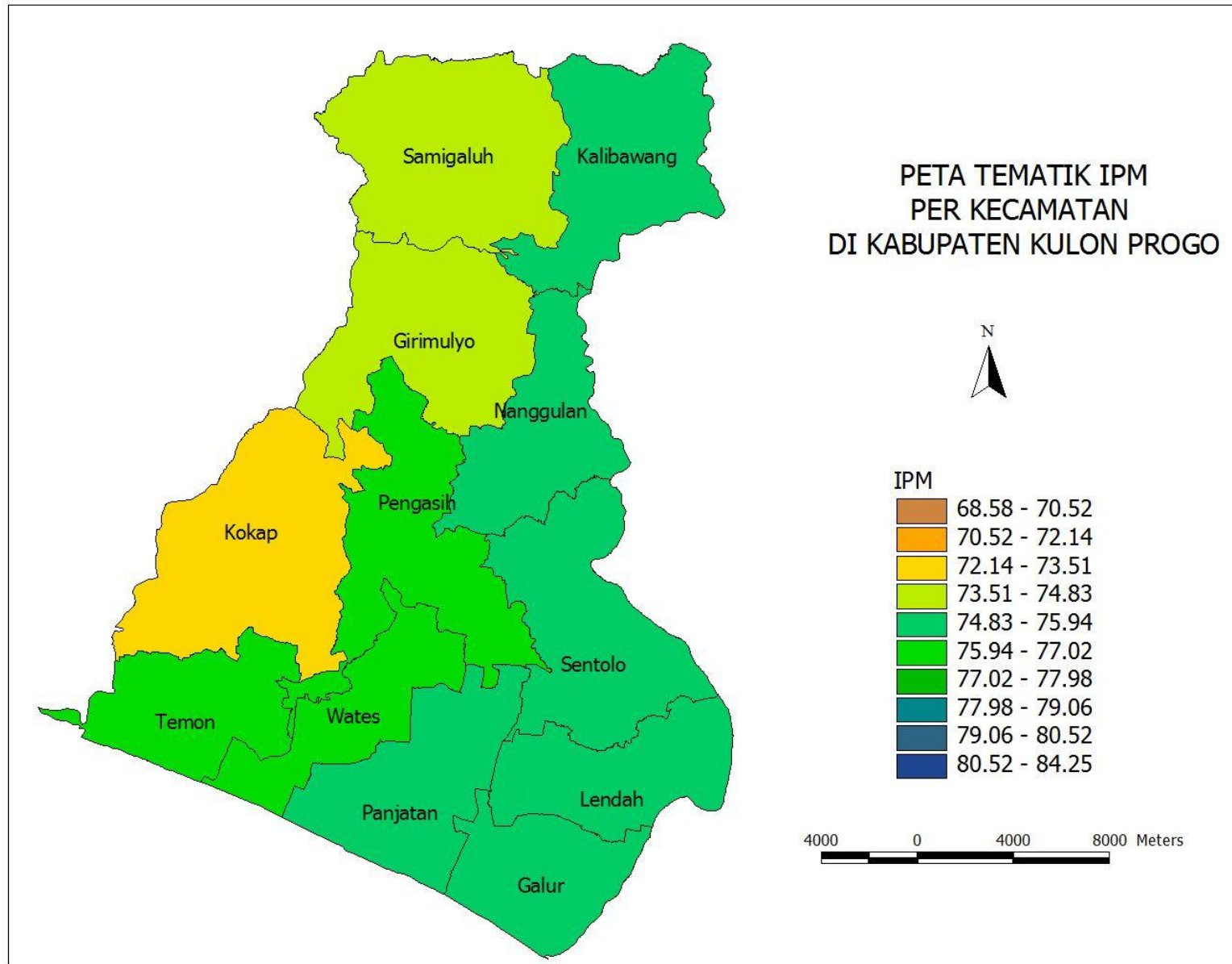
PETA TEMATIK IPM KECAMATAN 2013 dan TINGKAT KEMISKINAN DI DI YOGYAKARTA

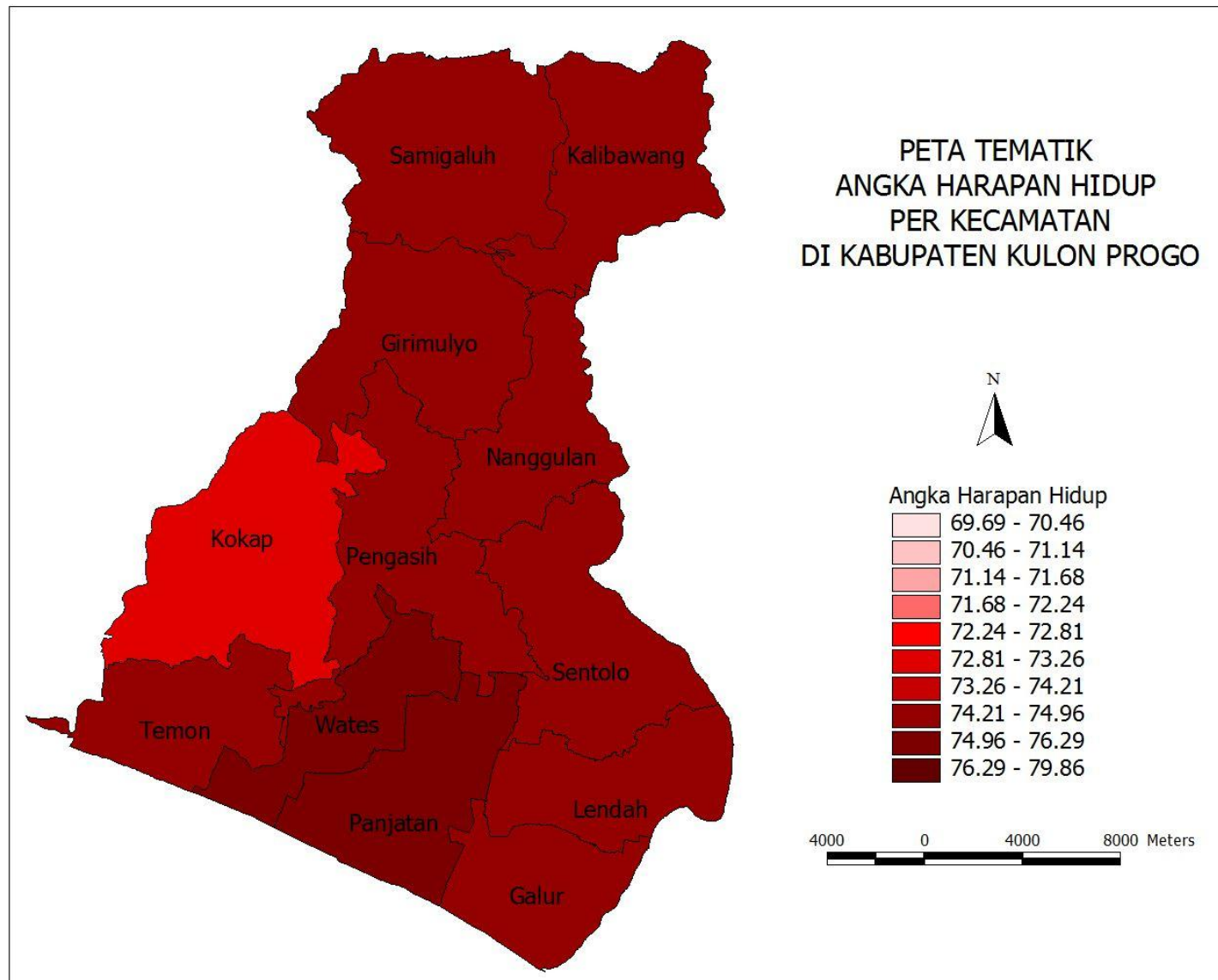


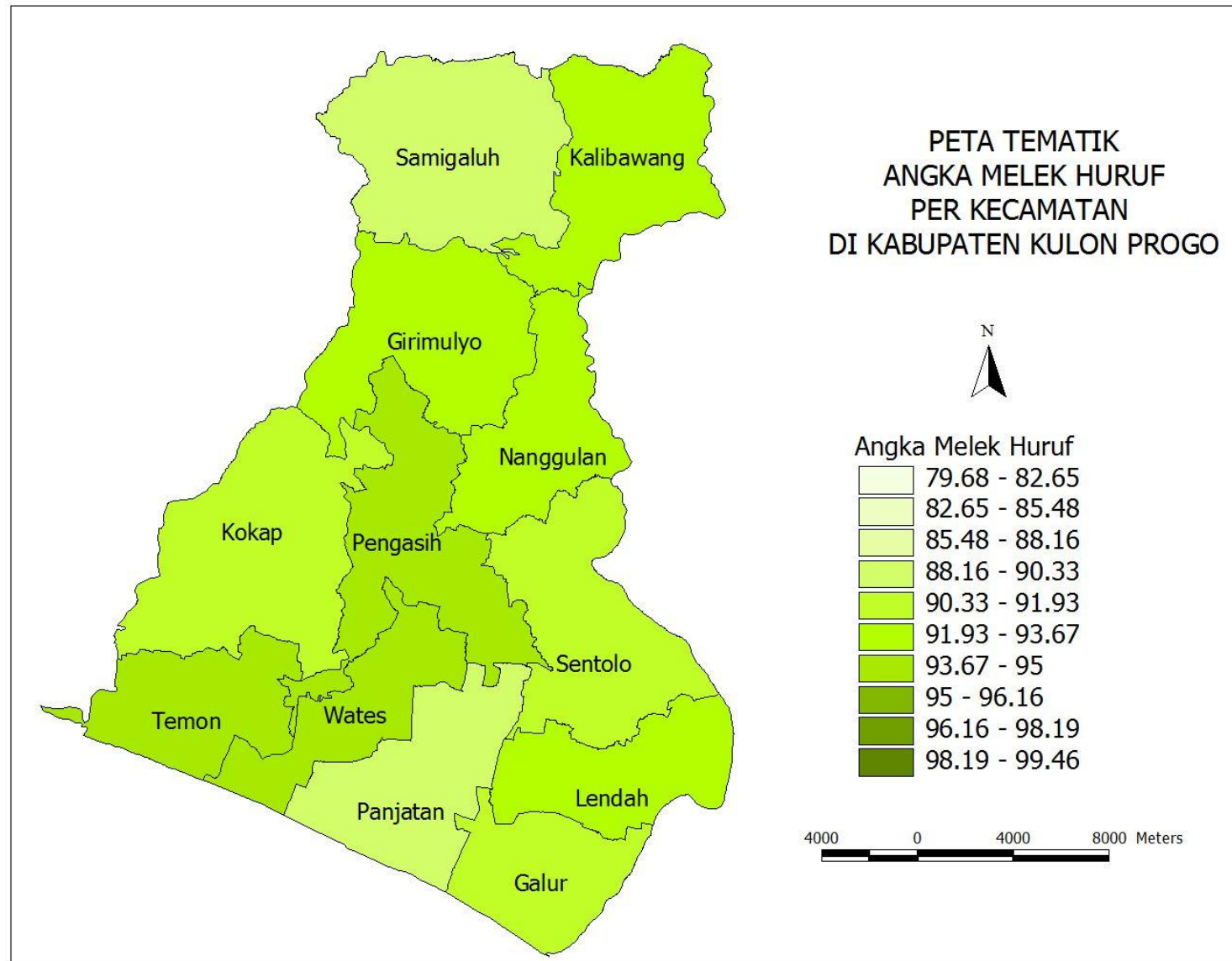
LAMPIRAN V. PETA TEMATIK IPM DAN UNSUR-UNSUR PENYUSUN IPM KECAMATAN DI DIY, 2013

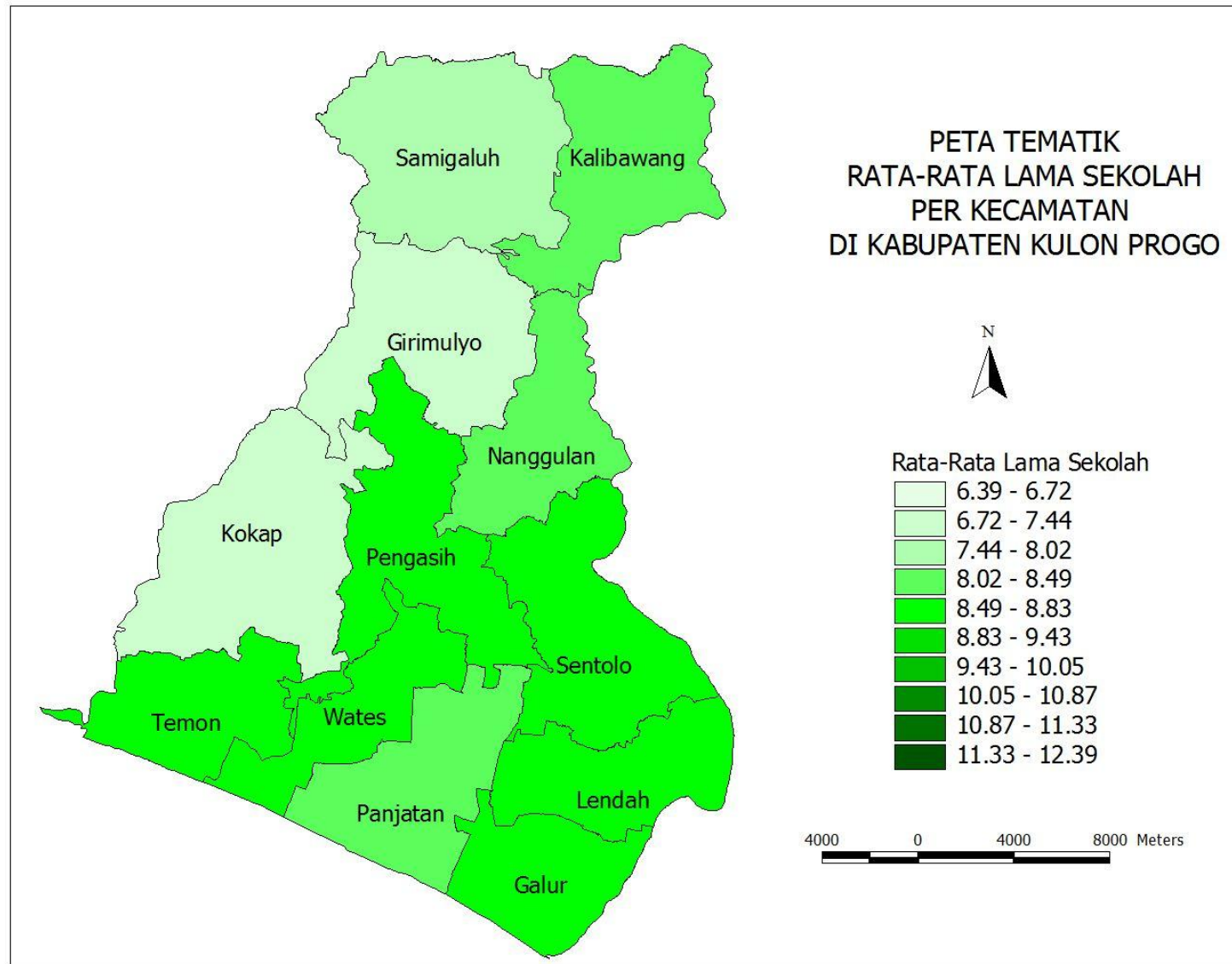
PETA TEMATIK IPM KECAMATAN 2013 DI DI YOGYAKARTA

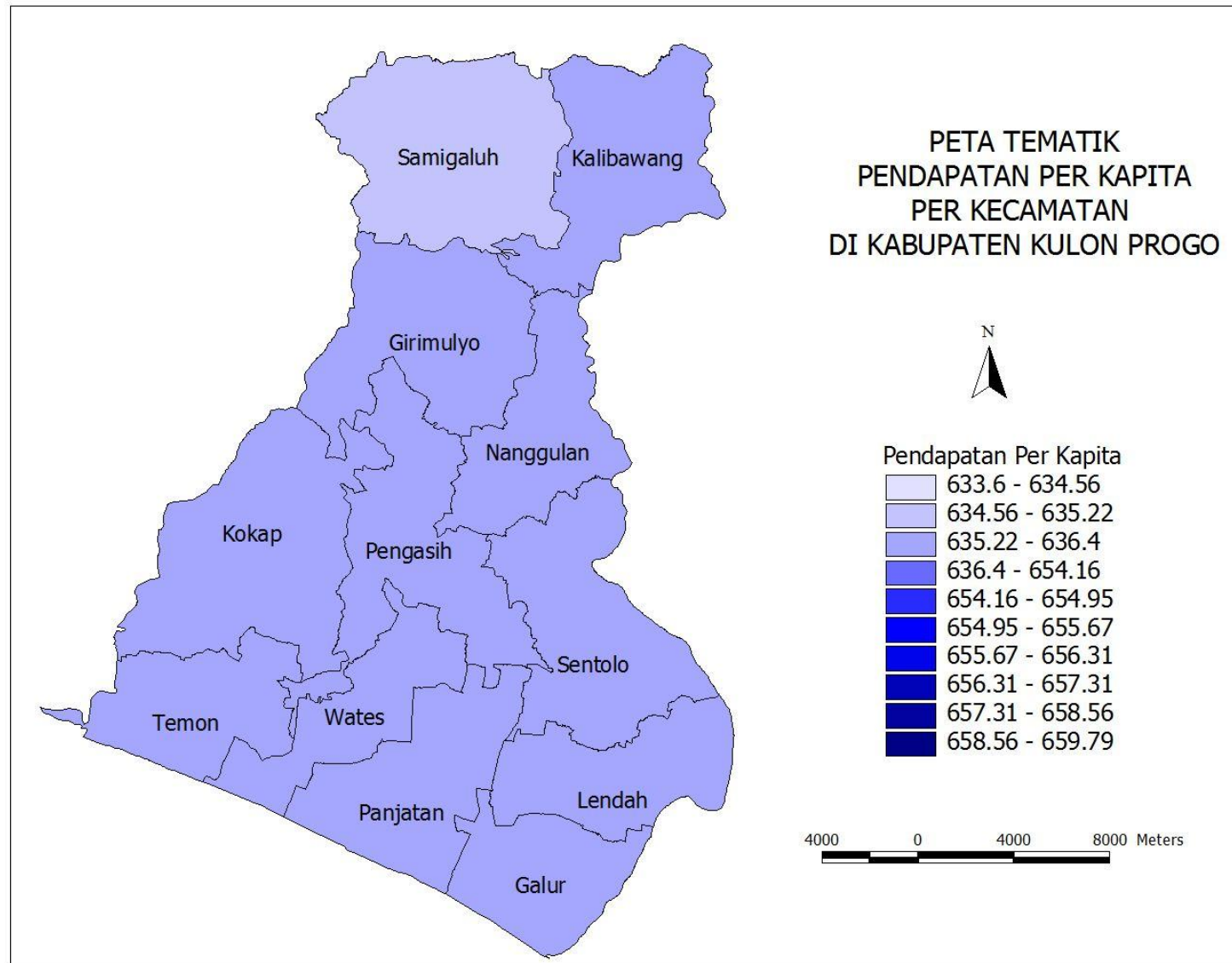




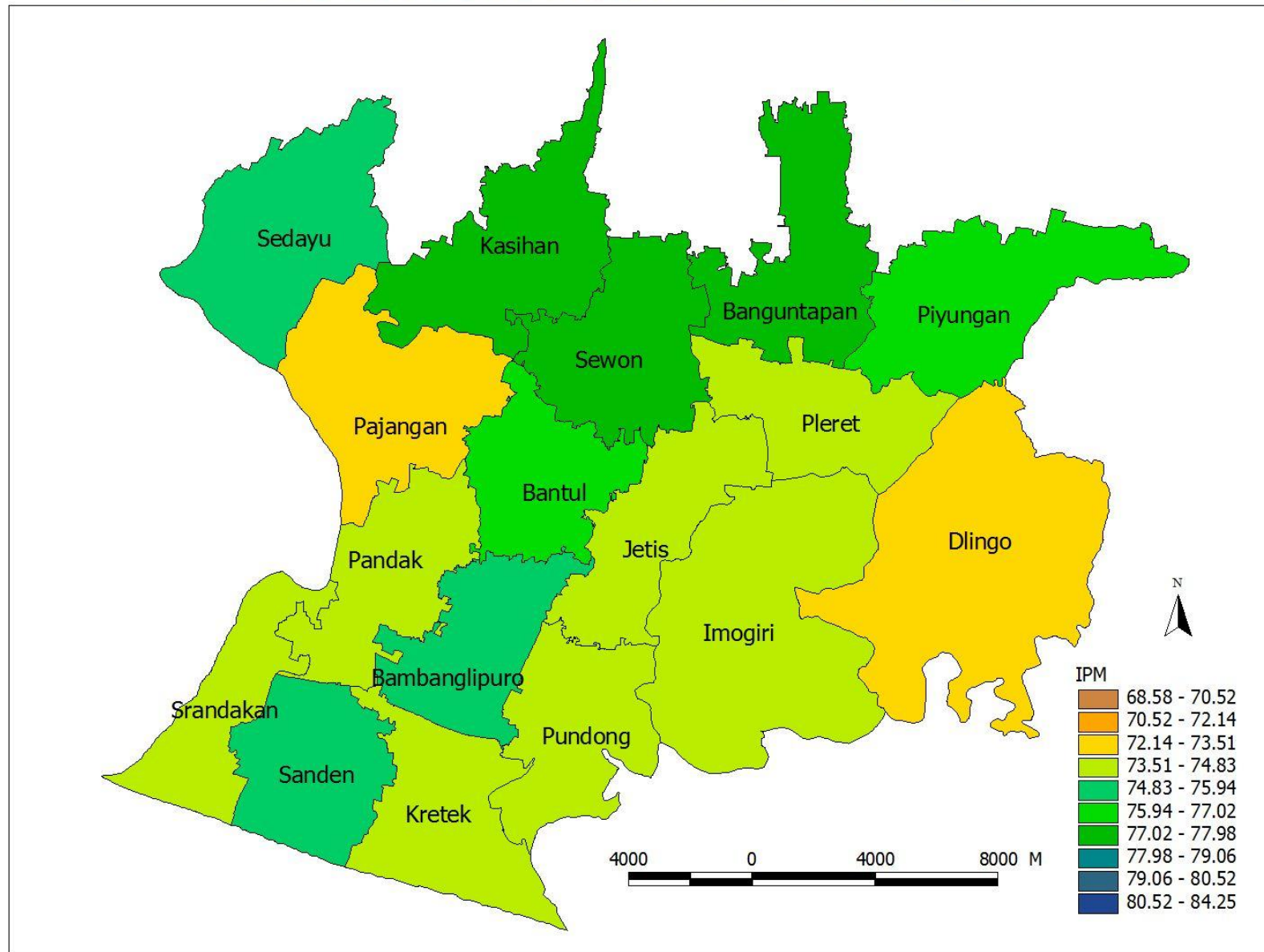




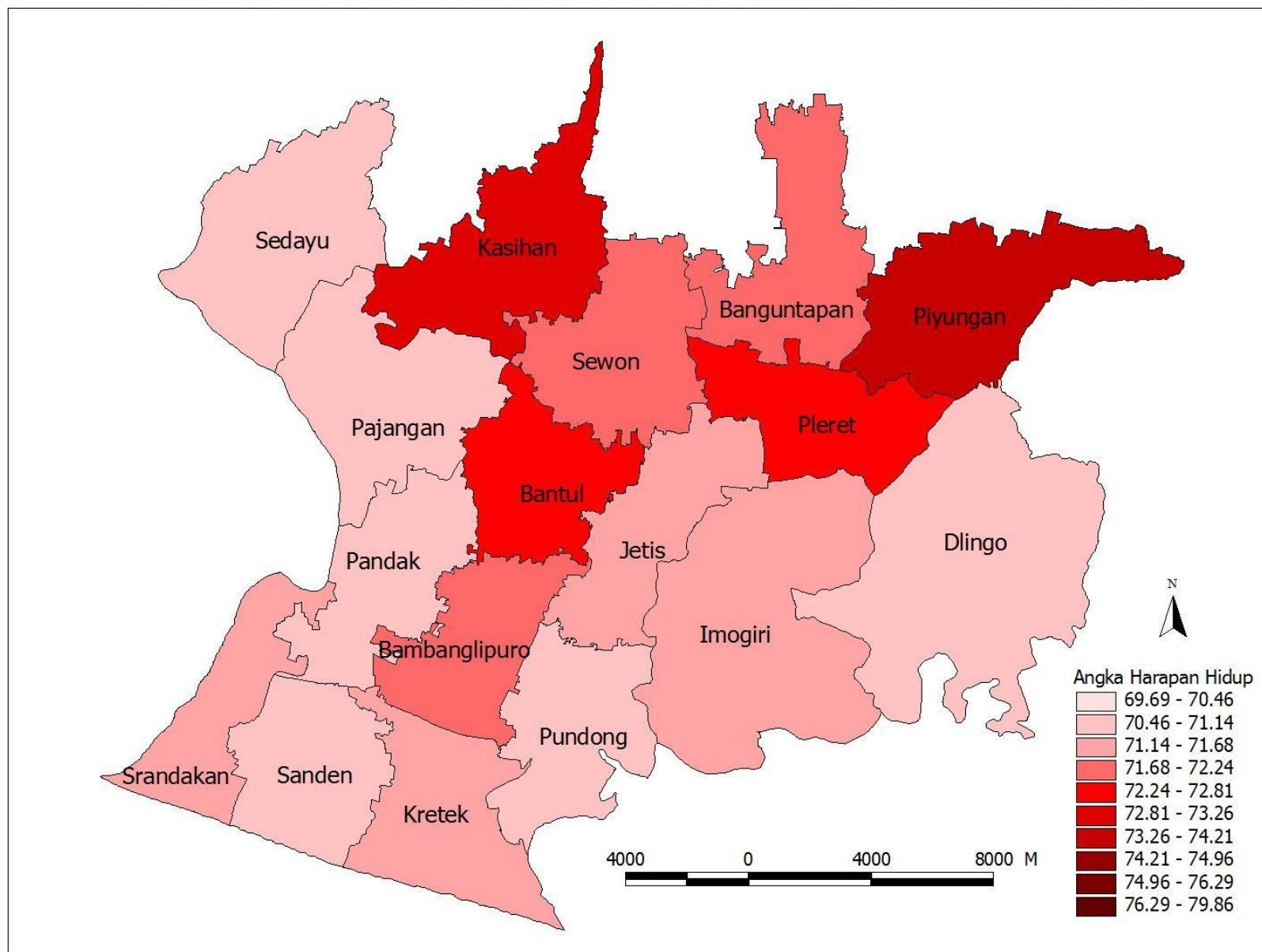




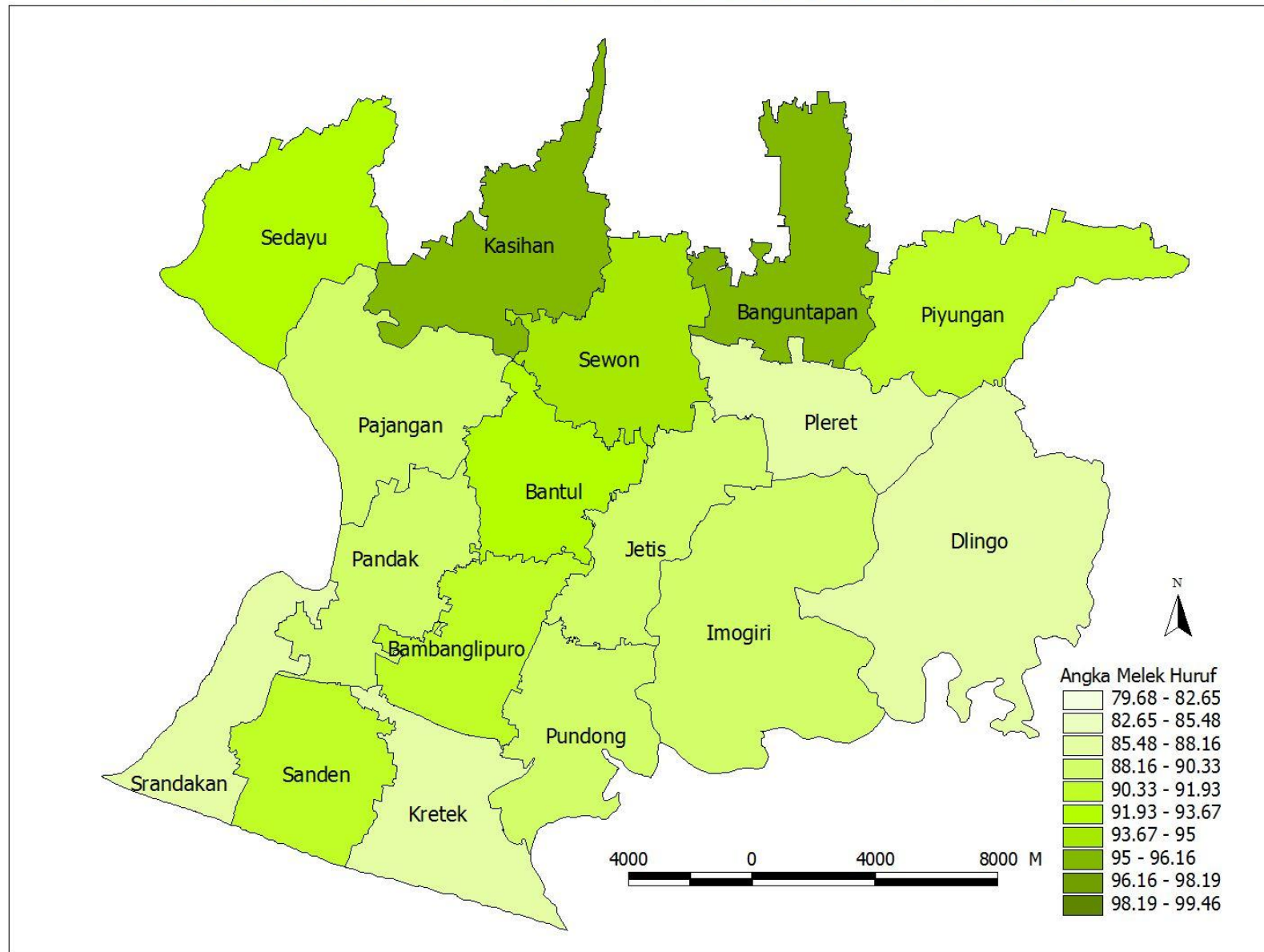
PETA TEMATIK IPM KECAMATAN 2013 DI KABUPATEN BANTUL



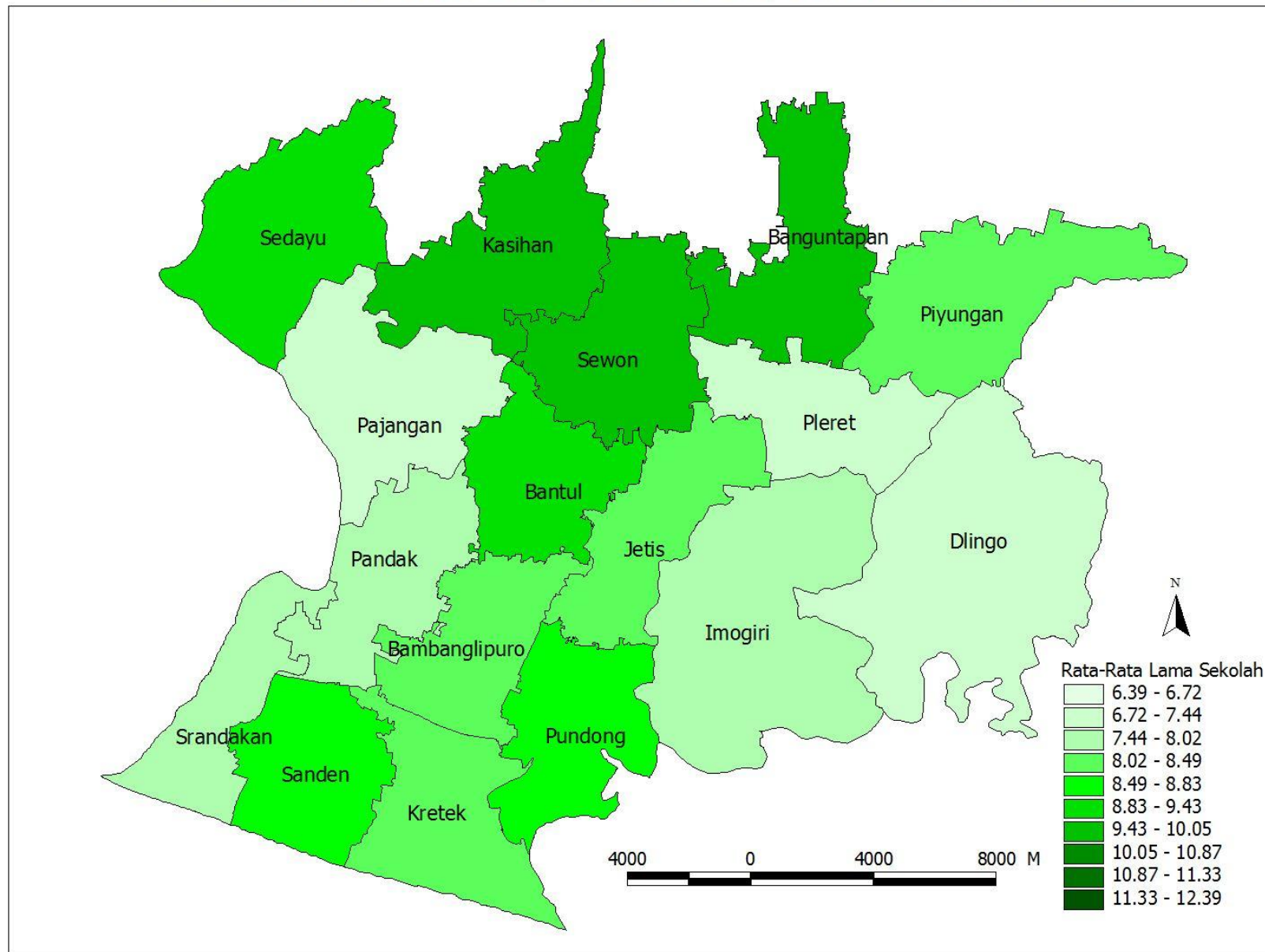
PETA TEMATIK ANGKA HARAPAN HIDUP PER KECAMATAN DI KABUPATEN BANTUL



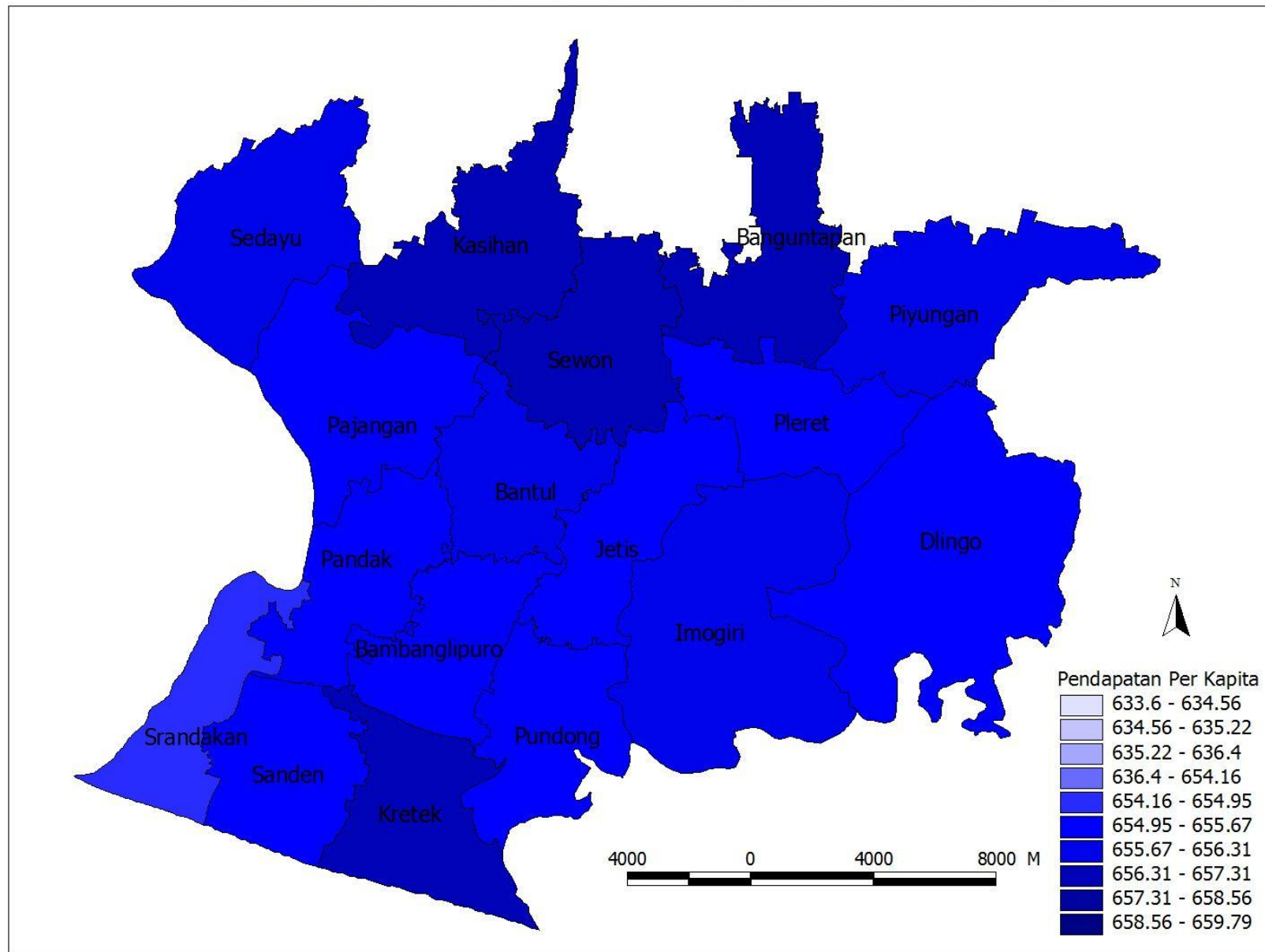
PETA TEMATIK ANGKA MELEK HURUF PER KECAMATAN DI KABUPATEN BANTUL



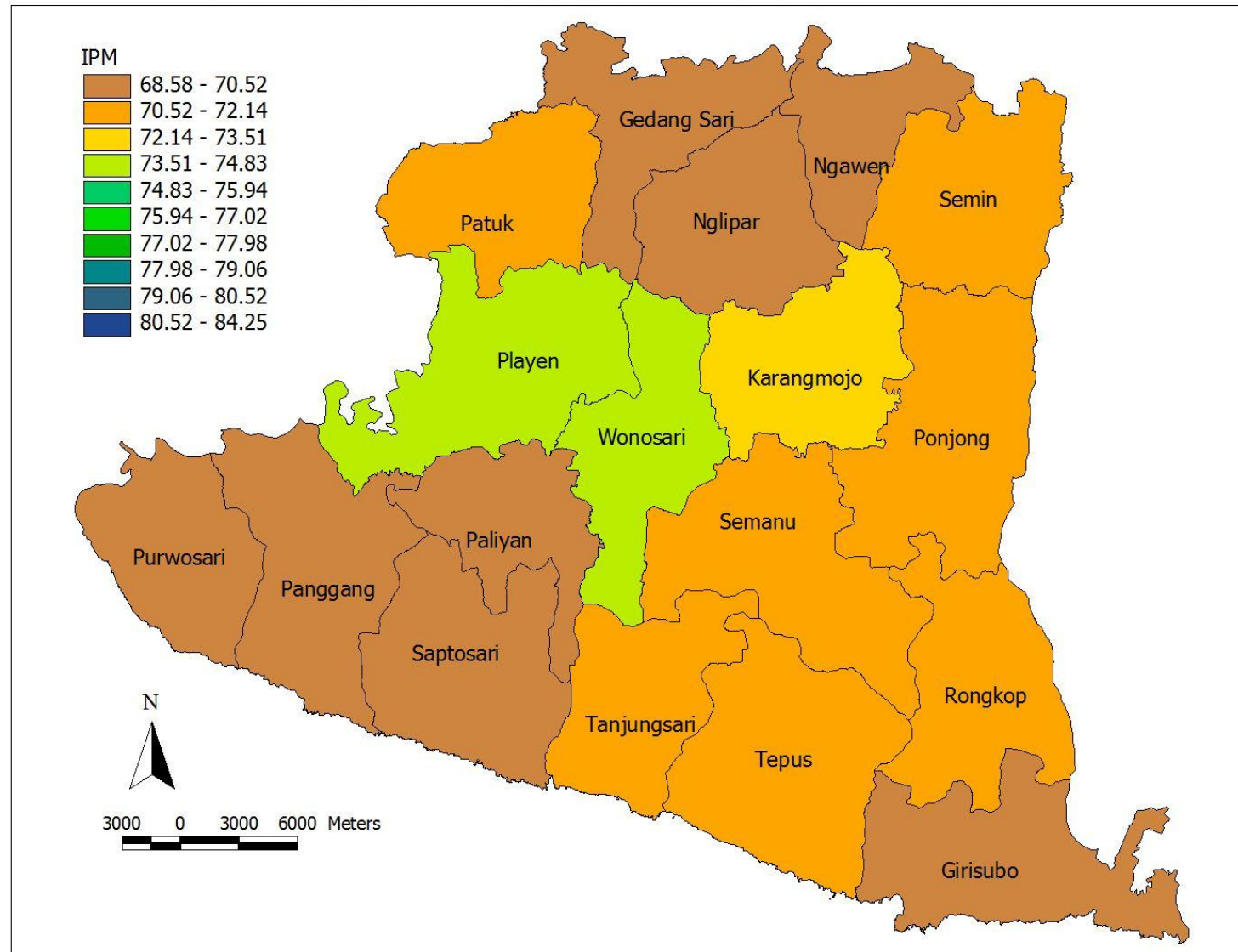
PETA TEMATIK RATA-RATA LAMA SEKOLAH KECAMATAN DI KABUPATEN BANTUL



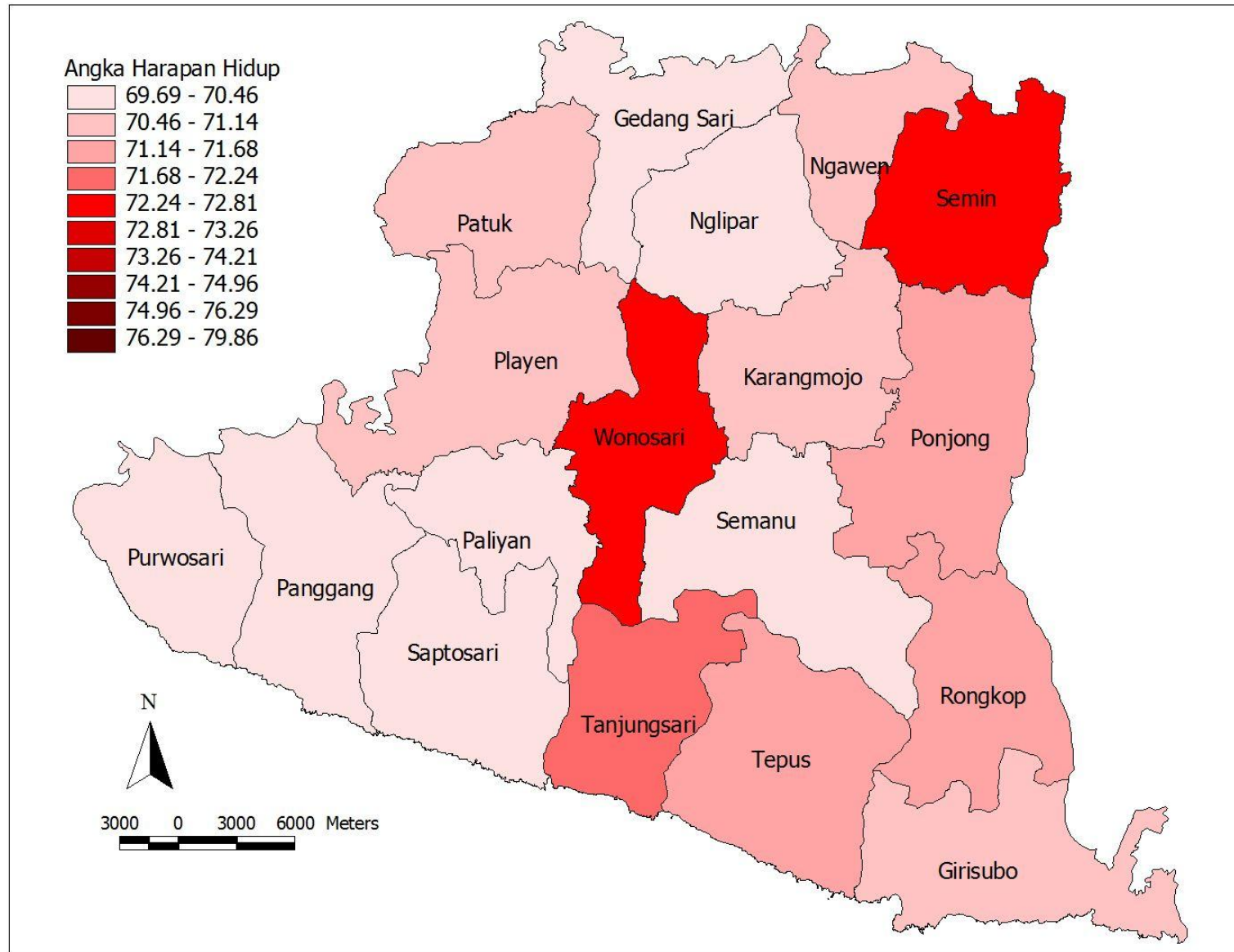
PETA TEMATIK PENDAPATAN PER KAPITA KECAMATAN DI KABUPATEN BANTUL



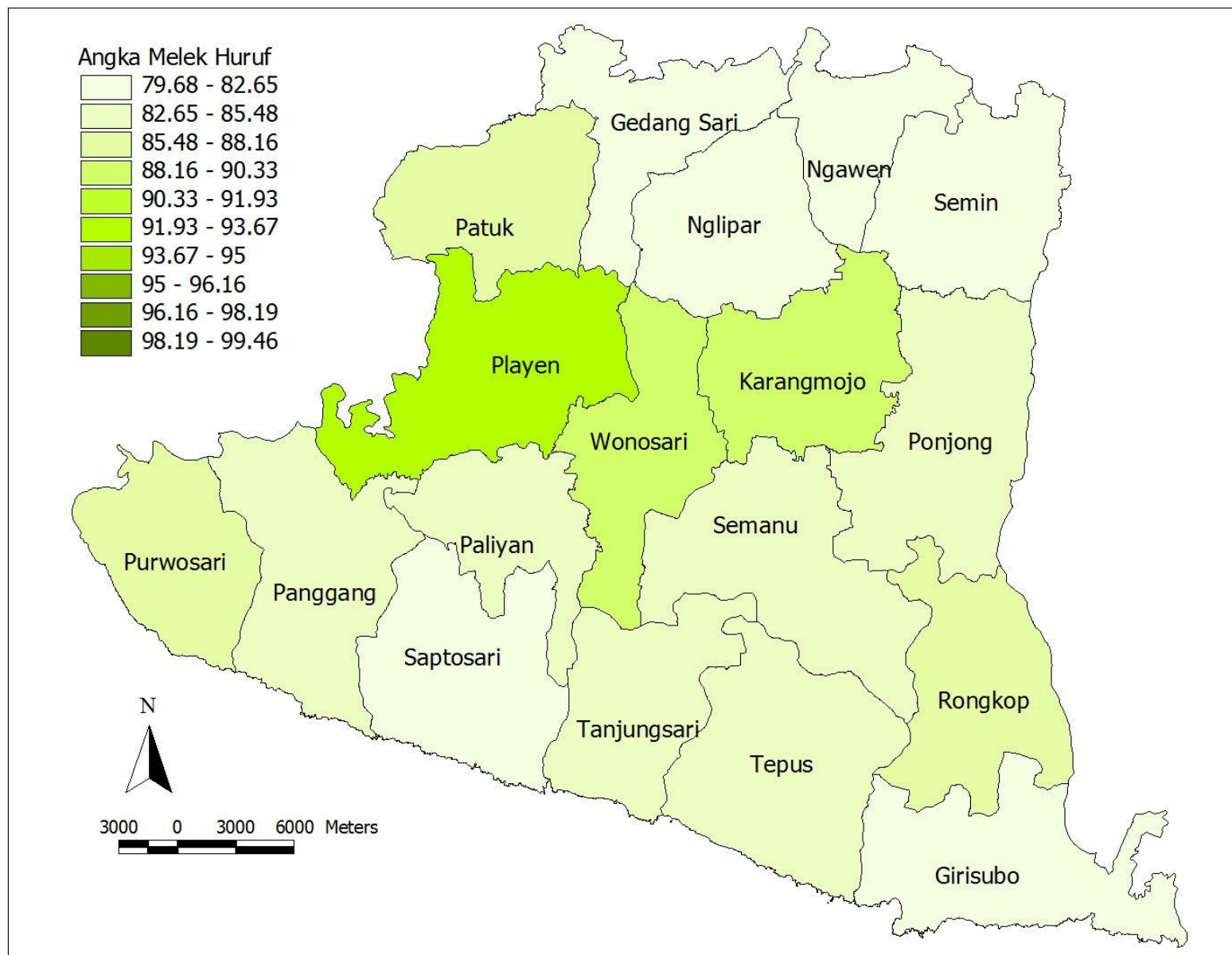
PETA TEMATIK IPM KECAMATAN 2013 DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL



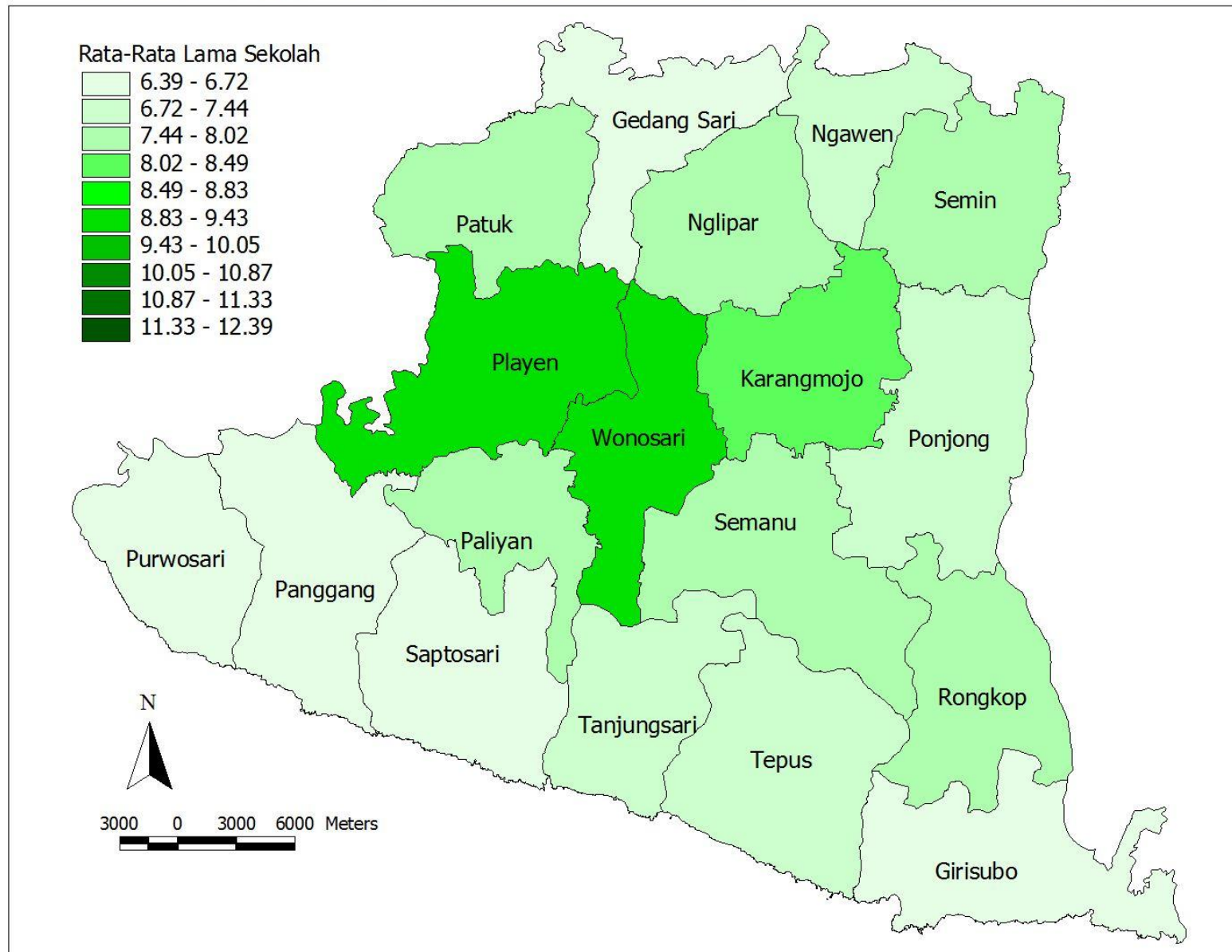
PETA TEMATIK ANGKA HARAPAN HIDUP PER KECAMATAN DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL



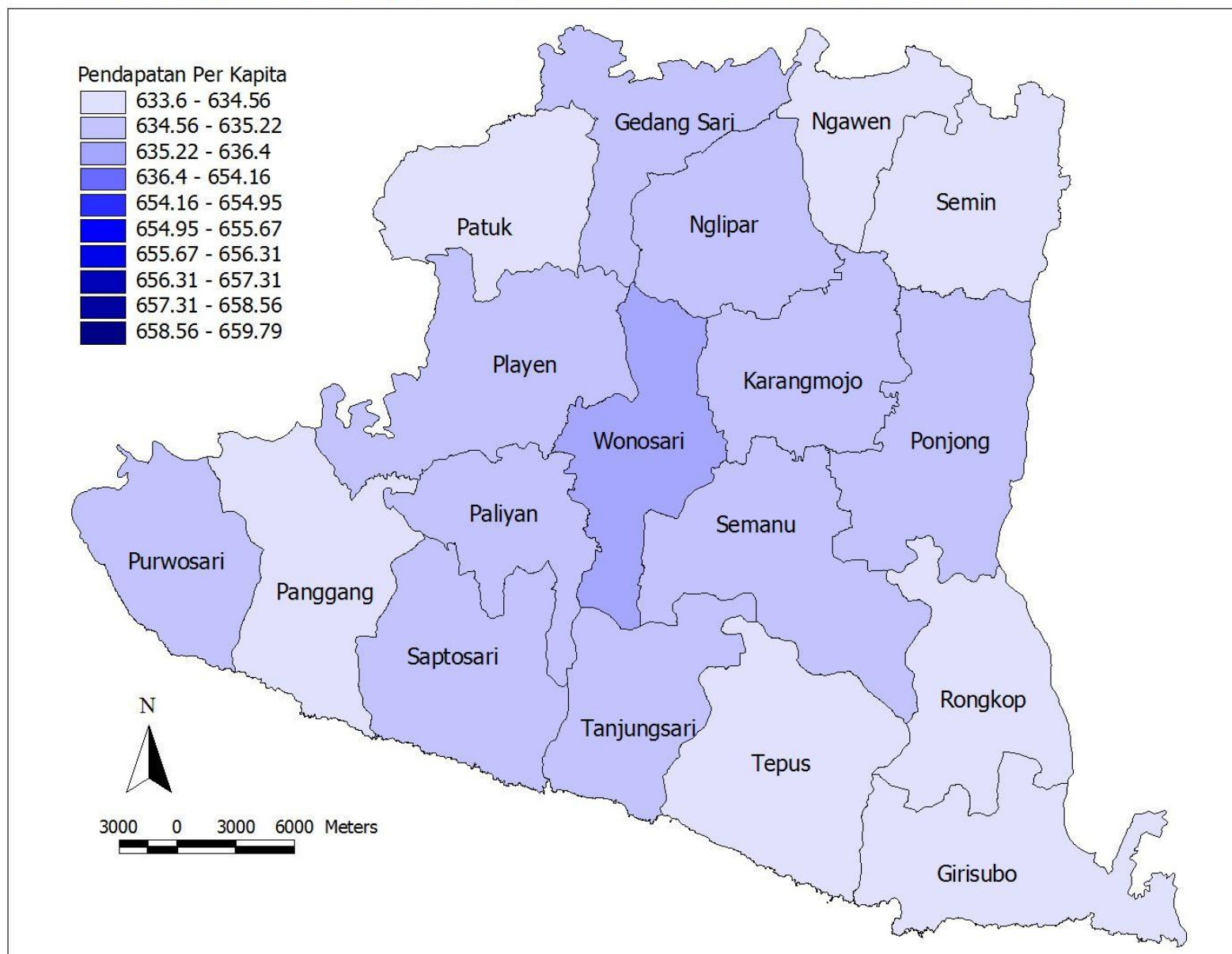
PETA TEMATIK ANGKA MELEK HURUF PER KECAMATAN DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL



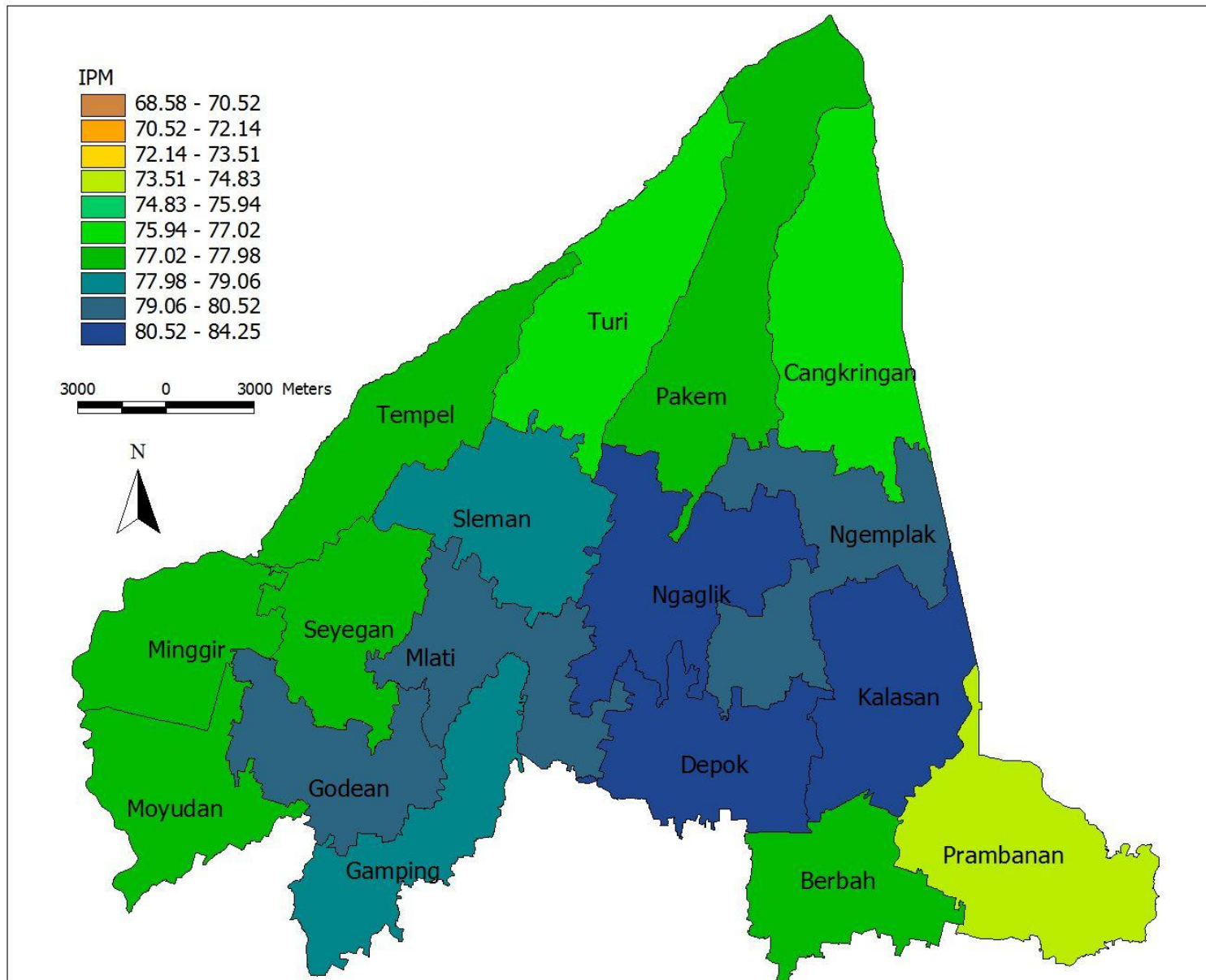
PETA TEMATIK RATA-RATA LAMA SEKOLAH PER KECAMATAN DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL



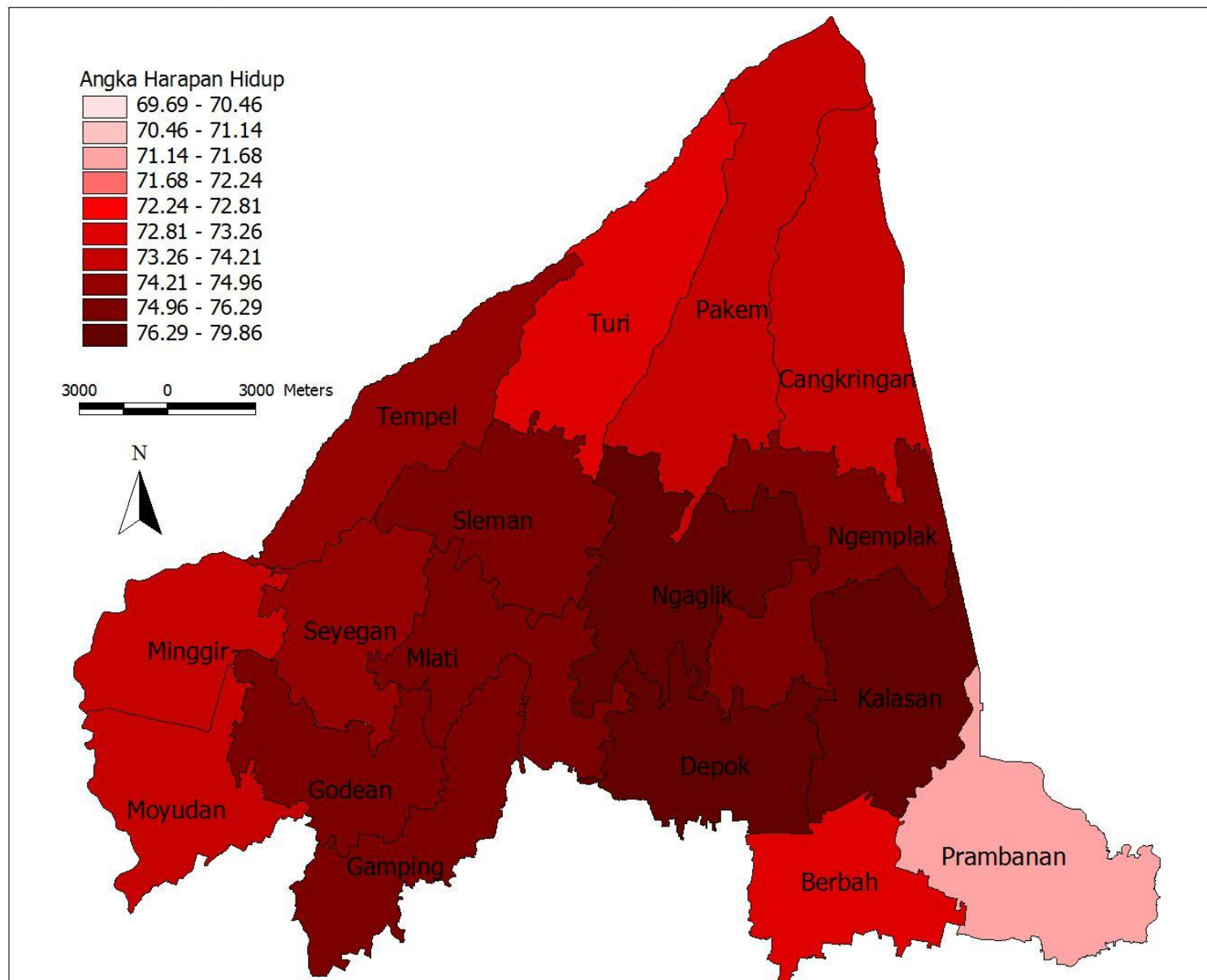
PETA TEMATIK PENDAPATAN PER KAPITA PER KECAMATAN DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL



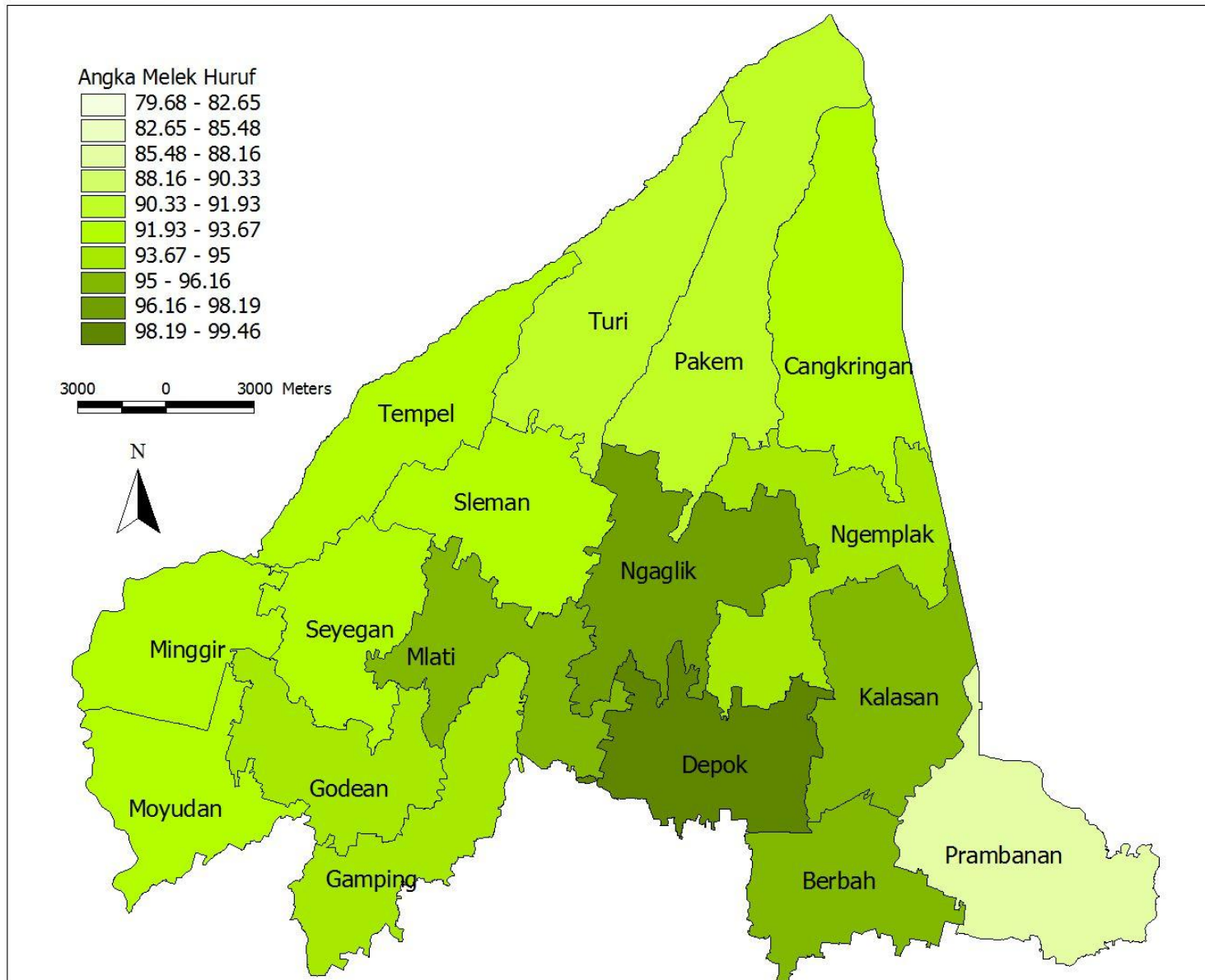
PETA TEMATIK IPM KECAMATAN 2013 DI KABUPATEN SLEMAN



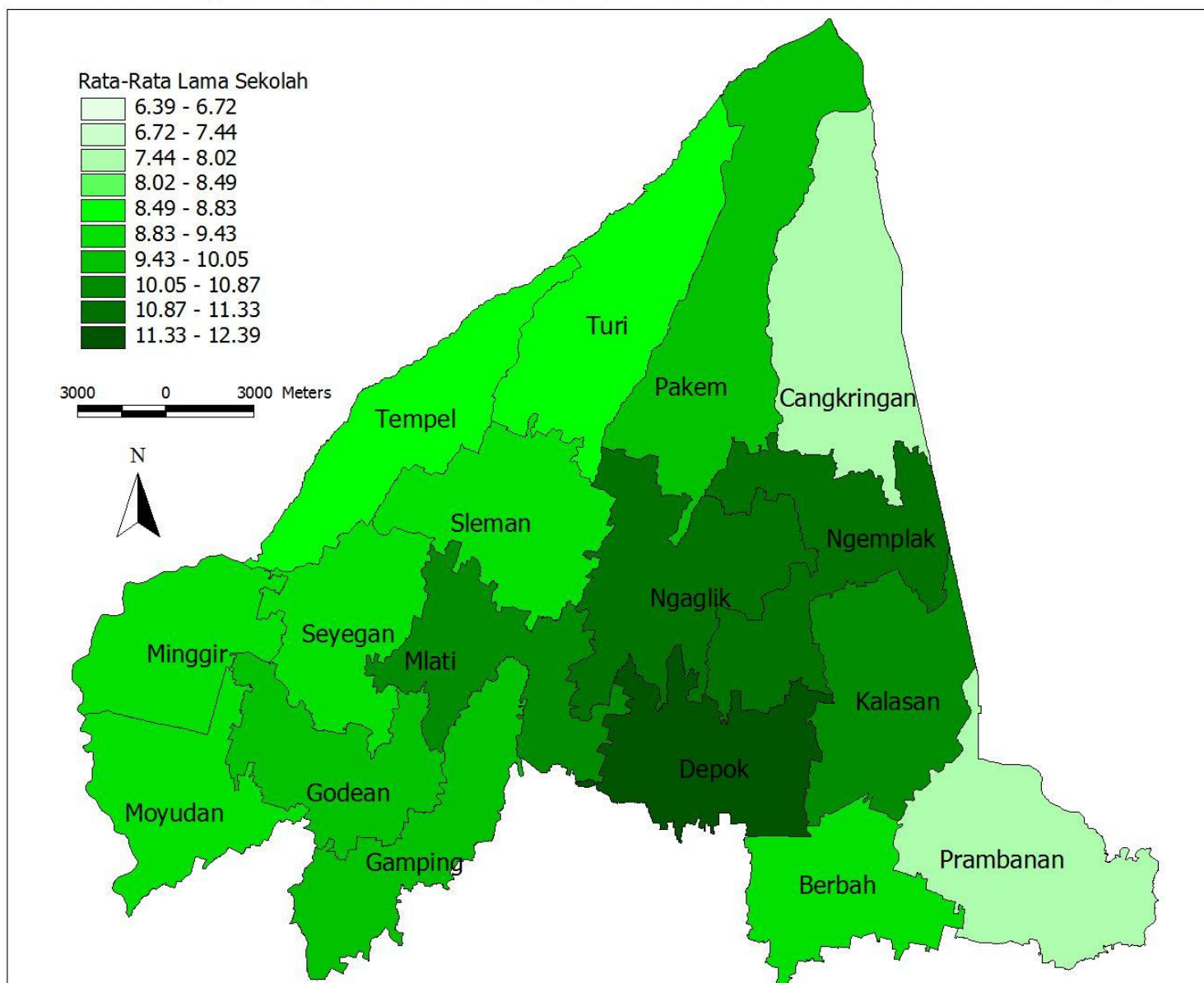
PETA TEMATIK ANGKA HARAPAN HIDUP PER KECAMATAN DI KABUPATEN SLEMAN



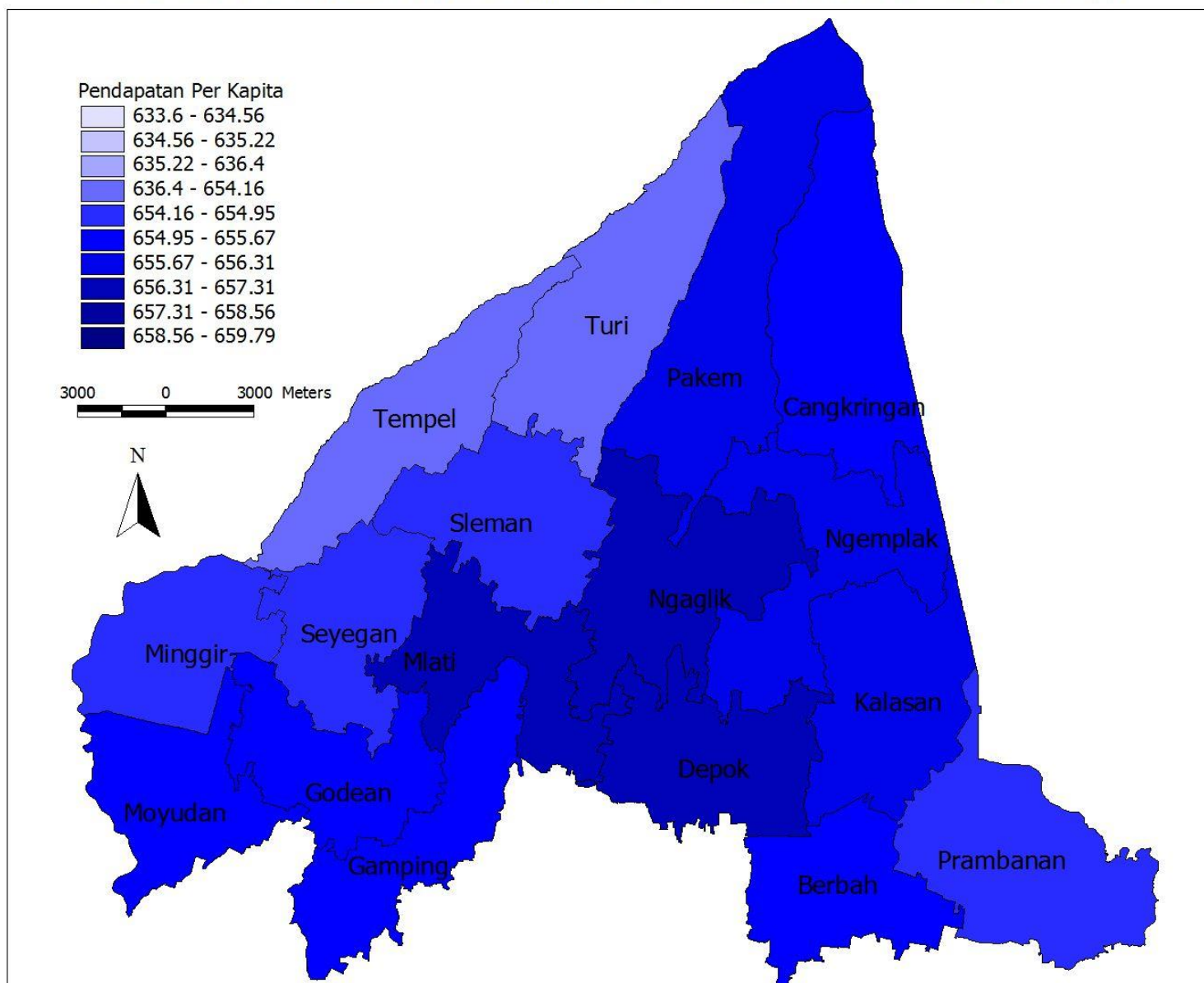
PETA TEMATIK ANGKA MELEK HURUF PER KECAMATAN DI KABUPATEN SLEMAN



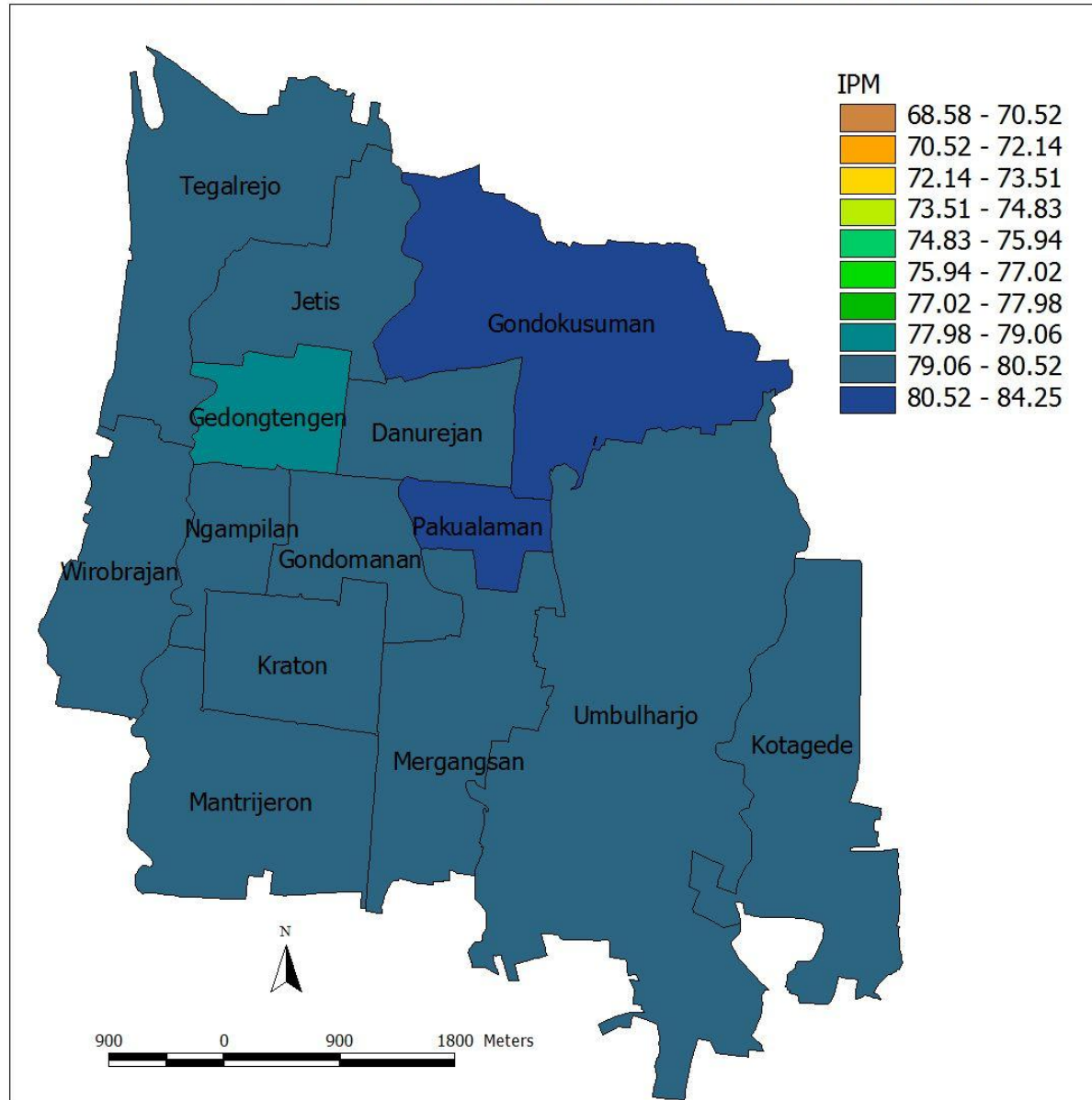
PETA TEMATIK RATA-RATA LAMA SEKOLAH PER KECAMATAN DI KABUPATEN SLEMAN



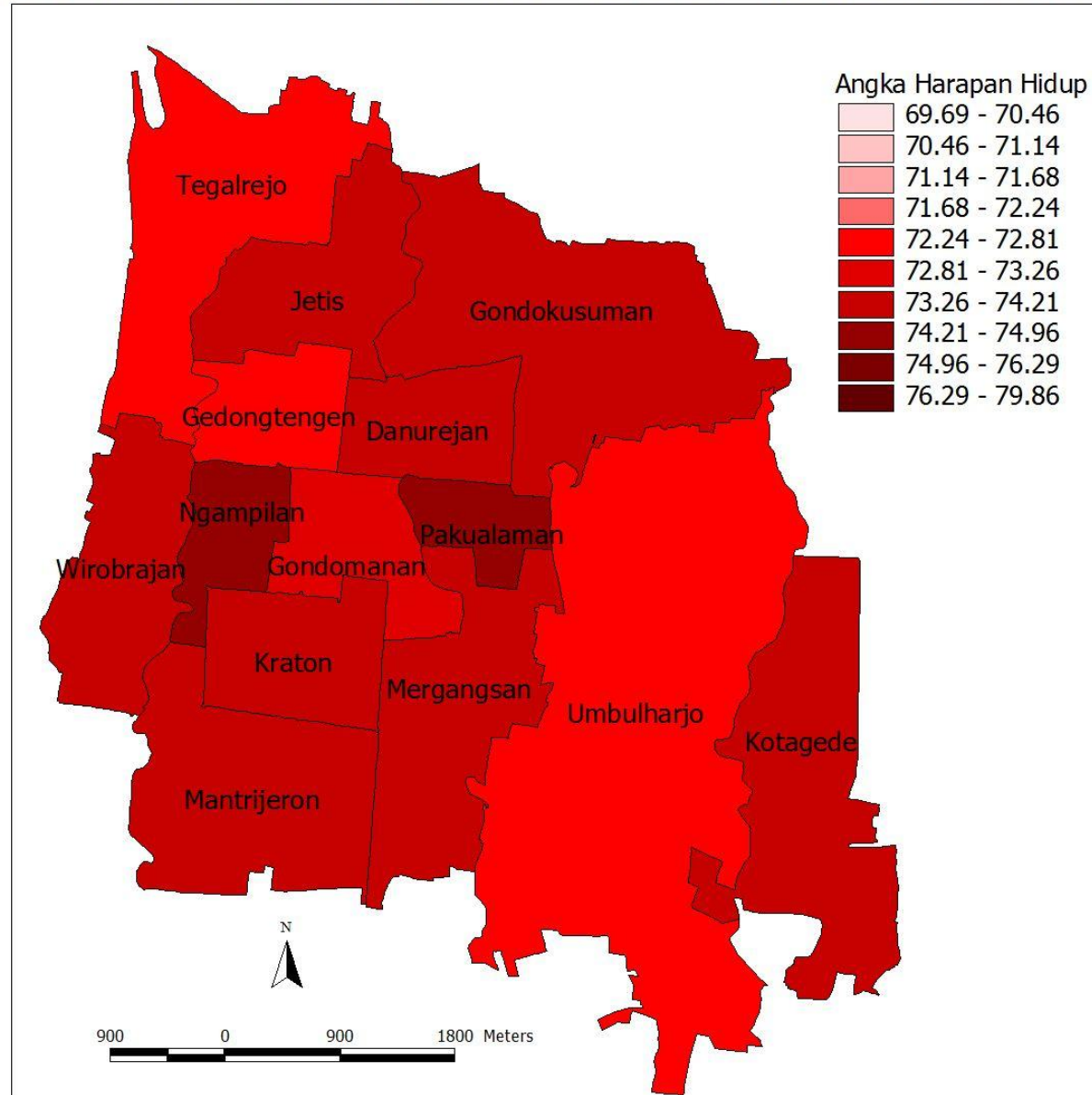
PETA TEMATIK PENDAPATAN PER KAPITA PER KECAMATAN DI KABUPATEN SLEMAN



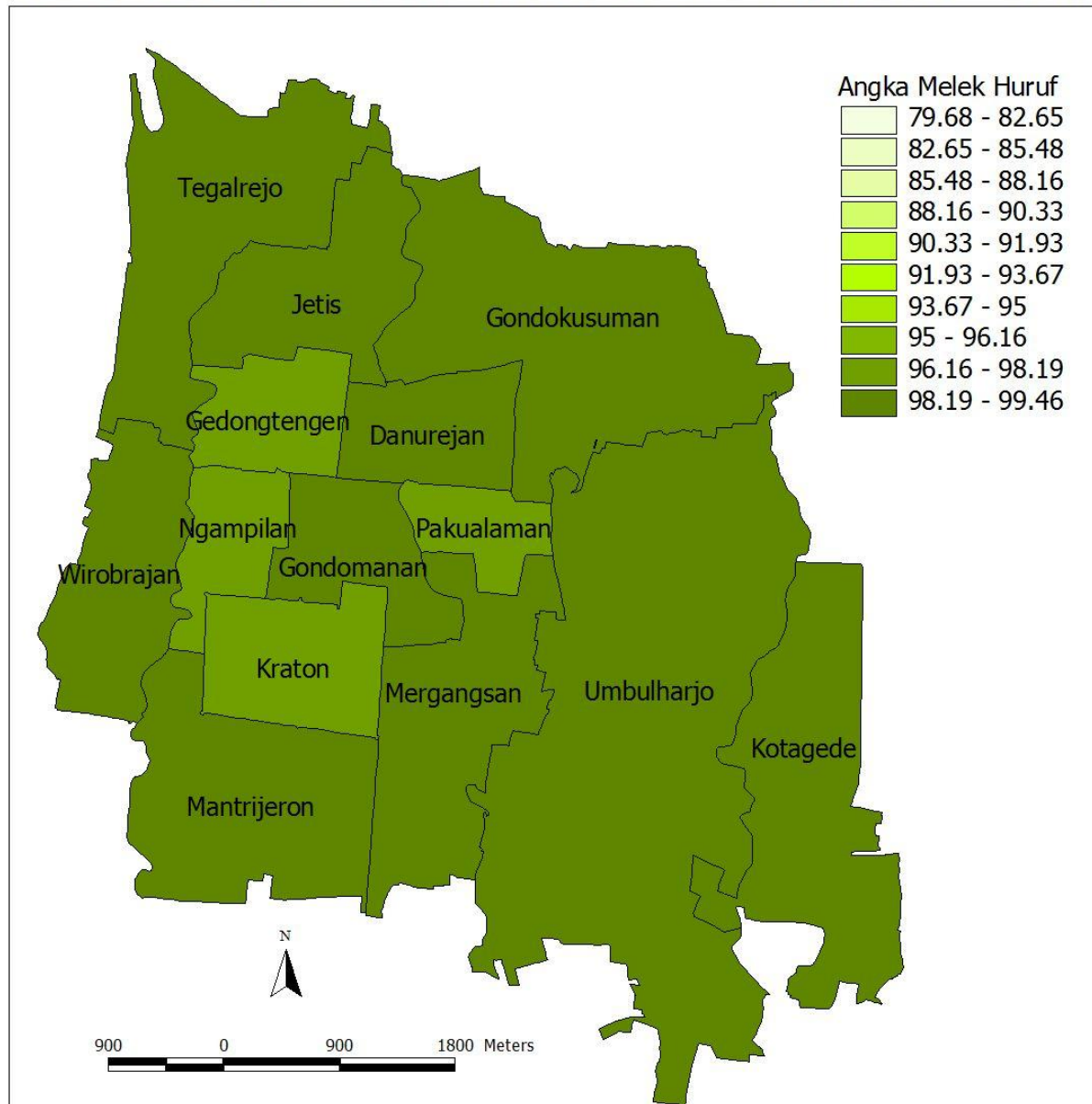
PETA TEMATIK IPM KECAMATAN 2013 DI KOTA YOGYAKARTA



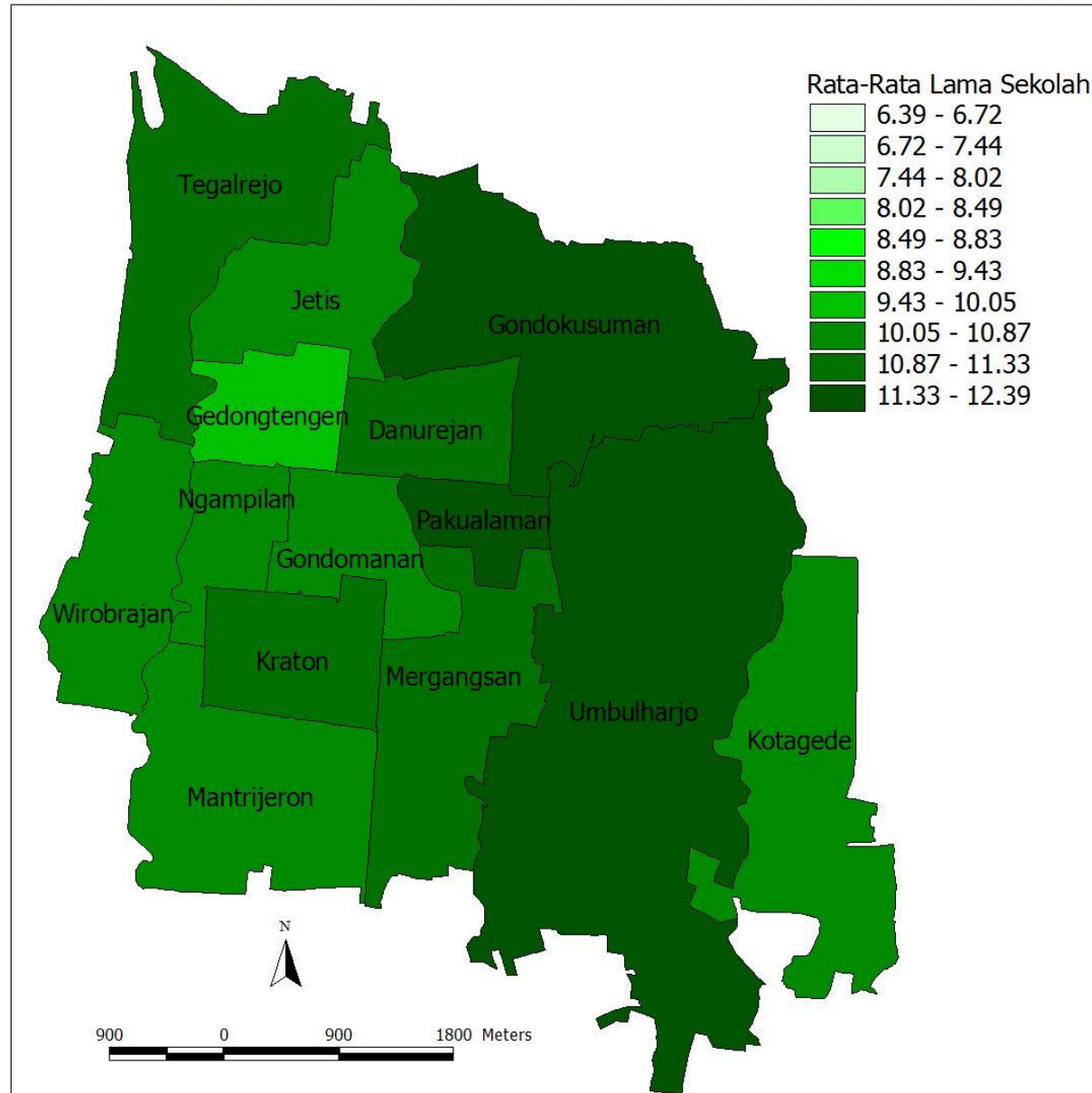
PETA TEMATIK ANGKA HARAPAN HIDUP PER KECAMATAN DI KOTA YOGYAKARTA



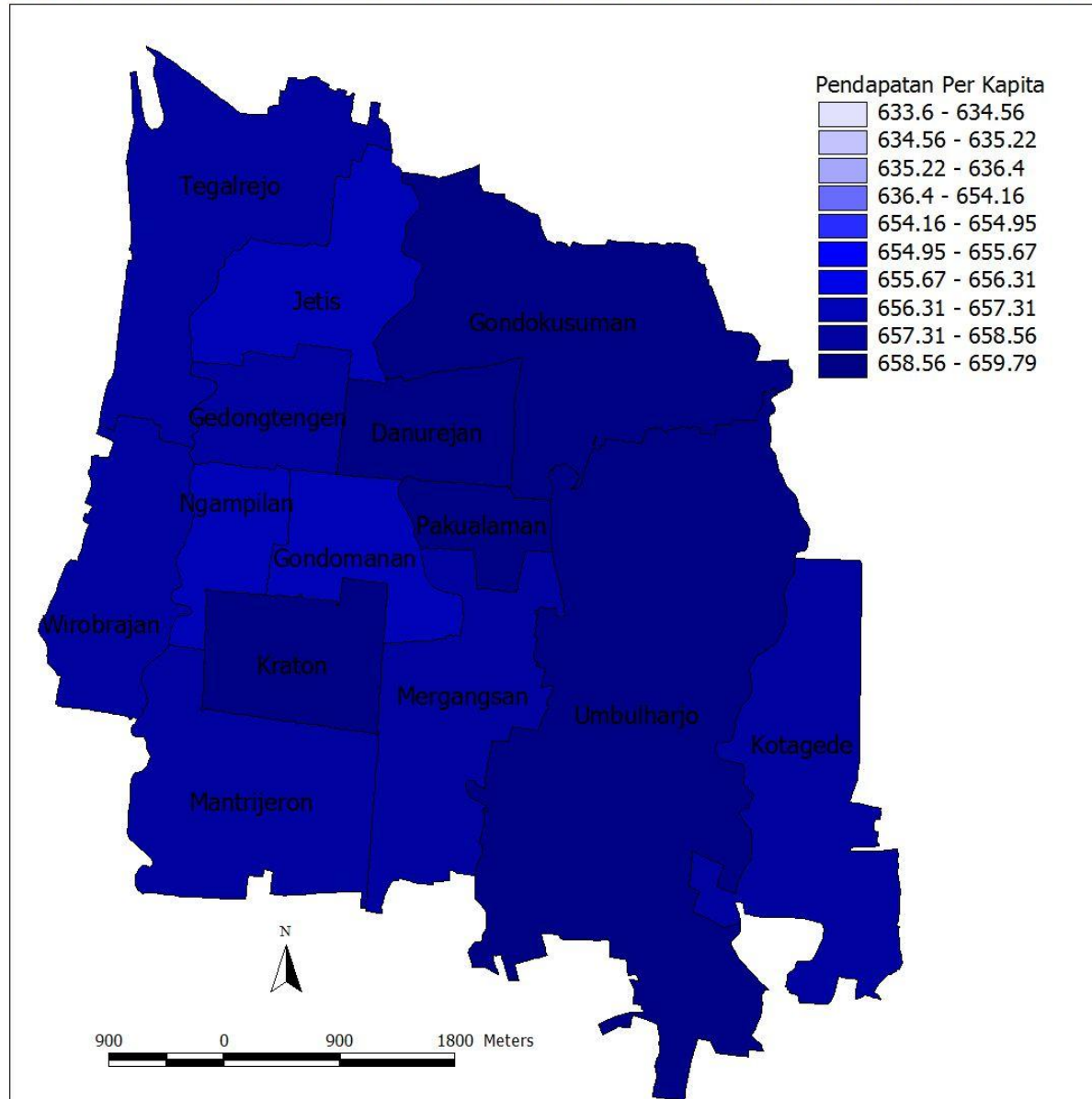
PETA TEMATIK ANGKA MELEK HURUF PER KECAMATAN DI KOTA YOGYAKARTA



PETA TEMATIK RATA-RATA LAMA SEKOLAH PER KECAMATAN DI KOTA YOGYAKARTA



PETA TEMATIK PENDAPATAN PER KAPITA PER KECAMATAN DI KOTA YOGYAKARTA





DATA

MENCERDASKAN BANGSA